

DOKUMEN

INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (IKPLHD) KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2023



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH



BUPATI ACEH TIMUR

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. MAHYUDDIN, M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Aceh Timur

Menyatakan bahwa penetapan Isu Prioritas Lingkungan Hidup pada Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh Tahun 2023 telah didasarkan pada proses yang partisipatif dan melibatkan para pemangku kepentingan di wilayah kami.

Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur dimaksud adalah :

1. Pengendalian Banjir
2. Pengelolaan Sanitasi
3. Pengendalian Pencemaran Air dan Udara

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan seperlunya.

Idi, Juli 2023

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

Ir. MAHYUDDIN, M.Si

Komplek Pusat Pemerintahan
Jalan Banda Aceh-Medan Km.370 Gedung No.22 – 23 Idi
KodePos 24454 Telepon (0646) 21115 Fax.(0646) 211115



BUPATI ACEH TIMUR

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. MAHYUDDIN, M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Aceh Timur

Menyatakan bahwa inovasi yang disampaikan pada Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Aceh Timur adalah benar telah dilaksanakan dan masih terus berlanjut sampai saat ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan seperlunya.

Idi, Juli 2023

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,



Ir. MAHYUDDIN, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
JALAN BANDA ACEH – MEDAN KM 370 GEDUNG NOMOR 15 LANTAI 2 IDI
KODE POS 24454 TELEPON (0646)

Email : dlh_atim@yahoo.com – dlhacehtimur@gmail.com website : dlh.acehtimurkab.go.id

PAKTA INTEGRITAS

Saya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur menyatakan bahwa data yang ada di Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2023. dan data yang di input diaplikasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILHKD) adalah benar sesuai dengan sumber pada instansi terkait di Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Demikian saya sampaikan agar dapat digunakan seperlunya.

Idi, 26 Juli 2023

Mengetahui :
Pj. BUPATI ACEH TIMUR,



Ir. MAHYUDDIN, M.Si

Pembuat Pernyataan



MUHAMMAD YUNUS, SP, ME

Laporan ini disusun berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor. SE.4/SETJEN/DATIN/DTN.0/4/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Penyampaian Pedoman DIKPLHD Tahun 2023.

Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh Tim Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) yang telah mendukung penyusunan Dokumen ini. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat luas.

Idi, Juli 2023



Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

Ir. MAHYUDDIN, M.Si

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur Kehadirat ALLAH SWT atas karunia-Nya kami diberikan kemudahan dan kesempatan dapat menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain menyatakan bahwa pada pasal 62 ayat (2) mewajibkan Pemerintah pusat maupun tingkat Provinsi atau kabupaten/kota untuk menyebarluaskan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat. Pada ayat (3) menyebutkan bahwa Sistem Informasi Lingkungan Hidup paling sedikit memuat informasi mengenai Status Lingkungan Hidup, Peta Rawan Lingkungan Hidup dan Informasi Lingkungan Hidup.

Penulisan dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan uraian secara jelas mengenai data dan informasi berdasarkan isu prioritas lingkungan melalui konsultasi publik penjaringan isu prioritas lingkungan dan analisis data sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumber daya alam, dan perbaikan tata kelola lingkungan sehingga dapat menjadi alat yang berguna dalam menilai, menentukan prioritas masalah, membuat rekomendasi bagi penyusun kebijakan dan perencanaan untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan di masa mendatang.

Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2023 merupakan sarana penyediaan data dan informasi lingkungan di Kabupaten Aceh Timur.

Laporan ini disusun berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor. SE.4/SETJEN/DATIN/DTN.0/4/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Penyampaian Pedoman DIKPLHD Tahun 2023.

Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh Tim Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) yang telah mendukung penyusunan Dokumen ini. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat luas.

Idi, Juli 2023

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

Ir. MAHYUDDIN, M.Si

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ISU PRIORITAS DAERAH.....	i
PAKTA INTEGRITAS.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR Gambar	vii
DAFTAR Tabel	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Profil Daerah dan Ekologisnya	4
1.3 Proses Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur dan Perumusan Isu Prioritas	9
1.4 Maksud dan Tujuan	11
1.4.1 Maksud	11
1.4.2 Tujuan	12
1.5 Ruang Lingkup Penulisan	13
BAB II ANALISIS DRIVING FORCE,PRESSURE, STATE, IMPACT RESPONSE ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	17
2.1 Tataguna Lahan	17
2.1.1 Tekanan Terhadap Tataguna Lahan	18
2.1.2 Kondisi Status Tataguna Lahan	23
2.1.3 Respon	29
2.2 Kualitas Air.....	31
2.2.1 Tekanan Terhadap Perubahan Kualitas Air.....	34
2.2.2 Kondisi Sungai	40
2.2.3 Kondisi Danau / Waduk / Situ / Embung.....	41
2.2.4 Kualitas Udara	43
2.2.5 Resiko Bencana.....	49
2.2.6 Perkotaan	53
BAB III ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	60
3.1 Isu Lingkungan Yang Terjadi di Kabupaten Aceh Timur.....	60
3.2 Proses Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur.....	63
3.3 Penetapan Isu prioritas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur.....	64
3.4 Deskripsi isu prioritas lingkungan hidup Kabupaten Aceh Timur.....	64
3.5 Indek kualitas lingkungan hidup	73

BAB IV INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	80
4.1. Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Timur di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	80
4.2. Inisiatif Kepala Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	84
4.2.1 Kelembagaan	84
4.2.2 Peningkatan Kapasitas Personil	86
4.2.3 Anggaran Kegiatan OPD Bidang Lingkungan Hidup.....	88
4.2.4 Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup yang Diraih Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020	89
4.2.5 Prioritas Program dan Kegiatan di Bidang Lingkungan	90
BAB V PENUTUP	92
5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran Tindak Lanjut.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	LA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 .1 Peta Administrasi Kabupaten Aceh Timur	5
Gambar 1 .2 Peta Geologi Kabupaten Aceh Timur	7
Gambar 2 .1 Persentase Pengguna Lahan Utama Pada Kabupaten Aceh Timur	19
Gambar 2 .3 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Aceh Timur	24
Gambar 2 .4 Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW	26
Gambar 2 .5 Kondisi Sungai Di kabupaten Aceh Timur	37
Gambar 2 .6 Luas dan Volume Embung	44
Gambar 2 .7 Bencana Banjir, Korban dan Kerugian	53
Gambar 2 .8 Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah Per Hari	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Luas Area dan Produksi Perambangan Menurut Jenis Bahan Galian	22
Tabel 2.2. Inventarisasi sungai berdasarkan panjang dan debit sungai Perkecamatan di kabupaten aceh timur	43
Tabel 2.3. Kualitas Udara Ambien di Kabupaten Aceh Timur	48
Tabel 2.4. Jumlah Rumah Tangga Miskin Di Aceh Timur	60
Tabel 3.1. Indikarot dan parameter IKLH	75
Tabel 3.2. Perhitungan Indek Pencemaran Air	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (*The United Nations Conference on Environment and Development/UNCED*) di Rio de Janeiro, tahun 1992, telah menghasilkan strategi pengelolaan lingkungan hidup yang dituangkan ke dalam Agenda 21. Dalam Agenda 21 Bab 40, menjelaskan perlunya kemampuan pemerintahan dalam mengumpulkan dan memanfaatkan data dan informasi multisektoral pada proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut menuntut ketersediaan data, keakuratan analisis, dan penyajian informasi lingkungan hidup yang informatif. Pada pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pada bidang lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain menyatakan bahwa sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Lingkungan hidup termasuk kedalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan

dengan Pelayanan Dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah: Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota; Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau; Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian urusan pemerintah daerah Bidang Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 lampiran yang terbagi atas sebelas sub bidang, yaitu: Perencanaan Lingkungan Hidup; Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Keanekaragaman Hayati (Kehati); Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Pengaduan Lingkungan Hidup; dan Persampahan.

Pelaporan status lingkungan hidup sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup dapat menjadi alat yang berguna dalam menilai, menentukan prioritas masalah, membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan. Berkaitan dengan akses informasi kepada

publik, telah ditetapkan Undang- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebagai Badan Publik pemerintah wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Berdasarkan UU KIP tersebut informasi dikategorisasikan menjadi informasi tersedia setiap saat, berkala, serta merta dan informasi yang dikecualikan. Pelaporan status lingkungan hidup merupakan informasi yang disediakan secara berkala. Informasi tersebut disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau, dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Pada tahun 2002 pemerintah mulai menerbitkan laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI). Bersamaan dengan itu pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia menerbitkan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD). Penyediaan data dan informasi lingkungan hidup di daerah diawali pada tahun 1982 melalui penerbitan Neraca Lingkungan Hidup (NLH). Kemudian pada tahun 1986 diubah menjadi Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Daerah (NKLD). Selanjutnya pada tahun 1994 berubah menjadi Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (NKLD). Penyusunan laporan SLHD yang dilakukan sejak 2002 didasarkan pada surat Menteri Lingkungan Hidup kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dengan mengacu kepada Pedoman Umum Penyusunan SLHD yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Seiring perkembangan waktu dan perkembangan kebijakan pemerintah, pada tahun 2018 Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) merupakan syarat dan indikator untuk penilaian kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) terkait kebijakan dan kinerjanya dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup didaerahnya, penghargaan tersebut dinamakan Piala Bergilir Nirwasita Tantra yang diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia setiap tahunnya pada peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) di Indonesia. Terkait dengan kesesuaian terhadap penghargaan dan dokumen yang menjadi syarat dan

indikator untuk penghargaan tersebut, maka penghargaan Piala Bergilir Nirwasita Tantra Tahun 2018 ini, maka berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE. 4/SETJEN/DATIN/DTN.0/4/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Penyampaian Pedoman DIKPLHD 2023, maka dilakukan penyusunan oleh daerah dan menjadi syarat dan indikator penilaian untuk seleksi Penghargaan Nirwasita Tantra 2023 bagi kepala daerah.

Keterkaitan dengan hal tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melakukan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2023 yang akan menjadi informasi kinerja Bupati Aceh Timur dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup di masa mendatang.

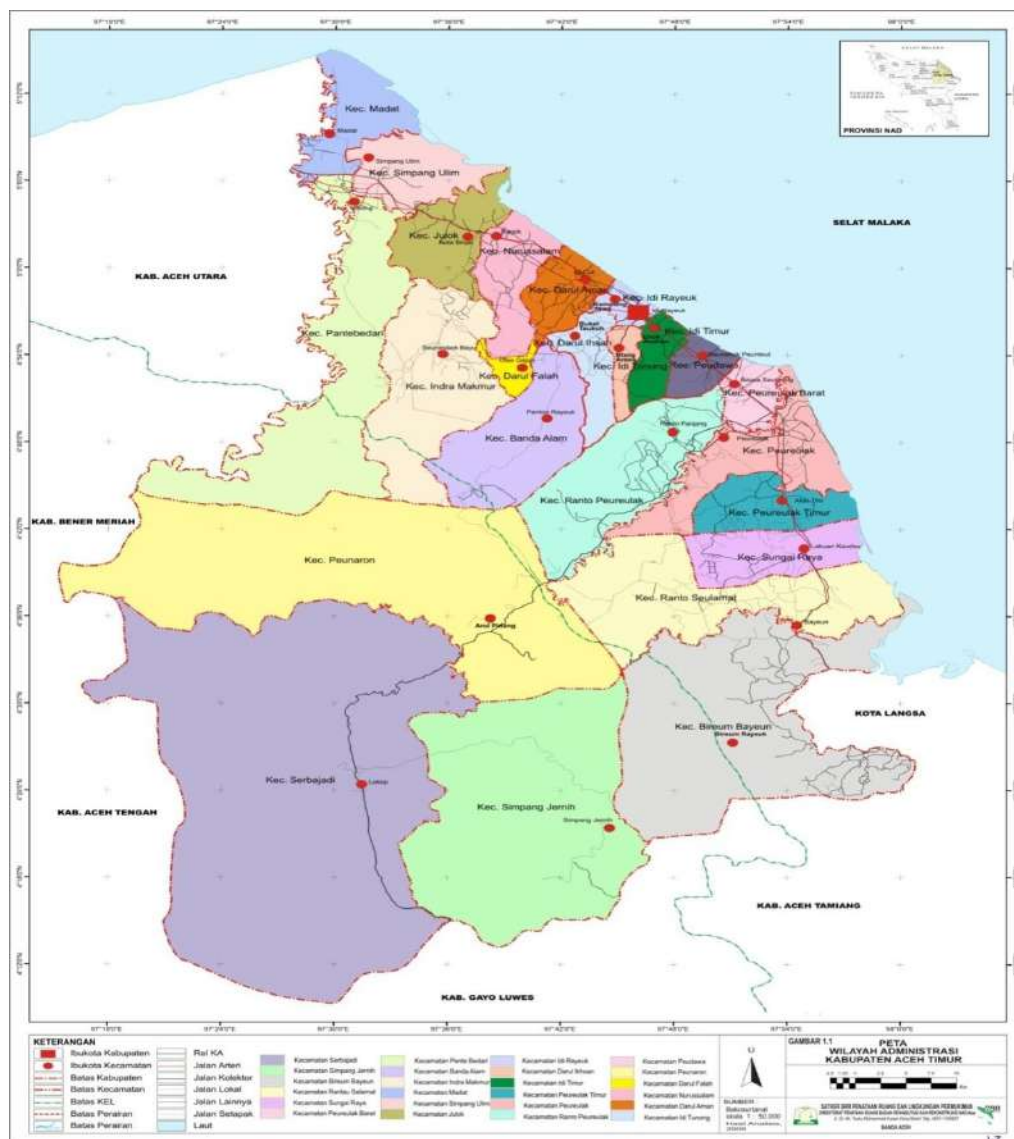
1.2. PROFIL DAERAH DAN EKOLOGISNYA

Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki letak yang strategis sebagai penghubung antara ibukota Pemerintah Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Aceh Timur berada pada koordinat 4°09'21,08" – 5°06'02,16" Lintang Utara dan 97°15'22,07" – 97°34'47,22" Bujur Timur. Kabupaten Aceh Timur sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara dan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tamiang dan Kota Langsa, di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang dan di sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Kabupaten Aceh Timur di bagian barat-selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tengah. Perbatasan wilayah ini secara fisik merupakan kawasan Gunung Leuser, sehingga tidak dapat digunakan sebagai kawasan budidaya sepenuhnya tetapi digunakan sebagai kawasan budidaya terbatas.

Kabupaten Aceh Timur terletak di bagian timur Provinsi Aceh memiliki akses yang dekat ke Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menguntungkan bagi perkembangan wilayah ini karena berdasarkan letak geografis Kabupaten Aceh Timur berbatasan langsung dengan Selat Malaka, sehingga memiliki akses langsung ke negara lain terutama Malaysia.

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Aceh Timur



Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Timur, 2012

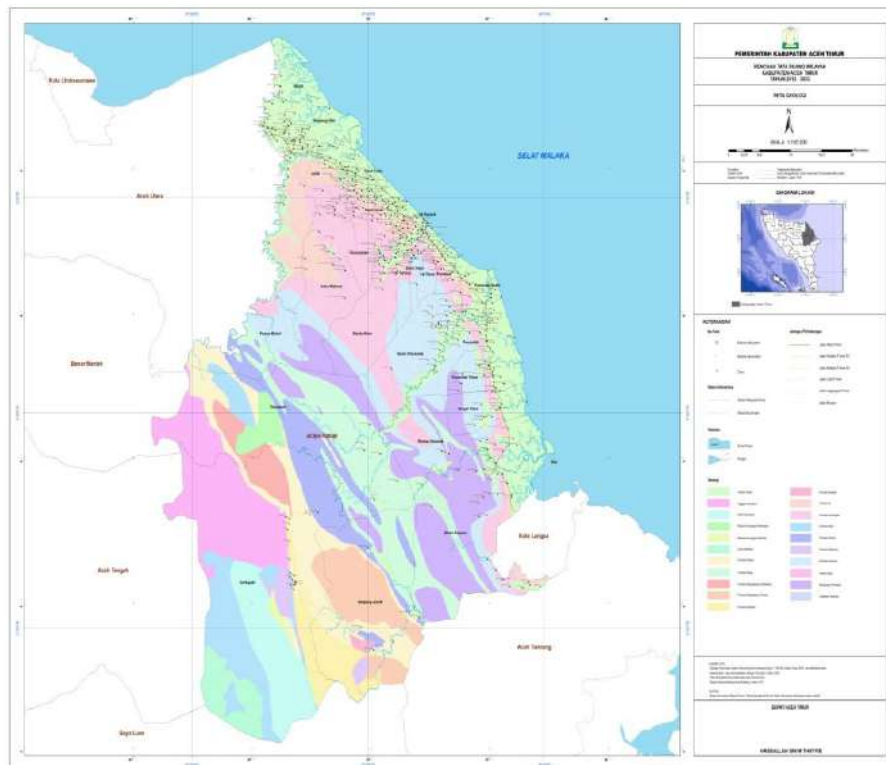
Berdasarkan kondisi fisiknya, Kabupaten Aceh Timur merupakan daerah berbukit, dengan ketinggian wilayah yang cukup beragam berkisar antara 0 sampai dengan 308 m dari permukaan laut dan kemiringan antara 1 sampai dengan 5 derajat. Kondisi geologi Kabupaten Aceh Timur terdiri dari beberapa jenis batuan yang sebagian besar terdiri dari batuan sedimen dengan lapisan *horizontal*, yang luasnya 490.882Ha dan tersebar merata di beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Timur. Jenis batuan yang ada di Kabupaten Aceh Timur terdiri atas antara lain :

1. Batuan endapan baru dan endapan jaman *quarter* seluas 241.263Ha yang penyebarannya hampir di semua kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, kecuali di Kecamatan Serbajadi dan Kecamatan Ranto Peureulak.
2. Batuan resen seluas 3.264Ha hanya terdapat di Kecamatan Serbajadi.
3. Batuan vulkanik tersier dan quarter serta batuan beku dalam seluas 22.080 Ha terdapat di Kecamatan Serbajadi.
4. Batuan sedimen terlipat seluas 63.580 Ha terdapat di Kecamatan Serbajadi.

Secara umum Kabupaten Aceh Timur merupakan dataran rendah, perbukitan, sebagian berawa-rawa dan hutan mangrove dengan ketinggian berada 0 – 308 m diatas permukaan laut. Topografi Kabupaten Aceh Timur dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Datar (2-8%), luas daerah ini 48,15% dari luas Kabupaten Aceh Timur.
2. Landai (8-15%), luas daerah ini 16,01% dari luas Kabupaten Aceh Timur.
3. Bergelombang (15-25%), luas daerah ini 12,00% dari luas Kabupaten Aceh Timur.
4. Berbukit (25-40%), luas daerah ini 13,07% dari luas Kabupaten Aceh Timur.
5. Bergunung (>40%), luas daerah ini 10,75% dari luas Kabupaten Aceh Timur.

Gambar 1.2
Peta Geologi Kabupaten Aceh Timur



Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Timur, 2012

Di Kabupaten Aceh Timur terdapat 5 (lima) jenis tanah yang struktur kimianya berbeda-beda. Jenis tanah *alluvial/organosol* dan *gley* humus terdapat pada bagian wilayah yang relatif rendah (datar) dan merupakan jenis tanah yang dominan, dengan luas 266.656 Ha. Jenis-jenis tanah di Kabupaten Aceh Timur adalah sebagai berikut :

1. Podsolik Merah Kuning

Jenis tanah ini terbentuk pada tipe iklim basah dengan curah hujan 2.500-3.500mm/tahun, terletak pada topografi bergelombang dan berbukit pada elevasi 10-100m dpl, solumnya agak tebal (1-2m) dengan warna merah hingga kuning. Reaksi tanah sangat masam (pH = 3,4-5,0) dan sangat peka terhadap erosi, mempunyai tingkat kesuburan rendah. Jenis tanah ini relatif luas dan terdapat hampir di semua kecamatan.

2. Mediteran

Tanah ini terbentuk pada iklim dengan curah hujan 800-2.500mm/tahun. Tersebar pada elevasi 0-400m dpl. Solumnya agak tebal (1-2 m), erosi sedang hingga besar. Jenis tanah ini cocok untuk persawahan, rerumputan, tegalan dan kebun buah-buahan.

3. Organosol/Alluvial

Terbentuknya tanah ini tidak dipengaruhi iklim. Terletak pada topografi datar sampai sedikit bergelombang di dataran rendah. Warna tanah kelabu tua atau hitam. Reaksi tanah sangat masam ($\text{pH} = 3,5-5$). Cocok untuk persawahan, ladang, tambak, palawija dan kebun kelapa. Jenis tanah ini tersebar di semua kecamatan.

4. Latosol

Tanah ini terletak pada iklim basah dengan curah hujan 2.000-7.000mm/tahun, dengan bulan kering kurang dari 3 bulan. Terletak pada topografi bergelombang. Solumnya dalam (1,5 - 10m) dengan warna merah coklat hingga kuning. Reaksi tanah masam sampai agak masam ($\text{pH} = 4,5-6,5$) dan kepekaan terhadap erosi kecil. Jenis tanah ini cocok untuk persawahan, tanaman palawija, sayur-mayur dan buah-buahan, kebun karet, lada dan tegalan. Tersebar di Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Rantau Selamat, Kecamatan Ranto Peureulak, Kecamatan Birem Bayeundan Kecamatan Serbajadi.

5. Podsolik Coklat Kelabu

Tanah ini berkembang pada iklim dengan curah hujan di atas 1.500mm/thn. Tersebar pada topografi datar, bergelombang, landai dan berbukit pada elevasi 10 - 2.000m dpl, berwarna kelabu, kehitaman, coklat tua hingga kekuningan. Reaksi tanah masam hingga netral ($\text{pH} = 5,0-7,0$). Jenis tanah ini tersebar di Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Rantau Selamat, Kecamatan Ranto Peureulak, Kecamatan Birem Bayeun, dan Kecamatan Serbajadi.

Sebagai penunjang kegiatan perekonomian di Kabupaten Aceh Timur tersedia 1 Pelabuhan Industri yaitu Pelabuhan Idi. Kabupaten ini terdapat tiga jalan yaitu jalan Negara, Jalan Provinsi dan jalan Kabupaten. Panjang jalan provinsi adalah 89Km, panjang jalan negara 102Km dan panjang jalan kabupaten 1.100Km. Untuk industri tersedia 6 kawasan industri, yaitu:

1. Kawasan Industri UMKM Pisang Sale.
2. Kawasan Industri Kelapa Terpadu.
3. Kawasan Industri Pengolahan Rotan.
4. Kawasan Industri Agro dan Perikanan.
5. Kawasan Industri Kelapa Terpadu Timur (KITAT).
6. Kawasan Industri Migas Pertambangan dan Energi yang di dukung dengan fasilitas listrik dan telekomunikasi.

1.3. PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TIMUR DAN PERUMUSAN ISU PRIORITAS

Proses penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022 untuk dilakukan penilaian oleh Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2022 melalui beberapa proses antara lain :

- Pada tahun 2022 dilakukan pembentukan Tim Pengumpulan Data yang anggotanya adalah *stakeholder* terkait antara lain : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Timur, dan Kantor Pengelolaan Hutan Wilayah III Aceh;

- Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022. Tim Penyusun beranggotakan 3 (tiga) orang staf teknis Dinas Lingkungan Hidup,
- Pengumpulan data primer berupa analisa laboratorium untuk kualitas air sungai, kualitas udara ambient yang dilakukan selama tahun 2022;
- Pengumpulan data sekunder dari *stakeholder* terkait tersebut dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan April 2022;
- Penyusunan data primer dan sekunder yang dituangkan kedalam 61 tabel utama;
- Konsultasi Publik Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup melalui penyaringan isu lingkungan yang berkembang dan dominan terjadi di masyarakat yang akan dituangkan dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022;
- Penetapan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Tahun 2022 oleh Bupati Aceh Timur, yang ditetapkan melalui surat pernyataan dan ditandatangani oleh Bupati Aceh Timur;
- Pengintegrasian isu prioritas lingkungan hidup kedalam analisis *Pressure, state* dan *response* berdasarkan isu lingkungan tataguna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana dan perkotaan, memuat inisiatif yang dilakukan oleh kepala daerah dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meminimalisir isu prioritas lingkungan dalam bentuk tindak lanjut program kegiatan dan kebijakan yang akan dimuat dalam Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022;
- Penyampaian Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Aceh, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera dan Pusat Data Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Perumusan isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Timur melalui mediasi grup WA terhadap kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Timur dan dituangkan dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022 (DIKPLHD). Adapun kriteria yang dapat dijadikan isu prioritas adalah : kerusakan sumber daya alam; kerusakan keanekaragaman hayati; pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup; dan mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen).

Hasil Kesepakatan Bersama dengan OPD/SKPK Terkait, maka perumusan isu prioritas lingkungan hidup pada Kabupaten Aceh Timur diperoleh 3 (Tiga) isu prioritas lingkungan hidup sebagai berikut :

1. Pengendalian Banjir
2. Pengelolaan Sanitasi
3. Pengendalian Pencemaran Air dan Udara

Isu prioritas lingkungan hidup tersebut akan ditetapkan oleh Bupati Aceh Timur dan akan menjadi prioritas penanganan dalam program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kedepannya. Secara rinci proses perumusan isu prioritas lingkungan hidup akan dijelaskan pada Bab II dokumen ini

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022 mempunyai maksud adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan isu prioritas, status kualitas lingkungan hidup dan kecenderungan perubahan yang terjadi terhadap kondisi lingkungan di Kabupaten Aceh Timur;

- b. Merumuskan sumber dan bentuk tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup serta kecenderungan sumber dan tekanan;
- c. Merumuskan bentuk upaya pengelolaan lingkungan serta peningkatan upaya yang dilakukan guna perbaikan lingkungan hidup dan pengurangan beban tekanan dari sumber pencemaran/kerusakan lingkungan;
- d. Menganalisis kebijakan dan merumuskan rekomendasi kebijakan daerah guna agenda pengelolaan lingkungan hidup kedepannya;

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022 ini adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman *stakeholder* terhadap kecenderungan dan kondisi lingkungan hidup;
- b. Menyediakan informasi tentang kondisi lingkungan hidup saat ini, prospeknya di masa mendatang yang akurat, berkala, dan terjangkau bagi publik, pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta pengambil keputusan;
- c. Menyediakan data dasar bagi pengambilan kebijakan pada semua tingkat untuk memperbaiki kualitas lingkungan;
- d. Memberikan gambaran kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup didaerahnya;
- e. Melaporkan keefektifan kebijakan dan program yang dirancang untuk menjawab perubahan lingkungan hidup, termasuk kemajuan dalam mencapai standar dan target lingkungan hidup;
- f. Sarana evaluasi kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pengambil kebijakan di daerah.

1.5. RUANG LINGKUP PENULISAN

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022 ini meliputi pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dokumentasi kebijakan, perumusan isu prioritas lingkungan daerah dan penyajian informasi dengan model D-P-S-I-R (*Driving Force-Pressure-State-Impact-Response*), serta inovasi daerah yang dikembangkan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adapun ruang lingkup dokumen ini meliputi :

1. Status lingkungan hidup yang berdasarkan media air, udara, lahan, dan keanekaragaman hayati;
2. Beban pencemaran dan laju/tingkat kerusakan serta indeks kualitas lingkungan meliputi indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks tutupan lahan;
3. Kelembagaan, kebijakan, program, dan kegiatan serta inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup;
4. Data pendukung (demografi sosial ekonomi dan pendapatan domestik bruto);
5. Data terkait potensi resiko bencana dan informasi bencana alam;
6. Dokumentasi kebijakan daerah berupa beberapa kebijakan yang dilakukan oleh daerah baik secara kelembagaan, anggaran, program dan kegiatan terkait pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
7. Hasil perumusan isu prioritas daerah melalui konsultasi publik dengan kriteria isu prioritas berupa (a) kerusakan sumber daya alam; kerusakan keanekaragaman hayati; (b) pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup; dan (c) mendapat perhatian public yang luas dan perlu ditangani segera (urgen);
8. Analisis *Driving Force-Pressure-State-Impact-Response* (D-P-S-I-R) isu lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Timur yang meliputi :

- a. Tataguna lahan, tataguna lahan berikut tutupan lahannya, tataguna lahan berikut perubahannya seperti luas penggunaan lahan berdasarkan tata ruang wilayah, luas wilayah yang digunakan untuk usaha pemanfaatan hutan, perkebunan, pertambangan, pariwisata, dan lain sebagainya.

Data yang berkaitan dengan perizinan penggunaan atau pemanfaatan lahan sesuai dengan skala ekonominya (besar, menengah, dan kecil) termasuk status perizinannya (nama lengkap pemegang izin, luasan dan lokasi perizinannya), data berbentuk spasial (peta) untuk mendukung. Analisis *pressure, state* dan *response* juga didukung dengan data berkala (*time series*). Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. *Response* telah dilakukan oleh daerah dengan didukung oleh data. Dan data-data lain yang dapat digunakan untuk mendukung analisis PSR.

- b. Kualitas air.

Data meliputi kualitas air sungai, air danau/embung, dan air tanah. Response mendorong penataan kegiatan dan/atau usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan melalui pengawasan dan penegakan hukum. Data kualitas dan kuantitas air Daerah Aliran Sungai (DAS), jumlah penduduk yang tergantung dengan DAS, jumlah industri dan non industri pencemar (sumber pencemar) serta instalasi pengelolaan limbahnya, penggunaan air tanah, pipanisasi dan layanan air bersih, perizinan dan status kawasan pemanfaatan air, sungai, limbah domestik, irigasi, bahan pencemar dan data tambahan yang menunjang analisis.

- c. Kualitas udara

Kualitas udara meliputi status mutu udara ambien, kebakaran hutan dan lahan, Infeksi Saluran Nafas Akut (ISPA), sumber pencemar

(bergerak dan tidak bergerak), konsumsi bahan Bakar Minyak (BBM), serta bahan pencemar. *Response* berupa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan tersebut dalam bentuk kebijakan dan program.

d. Resiko bencana

Berupa informasi rawan bencana atau kekhususan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana alam (seperti gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuh, banjir, longsor), bencana non alam (epidemi, dan wabah penyakit), dan bencana social (seperti konflik sosial). *Pressure* berupa persoalan yang memicu terjadi bencana misalnya perubahan penggunaan lahan (*land use*), penyempitan badan sungai, kondisi drainase atau data lainnya yang menunjang. *Response* adalah peraturan dan program berikut dengan pelaksanaan dari peraturan dan program tersebut. Informasi peta rawan lingkungan diperlukan untuk analisis dan data tambahan yang menunjang analisis.

e. Perkotaan, perkembangan kota berupa perkembangan penduduk maupun kegiatan masyarakat perkotaan kecenderungannya menimbulkan persoalan yang menyangkut persoalan lingkungan (fasilitas, sistem dan area). Kemunduran lingkungan perkotaan yang indikasinya dilihat dari aspek fisik (pencemaran air, udara, kerusakan lahan, dan timbulan sampah) dan aspek sosial ekonomi (dampak dari manusia yang membuat kehidupan kurang nyaman). Data aspek fisik dan aspek sosial ekonomi yang merupakan kondisi eksis yang mutlak dituangkan dalam analisis. *Pressure* dalam perkotaan yang didukung dengan data, dan *response*-nya berupa kebijakan dan program yang dikembangkan.

9. Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, berupa inisiatif yang dilakukan oleh bupati dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Inisiatif dilakukan dalam bentuk peningkatan kapasitas lembaga daerah (seperti melalui APBK, peningkatan kapasitas personil, pengembangan jejaring kerja, peningkatan transparansi dan akuntabilitas kepada publik) dan inisiatif yang dikembangkan oleh masyarakat. Inisiatif meliputi kegiatan atau program yang terkait dengan isu-isu perubahan iklim, perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumberdaya alam, dan perbaikan tata kelola lingkungan.

BAB II

ANALISIS DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT, RESPONSE ISU LINGKUNGAN HIDUP

2.1. TATAGUNA LAHAN

Tataguna lahan (*land use*) adalah suatu upaya dalam merencanakan penggunaan lahan dalam suatu kawasan yang meliputi pembagian wilayah untuk pengkhususan fungsi-fungsi tertentu, misalnya pemukiman, perdagangan, industri dan lain-lain. Rencana tataguna lahan merupakan kerangka kerja yang menetapkan keputusan-keputusan terkait tentang lokasi, kapasitas dan jadwal pembuatan jalan, saluran air bersih dan air limbah, gedung sekolah, pusat kesehatan, taman dan pusat-pusat pelayanan serta fasilitas umum lainnya. Tataguna lahan merupakan salah satu faktor penentu utama dalam pengelolaan lingkungan.

Pengertian lahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat. Hamparan ekosistem daratan tersebut berkaitan dengan daya dukungnya terhadap kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia. Sedangkan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Analisa yang digunakan untuk menguraikan permasalahan tataguna lahan pada Kabupaten Aceh Timur dikelompokkan pada *Driving Force-Pressure-State-Impact-Response* (D-P-S-I-R). Untuk tekanan terkait tataguna lahan diantaranya :

- Luas wilayah menurut penggunaan lahan utama;
- Luas perubahan penggunaan lahan;
- Jenis pemanfaatan lahan;
- Luas areal dan produksi pertambangan menurut jenis bahan galian

Sedangkan terkait status tataguna lahan digambarkan pada uraian terkait diantaranya :

- Luas kawasan lindung berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- Luas hutan berdasarkan fungsi dan status;
- Luas lahan kritis di dalam dan luar kawasan hutan;
- Evaluasi kerusakan tanah di lahan kering akibat erosi air
- Evaluasi kerusakan tanah di lahan kering;
- Evaluasi kerusakan tanah di lahan basah

Terkait upaya atau respon yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terkait pengendalian perusakan lingkungan hidup tersebut digambarkan melalui upaya pencegahan kerusakan lingkungan, upaya penanggulangan kerusakan lingkungan, dan upaya pemulihan kerusakan lingkungan yang diantaranya berupa upaya realisasi penghijauan dan reboisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

Pendekatan analisis D-P-S-I-R yang dilakukan dengan menggambarkan uraian sebagai berikut :

- Gambaran umum kondisi dan kedalaman (*magnitudo*);
- Perbandingan antar waktu, antar lokasi, dan perbandingan terhadap baku mutu;
- Analisa statistik sederhana.

2.1.1.1. TEKANAN TERHADAP TATAGUNA LAHAN

Tekanan (*pressure*) yang menjadi penyebab berubahnya kondisi tataguna lahan di Kabupaten Aceh Timur sebagian besar disebabkan oleh perubahan lahan dari tutupan alaminya menjadi penggunaan budi daya bahkan menjadi lahan kritis diantaranya:

a. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama;

Penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Timur digunakan pada sektor non pertanian, sawah, lahan kering, perkebunan, hutan dan badan

air. Berdasarkan data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur. Penggunaan lahan utama yang paling dominan adalah untuk perkebunan dengan luas 82.858 Ha, kemudian hutan dengan luas 69.757 Ha, lahan kering dengan luas 201.807Ha, non pertanian dengan luas 206.532 Ha, lahan sawah 39.453 Ha, dan badan air dengan luas 22.726 Ha. Secara persentase lahan tertinggi lahan non pertanian 34% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Aceh Timur, dan penggunaan lahan terendah adalah badan air yakni mencapai 4 % dari luas wilayah Kabupaten Aceh Timur.

Gambar 2.1.1.
Persentase Penggunaan Lahan Utama pada Kabupaten Aceh Timur

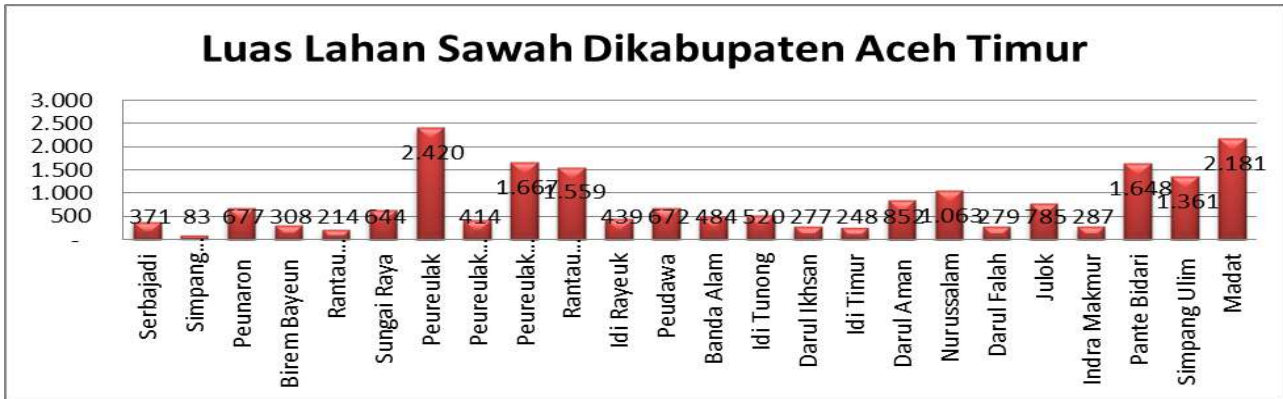


Sumber: Olah Tabel-2 Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021

Dari sisi pertanian, berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Aceh Timur tahun 2019, ternyata pada tahun 2021 terjadi peningkatan luasan lahan pertanian sawah baik irigasi maupun non irigasi pada Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu wilayah rencana pengembangan pertanian lumbung padi nasional, sebab pada Kabupaten Aceh Timur terdapat bendungan sungai yang

direncanakan dapat memenuhi kebutuhan sawah untuk lebih dari 19.453 ribu hektar sawah pada Kabupaten Aceh Timur.

Gambar 2.1.2.
Luas Sawah pada Kabupaten Aceh Timur



Sumber: Olah Tabel-2 Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Aceh Timur 2021

b. Luas Perubahan Penggunaan Lahan

Pada Tabel 2 Lampiran Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021, menjelaskan gabungan data dari WWF Indonesia (2021), Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur melalui Aceh Timur Dalam Angka (2022), dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur (2022) tentang gambaran perubahan penggunaan lahan di kabupaten Aceh Timur. Sama seperti yang diuraikan sebelumnya, ternyata luasan lahan perkebunan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni diperkirakan hal ini bukan disebabkan oleh berkurangnya antusiasme masyarakat pada komoditi karet dan kelapa sawit tetapi disebabkan beberapa perusahaan perkebunan besar dan masyarakat sedang dalam tahap replanting atau peremajaan kembali perkebunannya. Sedangkan untuk penggunaan lahan lainnya seperti sawah, hutan, dan pertanian lahan kering relatif stabil tidak mengalami perubahan yang signifikan.

c. Jenis Pemanfaatan Lahan

Gambaran tentang pemanfaatan lahan akan diuraikan adalah pemanfaatan lahan skala usaha (Tabel 2 Lampiran Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur Tahun 2023). Data yang berhasil dihimpun hanya data yang berasal dari Izin Pertambangan dan Izin Perkebunan skala usaha dan/atau kegiatan.

d. Luas areal dan produksi pertambangan menurut jenis bahan galian

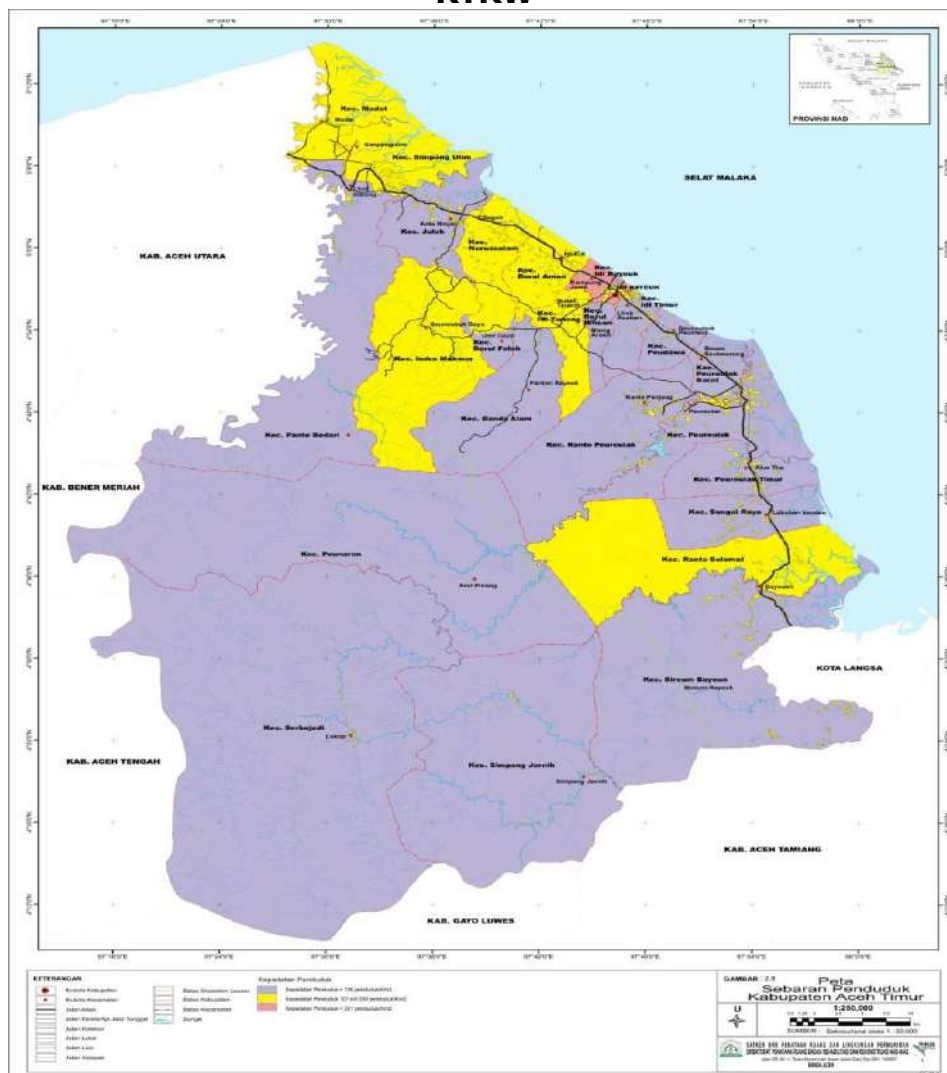
Untuk kegiatan pertambangan dimana pada akhir tahun 2022 ini Dinas Pertambangan Kabupaten Aceh Timur dilakukan perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disebabkan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Pertambangan berdasarkan Undang-Undang 24 Tahun 2014 tidak lagi menjadi TUPOKSI kabupaten/kota sehingga dilakukan rasionalisasi OPD. Untuk itu data Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian berdasarkan data pada Dokumen Lingkungan Kegiatan dan Data pada Laporan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan dan/atau Usaha.

Pertambangan dan penggalian merupakan salah satu sektor penting bagi perekonomian Kabupaten Aceh Timur, karena di dalamnya tergabung beberapa produk bahan tambang strategis, seperti; pertambangan minyak, penggalian pasir, serta penggalian bahan galian C lainnya. Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi bahan tambang yang cukup beragam, tetapi terdapat beberapa bahan tambang yang belum di ketahui besaran kandungannya yaitu seperti Minyak dan Gas Bumi, Tembaga, Timah Hitam, dan Seng. Sedangkan bahan tambang yang sudah memiliki data sebagian besar berupa mineral non logam.

Kegiatan eksplorasi terhadap mineral-mineral ekonomis ini belum dilakukan secara baik dan detail sehingga pengelolaan sumber daya mineral ini belum sepenuhnya dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. Pengelolaan sumberdaya mineral ini dapat dilakukan guna

mendukung pembangunan daerah kawasan Kabupaten Aceh Timur. Kegiatan penambangan yang saat ini terus berkembang adalah Galian Golongan C . Kegiatan pertambangan Minyak dan Gas yang masih aktif beroperasi sekarang di Kabupaten Aceh Timur adalah: PT. Medco E&P Malaka, KRX dan PT. Trianggle Pase INC.

Gambar 2.1.3.
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Aceh Timur Berdasarkan RTRW



2.1.2. KONDISI STATUS TATAGUNA LAHAN

Terkait kondisi/status tataguna lahan pada Kabupaten Aceh Timur digambarkan pada uraian terkait diantaranya:

- Luas kawasan lindung berdasarkan RTRW;

- Luas hutan berdasarkan fungsi dan status;
- Luas lahan kritis di dalam dan luar kawasan hutan;
- Evaluasi kerusakan tanah di lahan kering akibat erosi air
- Evaluasi kerusakan tanah di lahan kering;
- Evaluasi kerusakan tanah di lahan basah

Dari kondisi-kondisi tersebut diatas dapat terlihat gambaran kualitas tataguna lahan dan kualitas kerusakan lahan pada Kabupaten Aceh Timur sebagai berikut.

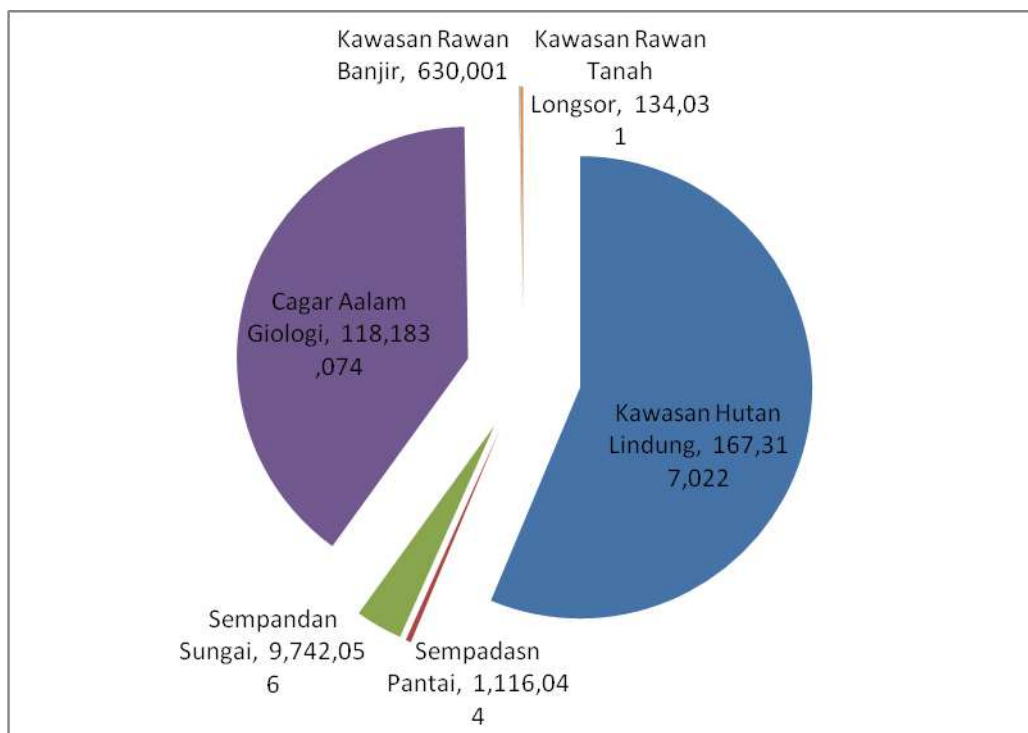
a. Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RT/RW

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011- 2031 kawasan lindung pada Kabupaten Aceh Timur terdiri atas, kawasan hutan lindung, kawasan sempadan sungai, kawasan suaka alam, cagar alam, taman nasional, cagar budaya, dan kawasan plasma nutfah dengan luasan mencapai 26.902,71 Ha, dengan luas wilayah Kabupaten Aceh Timur mencapai 301.116 Ha. Dari gambaran tersebut bahwa persentase luasan kawasan lindung mencapai 8,93% dari luas wilayah Kabupaten Aceh Timur. Kawasan lindung ini terdiri dari:

1. Kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air.;
2. Kawasan perlindungan setempat yang terdiri dari sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau dan ruang terbuka hijau;
3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya terdiri dari kawasan suaka ala, kawasan suaka laut, kawasan suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

4. Kawasan rawan bencana terdiri dari kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir.
5. Kawasan lindung geologi terdiri dari kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;
6. Kawasan lindung lainnya seperti Ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma nutfah dan lain sebagainya. Berikut ini gambaran pembagian kawasan lindung berdasarkan RTRW Kabupaten Aceh Timur 2011-2031 sebagai berikut.

**Gambar 2.1.4.
Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW**



Sumber: Olah Tabel-1 Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Aceh Timur 2020

Diluar dari kawasan lindung tersebut adalah kawasan budi daya mencapai 89,193,330 Ha dan sisanya adalah hutan produksi yang terdiri dari hutan produksi terbatas, hutan produksi, dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Gambaran kawasan hutan tersebut akan diuraikan pada

sub bab Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status. Berdasarkan fungsi hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 35/Menhut-11/2013 dan berdasarkan status hutan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 – 2031.

Dari pembagian kawasan lindung berdasarkan RTRW tersebut, jika dirincikan untuk kawasan lindung yang telah menjadi areal terbuka dan telah menjadi areal terbangun persentasenya terhadap peruntukan kawasan lindung berdasarkan RTRW adalah sebagai berikut.

b. Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status

Kawasan hutan menurut fungsi di Kabupaten Aceh Timur mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 35/Menhut-11/2013. Dalam Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah peruntukan fungsi kawasan hutan akan mengacu pada regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut. pembagian kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 35/Menhut-11/2013. Dari 92.150Ha kawasan hutan yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan pada Kabupaten Aceh Timur, mayoritas adalah kawasan hutan produksi yang terdiri Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi Konversi (HPK) dimana total luasannya adalah 93.023.26Ha. Kawasan Hutan Lindung 167.317.22 Ha dan Taman Nasional 0.0Ha serta Cagar Alam seluas 3.10.76 Ha.

Sedangkan mengacu pada Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2031 kawasan hutan statusnya terbagi sebagai Hutan Nagara yang merupakan Kawasan Hutan dan Hutan Rakyat yang merupakan hutan yang dikuasai oleh nagari atau adat. Tetapi realitanya walaupun telah memiliki dasar hukum penetapan yang kuat, saat ini sebagian besar masyarakat ulayat atau adat tetap menganggap semua hutan adalah milik adat/ulayat sehingga sebagian besar hutan negara juga ikut tereksploitasi oleh kegiatan ekonomi masyarakat. Permasalahan ini

tidak sepenuhnya merupakan kesalahan masyarakat. Hal ini akibat banyaknya konsesi pada hutan produksi yang dilakukan perusahaan kayu yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti, tebang pilih dan tanam kembali baru melakukan penggarapan pada wilayah konsesi selanjutnya. Kawasan hutan yang menjadi konsesi beberapa perusahaan pengolah hasil hutan melakukan penebangan habis komoditi kayu dan kemudian ditinggalkan tanpa dilakukan reboisasi kembali. Dengan infrastruktur jalan telah terbuka, hutan produksi yang ditinggalkan oleh perusahaan konsesi kayu dilakukan penggarapan oleh masyarakat menjadi lahan perkebunan kelapa sawit atau karet sebab fasilitas infrastruktur jalan telah tersedia. Permasalahan ini akan menimbulkan konflik agraria dengan pemerintah pada kemudian harinya.

c. Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan

Lahan kritis dapat didefinisikan sebagai lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan. Fungsi yang dimaksud pada defenisi tersebut adalah fungsi produksi dan fungsi tata airnya. Fungsi produksi berkaitan dengan fungsi tanah sebagai sumber unsur hara bagi tumbuhan dan fungsi tata air berkaitan dengan fungsi tanah sebagai tempat berjangkarnya akar dan menyimpan air tanah. Beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya lahan kritis diantaranya: terjadinya longsor , penebangan liar, kebakaran hutan, pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak berasaskan kelestarian, penataan zonasi kawasan yang belum berjalan, pola pengelolaan lahan yang tidak konservatif dan pengalihan status lahan.

Informasi gambaran lahan kritis diperoleh dari penelaahan menggunakan pencitraan oleh *World Wide Fund for Nature* (WWF) dan penggambungan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan informasi penyebab lahan kritis adalah dengan

memadukan berbagai informasi kejadian dan kondisi kegiatan yang ada di atasnya.

Adapun beberapa informasi penyebab lahan kritis adalah sebagai berikut :

- Perkebunan, pemukiman dan lahan terbuka bekas tambang batubara
- Perkebunan, pertanian, pemukiman, kebakaran lahan dan lahan terbuka bekas Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
- Perkebunan, pertanian dan pemukiman
- Perkebunan, pertanian, pemukiman dan kebakaran lahan.
- Perkebunan dan kebakaran hutan/lahan
- Pemukiman, pertanian, Perkebunan, Hutan Tanaman Industri dan kebakaran lahan
- Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri

d. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air

Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2009 penyebab kerusakan lahan ialah makin meningkatnya penambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri yang mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian. Secara garis besar, penyebab kerusakan lahan disebabkan oleh 2 hal yaitu; 1) *Natural hazards*, dimana secara instrinsik lahan mempunyai potensi untuk mengalami kerusakan; 2) Manusia, dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang tidak tepat (Baskoro dkk, 2010). Salah satu bentuk kerusakan lahan pertanian yang disebabkan oleh faktor diatas yaitu erosi. Erosi adalah proses berpindahnya/terangkutnya tanah atau bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain (Sinukaban, 1989).

Menurut Arsyad (1989) kerusakan yang ditimbulkan karena erosi terjadi di dua tempat yaitu 1) pada tanah tempat erosi terjadi; 2) pada tempat tujuan akhir tanah yang terangkut tersebut diendapkan. Oleh karena dampak erosi dapat sangat berpengaruh terhadap tingkat

kesuburan tanah maka erosi ini harus dapat dicegah yang bertujuan untuk mengontrol laju erosi supaya berada dalam batas yang dapat ditoleransikan dan melestarikan produktifitas lahan.

Prediksi erosi dari sebidang tanah adalah metode untuk memperkirakan laju erosi yang akan terjadi dari tanah yang dipergunakan dalam penggunaan lahan dan pengelolaan tertentu. Jika laju erosi yang akan terjadi dapat ditetapkan, maka dapat ditentukan kebijaksanaan penggunaan tanah dan tindakan konservasi tanah yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah dan tanah dapat dipergunakan secara produktif dan lestari. Tindakan konservasi tanah dan penggunaan lahan yang diterapkan adalah yang dapat menekan laju erosi agar sama atau lebih kecil dari laju erosi yang masih dapat dibiarkan.

Metode prediksi erosi juga merupakan alat untuk menilai apakah suatu program atau tindakan konservasi tanah telah berhasil mengurangi erosi dari suatu bidang tanah atau suatu daerah aliran sungai (DAS). Prediksi erosi adalah alat bantu untuk mengambil keputusan dalam mengambil perencanaan konservasi tanah pada suatu areal tanah (Arsyad, 1989).

e. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering

Pemanfaatan lahan untuk berbagai keperluan dan aktifitas manusia cepat atau lambat akan menyebabkan kerusakan tanah. Tanah sebagai salah satu komponen lahan, adalah lapisan teratas kerak bumi. Tanah terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta memiliki sifat fisik, kimia dan biologi serta memiliki kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Kegiatan yang perlu dilakukan mengingat aktifitas manusia dengan memanfaatkan tanah sebagai media, yang dilakukan dengan berlebihan dapat menurunkan kualitas dan fungsi tanah serta mengetahui sejauh mana kerusakan itu terjadi dan menentukan upaya perbaikan yang perlu dilaksanakan.

f. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah

Wilayah Kabupaten Aceh Timur memiliki lahan gambut, tetapi tidak ada data.

g. Evaluasi Kerusakan Mangrove di Kabupaten Aceh Timur

Wilayah Kabupaten Aceh Timur sangat baik dan luas untuk lahan Hutan Mangrove tapi belum ada data.

h. Evaluasi Kerusakan Padang Lamun di Kabupaten Aceh Timur

Wilayah Kabupaten Aceh Timur terdapat komponen padang lamun tapi tidak ada data.

i. Evaluasi Kerusakan Padang Lamun di Kabupaten Aceh Timur

Wilayah Kabupaten Aceh Timur memiliki laut, namun tidak ada data yang otentik.

2.1.3. RESPON

Terkait upaya atau respon yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berupa pengendalian kerusakan lingkungan hidup tersebut dilakukan melalui upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup, upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup, dan upaya pemulihan kerusakan lingkungan hidup yang diantaranya berupa upaya realisasi penghijauan dan reboisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

Beberapa upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur antara lain adalah penataan kegiatan dan/atau usaha yang bergerak dibidang pemanfaatan sumber daya alam seperti perkebunan dan pertambangan melalui perizinan lingkungan dan perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup dan penerapan regulasi lingkungan pada kegiatan dan/atau usaha tersebut. Selain penerapan ketentuan pada kegiatan dan/atau usaha, dalam sisi pencegahan kerusakan lingkungan melalui Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan dokumen perencanaan/*masterplan* yang dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur antara lain: dengan melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dari kegiatan/atau usaha, sosialisasi pada masyarakat terkait dampak akibat kerusakan lingkungan hidup, dan penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan lingkungan hidup.

Sedangkan upaya pemulihan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur antara lain: dengan melakukan upaya restorasi, reklamasi, reboisasi dan penghijauan terkait kerusakan lingkungan yang ada. Upaya reklamasi biasanya terkait pada pelaksanaan komitmen dari pelaku pertambangan galian C. Sedangkan upaya reboisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2018 tidak terlaksana disebabkan penarikan wewenang kehutanan dari urusan pemerintah kabupaten. Untuk upaya penghijauan beberapa yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup seperti penanaman Mangrove dan Cemara pada sempadan Sungai Leuge, Pohon Kelapa pada Pantai Kuala Simpang Ulim, Penanaman Cemara dan Ketapang di pantai Kuala Idi Rayeuk, dan beberapa penanaman bibit kayu-kayuan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan perkebunan dan hutan tananam industri pada lokasi lahan peruntukan konservasi diwilayahnya.

2.2. KUALITAS AIR

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk

memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan. Oleh karena itu, untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis.

Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air. Negara mengamanatkan kepada pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, bahwa sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras. Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.

Pencemaran air terjadi pada kegiatan sehari-hari manusia secara tidak sengaja telah menyumbang sejumlah bahan atau komponen berbahaya lain ke dalam perairan, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang mengakibatkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan kuantitas dan kualitas air. Kualitas air merupakan subjek yang sangat kompleks, agar tetap dapat dimanfaatkan air harus dijaga supaya tidak tercemar, karena sifat air yang mudah berubah baik dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya.

Mutu air menunjukkan kondisi kualitas air yang dapat diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melihat tingkat kondisi mutu air apakah menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu, maka dibandingkan dengan baku mutu air yang telah ditetapkan. Pengelolaan kualitas air merupakan upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. Sedangkan pengendalian pencemaran air adalah suatu upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. Dalam rencana pendayagunaan air harus memuat potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, dan atau fungsi ekologis.

Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras. Pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi. Konservasi sumber daya air perlu dilakukan sebagai upaya dalam memelihara

keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Melimpahnya sumber air yang berada di darat maupun di laut, seringkali membuat manusia tidak begitu mempedulikan keberlanjutan dari kesediaan air di alam. Namun, lambat laun, baik kuantitas air dan kualitas air dimanapun semakin menunjukkan keadaan genting dari waktu ke waktu. Bila perlakuan terhadap air tidak diubah, di masa depan air akan menjadi mata konflik yang keras tidak saja antara manusia, tapi juga antara makhluk hidup yang membutuhkan air untuk keberlangsungan regenerasi mereka.

Kualitas sumber air seperti air sungai, air embung, air tanah/sumur masih menjadi permasalahan dan isu prioritas bidang lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Timur. Setiap tahunnya selalu terjadi perubahan kuantitas dan kualitas air, dan hal ini harus menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan dengan kuantitas sumber air dan ketersediaan air bagi kebutuhan hidup masyarakat. Selain itu, ketersediaan kualitas sumber airpun juga tidak memenuhi standar baku mutu untuk parameter fisika, kimia anorganik, kimia organik dan mikrobiologi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan, karena telah tercemar oleh polutan dari berbagai sumber pencemaran.

Pembahasan pada perubahan kondisi kualitas air ini akan dianalisis berdasarkan *Pressure* (tekanan), *State* (kondisi), dan *Response* (respon), dengan menyajikan informasi tekanan apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan kualitas air, mengungkapkan kondisi (kualitas dan kuantitas) sumber-sumber air di daratan termasuk air sungai, air embung, dan air tanah/sumur, dan curah hujan rata-rata bulanan, serta respon berupa tindakan dan kebijakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan pengelolaan kualitas air di Kabupaten Aceh Timur, dengan melakukan perbandingan dengan baku mutu

(standar/kriteria), perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu, serta analisis statistik sederhana menurut frekuensi, maksimum, minimum dan rata-rata hasil pengukuran kualitas udara ambien dan air hujan.

2.2.1. TEKANAN TERHADAP PERUBAHAN KUALITAS AIR

Pressure atau tekanan yang menjadi penyebab terjadinya perubahan kondisi kualitas air yang ada di Kabupaten Aceh Timur diantaranya yaitu:

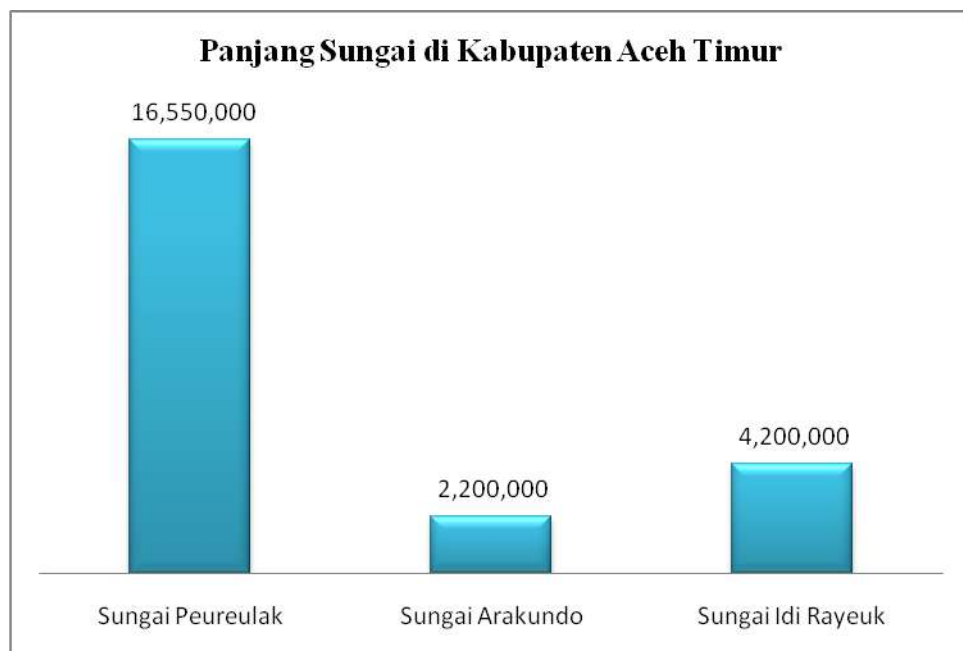
- a) Penurunan kuantitas dan kualitas air dapat terjadi akibat adanya perubahan alih fungsi lahan pada hulu sungai dan berkurangnya daerah tangkapan air. Penggunaan lahan yang berlebihan mengakibatkan kerusakan dan penambahan terlahan baru, seperti adanya pembukaan lahan untuk perkebunan, pemukiman, dan peruntukan lainnya dan lahan terbuka yang menyebabkan terjadinya erosi tanah yang masuk ke badan air, yang memberikan tekanan terhadap kondisi sumber air, seperti perubahan kuantitas (debit air sungai, pendangkalan permukaan air sungai, dll) (*Sumber: Olahan Tabel 29. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022*). Sungai Arakundo Nilai DO Sebesar 7,29 terhadap nilai baku mutu sebesar 4, berarti sugai arakundo terjadi pencemaran air perlu dilakukan pemantauan yang rutin selama satu tahun. Phosphat pada sungai arakundo sebesar 0,751, baku mutu Phosphat sebesar 0,2 Berarti nilai Phosphat telah melebihi dari baku mutu. Perlu dilakukan pengawasan disekitar sungai arakundo, untuk mengendalikan nilai Phosphat.

Sungai Peureulak Nilai DO Sebesar 6,46 terhadap nilai baku mutu sebesar 4, berarti sugai Peureulak terjadi pencemaran air perlu dilakukan pemantauan yang rutin selama satu tahun. Nilai Ecoli sebesar 2419 di atas nilai baku mutu 1000, pada pihak Dinas Kesehatan Aceh Timur Melakukan Sosialisasi Kepada Warga Yang

Tinggal di Seputaran Sungai Peureulak jangan membuang Tinja atau Kotoran Manusia kedalam badan sungai.

Sungai Bayeun Nilai DO Sebesar 7,89 terhadap nilai baku mutu sebesar 4, berarti sugai Bayeun terjadi pencemaran air perlu dilakukan pemantauan yang rutin selama satu tahun. Phosphat pada sungai arakundo sebesar 0,27, baku mutu Phosphat sebesar 0,2 Berarti nilai Phosphat telah melebihi dari baku mutu. Perlu dilakukan pengawasan disekitar sungai Bayeun, untuk mengendalikan nilai Phosphat.

Gambar 2.1.7.
Kondisi Sungai di Kabupaten Aceh Timur



Sumber Olah Tabel 27. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Aceh Timur 2020

Hasil dari 3 sungai yang ada, Sungai Peureulak merupakan sungai terpanjang di Kabupaten Aceh Timur dengan panjang 165.50 km, sedangkan Sungai Arakundo merupakan sungai yang terpendek dengan panjang 22 km. Berdasarkan debit alirannya semua sungai di Kabupaten Aceh Timur belum memiliki data, data yang belum dimiliki

akan dijadikan evaluasi di Kabupaten Aceh Timur pada tahun berikutnya.

b) Kerusakan Sumber Daya Alam (SDA) akibat Penambangan Tanpa Izin (PETI) pada DAS yang menyebabkan terjadinya perubahan pada kondisi sungai (debit, lebar, kedalaman dan alur sungai), penurunan kualitas dan kuantitas air sungai.

c) Masih rendahnya ketersediaan Sumber Air Minum Rumah Tangga di Kabupaten Aceh Timur yang bersumber dari pengelolaan air bersih seperti ledeng.

Sumber air bersih yang digunakan rumah tangga masih didominasi oleh air sumur dan sumber lainnya seperti mata air. Namun pada gambar terlihat penggunaan air ledeng dan air sumur semakin meningkat pada tahun 2018 karena mulai adanya pembangunan sistem pelayanan air minum (SPAM). Namun, pada tahun 2021 masih ditemukan rumah tangga yang menggunakan air sungai dan air hujan sebagai sumber air minum. Dengan melihat kondisi lingkungan terutama sungai, sumber air minum yang berasal dari air sungai akan menjadi permasalahan dimana pencemaran yang terjadi pada sungai yang umumnya telah tercemar dapat berdampak kepada kesehatan masyarakat dimasa yang akan datang.

d) Jumlah rumah tangga dan ketersediaan fasilitas buang air besar menjadi tekanan terhadap perubahan kualitas lingkungan di Kabupaten Aceh Timur. Limbah cair dan limbah padat yang dihasilkan dari limbah domestik rumah tangga inipun dapat memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap kondisi sumber air dan kualitas air.

Pertambahan jumlah penduduk berbanding lurus dengan jumlah limbah cair dan limbah padat yang dihasilkan, sehingga ketersediaan fasilitas tempat buang air besar atau IPAL juga seharusnya semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk. Namun, jika dilihat dari ketersediaan fasilitas MCK rumah tangga yang terbangun sesuai dengan yang terdata oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur, yaitu hanya 46.010 Rumah Tangga (RT) (fasilitas sendiri dan bersama) dari total rumah tangga yang ada di Kabupaten Aceh Timur yaitu sebanyak 204.848 RT, berarti masih ada sekitar 158.838 RT yang belum terdata memiliki fasilitas MCK. Hal ini masih belum seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk, sehingga jumlah limbah yang dihasilkan tidak cukup tertampung dengan fasilitas yang tersedia, dan dibuang ke badan air melalui saluran terbuka yang dapat menyerap ke tanah. Hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas sumber air, baik itu air sungai, embung ataupun air tanah/sumur.

- e) Peningkatan jumlah penduduk suatu wilayah yang tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan akan menimbulkan permasalahan baru bagi pembangunan daerah. Baik permasalahan sosial maupun permasalahan lingkungan. Menurut BPS pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk tahun 2018 di Kabupaten Aceh Timur sebesar 2,82% dengan tingkat kepadatan penduduk 128,46 jiwa/km².

- f) Lingkungan yang tidak layak huni dan kotor dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit. Jenis penyakit utama yang diderita penduduk dapat berasal dari kualitas air yang tidak layak konsumsi, kualitas udara ambien yang dihirup sehari-hari, dan limbah cair dan limbah padat domestik yang tidak dikelola dengan baik. Pada Tabel.33 Jenis

Penyakit Utama yang Diderita Penduduk. merupakan gambaran jumlah penderita jenis penyakit utama yang diderita penduduk tahun 2020 di Kabupaten Aceh Timur, terlihat bahwa penyakit ISPA menjadi dominasi penyakit terbanyak yang diderita oleh penduduk Aceh Timur, dan diikuti oleh jenis penyakit lainnya yang cukup beragam.

Infeksi Saluran pernafasan Akut (ISPA) adalah penyakit infeksi saluran pernafasan bagian atas yang cenderung disebabkan oleh faktor lingkungan, seperti air dan udara. Sedangkan penyakit febris/common cold, alergi kulit, dan diare yang juga banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan tidak begitu tinggi persentasenya.

- g) Tekanan terhadap kualitas air juga dipengaruhi oleh jumlah rumah tangga miskin yang ada di Kabupaten Aceh Timur. Jumlah rumah tangga dengan ekonomi rendah akan sulit untuk memenuhi pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan cenderung berada pada lingkungan yang kurang bersih karena keterbatasan kebutuhan primer, apalagi untuk memenuhi kebutuhan sekunder.
- h) Pengelolaan limbah padat dan cair masih belum terkelola dengan baik, begitu juga untuk pengelolaan limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) padat dan Limbah B3 cair. Hal ini disebabkan oleh masih banyak pemrakarsa yang belum sepenuhnya melaksanakan upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan yang ada pada dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang dibuat.

Untuk pengelolaan limbah padat sampah dan sampah rumah tangga juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kualitas air. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah rumah tangga yang baik dan masih ditemukan masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Selain itu, pengelolaan limbah cair yang

berasal dari beberapa usaha/kegiatan yang tersebar di Kabupaten Aceh Timur menjadi tekanan terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Timur. Pengawasan terhadap pengelolaan usaha/kegiatan, limbah padat/cair, limbah B3 dan limbah domestik belum dapat terpantau secara keseluruhan disebabkan oleh keterbatasan anggaran kegiatan pengawasan usaha/kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

- i) Banyaknya areal terbangun pada lokasi DAS yang berpotensi terhadap berkurangnya daerah penyangga resapan air. Dengan berkurangnya daerah resapan air dan dengan adanya curah hujan yang tinggi menyebabkan aliran air hujan tidak dapat meresap dan tertampung sehingga dapat menimbulkan banjir. Debit air sungai juga dipengaruhi oleh curah hujan. Kondisi curah hujan rata-rata per-tahun yang terpantau oleh 5 (lima) stasiun pemantau di Kabupaten Aceh Timur berkisar antara 20 - 585mm, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari 2020 dan terendah pada bulan Februari 2020, sedangkan rata-rata curah hujan per-tahun sekitar 221,53mm.

Selain itu, tingkat penguapan air dipengaruhi oleh suhu udara. Suhu udara rata-rata per-tahun berkisar antara 21,60 - 30,20°C, dengan rata-rata suhu per-tahun 26,94°C. Suhu udara yang cukup tinggi menyebabkan tingkat penguapan air tinggi dan mempengaruhi terhadap kuantitas dan kualitas air sungai (debit). Pembuatan embung menjadi solusi efektif untuk mengatasi banjir di kawasan pertanian. Embung merupakan tempat penampungan air hujan yang berfungsi menampung kelebihan genangan air terutama di wilayah pertanian. Namun karena tidak terawat, maka terjadi pendangkalan yang menyebabkan timbulnya banjir di persawahan dari aliran irigasi embung. Pintu air embung rentan mengalami kerusakan, pertumbuhan enceng gondok yang subur, dan menjadi tempat pembuangan sampah dan limbah rumah tangga di badan air embung, sehingga sawah kerap tidak terairi dengan baik.

2.3. Kondisi Sungai

Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Air sungai adalah air yang mengalir melalui terusan daratan alami yang kedua pinggirnya dibatasi oleh tanggul-tanggul dan airnya mengalir dengan kecepatan tertentu dari hulu ke hilir menuju ke laut, ke danau, atau ke sungai lain yang merupakan sungai induk. Manfaat air sungai bagi kehidupan sangat besar artinya, selain sebagai bahan baku air minum, juga untuk mengairi pertanian di pesawahan, perikanan, lalu lintas perairan, pembangkit tenaga listrik, dan pariwisata. Sungai juga berfungsi sebagai media dalam siklus hidrologi untuk tempat berkumpulnya air hujan, mata air, aliran air tanah dan aliran erosi tanah. Air sungai merupakan sumber air permukaan dapat menjadi sumber yang paling tercemar, baik karena kegiatan manusia, fauna, flora, dan zat-zat lainnya.

Tabel 2.1.2.
Inventarisasi Sungai Berdasarkan Panjang dan Debit Sungai per-Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	DebitMin (m ³ /dtk)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1	Sungai Peureulak	165	75	50	3-4	43,80	6,32
2	Sungai Arakundo	22	140	80	10	237,24	23,72
3	Sungai Idi Rayeuk	42	80	50	4	10,46	0,59

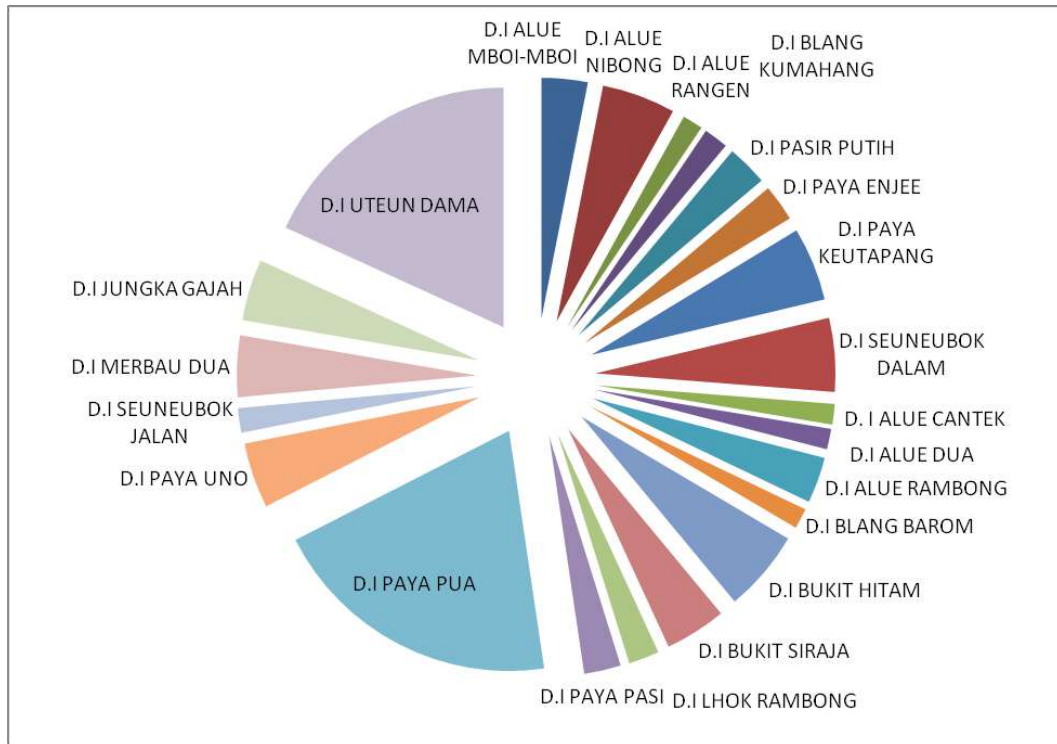
Sumber Olah Tabel 27. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Aceh Timur 2020

2.3.1. Kondisi Danau/ Waduk/Situ Embung

Embung atau tandon air merupakan waduk berukuran mikro di lahan pertanian (*small farm reservoir*) yang dibangun untuk menampung kelebihan air hujan di musim hujan. Air yang ditampung tersebut selanjutnya digunakan sebagai sumber irigasi suplementer untuk budidaya komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi (*high added value crops*) di musim kemarau atau di saat curah hujan makin jarang.

Embung merupakan salah satu teknik pemanenan air (*water harvesting*) yang sangat sesuai di segala jenis agroekosistem. Teknologi embung atau tandon air merupakan salah satu pilihan yang menjanjikan untuk mengatur ketersediaan air agar dapat memenuhi kebutuhan air (*water demand*) yang semakin sulit dilakukan dengan cara-cara alamiah (*natural manner*) karena teknologinya sederhana, biayanya relatif murah dan dapat dijangkau kemampuan petani. Di lahan rawa namanya *pond* yang berfungsi sebagai tempat penampungan air drainase saat kelebihan air di musim hujan dan sebagai sumber air irigasi pada musim kemarau. Sementara pada ekosistem tadah hujan atau lahan kering dengan intensitas dan distribusi hujan yang tidak merata, embung dapat digunakan untuk menahan kelebihan air dan menjadi sumber air irigasi pada musim kemarau. Secara operasional sebenarnya embung berfungsi untuk mendistribusikan dan menjamin kontinuitas ketersediaan pasokan air untuk keperluan tanaman ataupun ternak di musim kemarau dan penghujan.

Gambar 2.1.8.
Luas dan Volume Embung di Kabupaten Aceh Timur



Sumber Olah Tabel 28. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Aceh Timur 2020

Pada Kabupaten Aceh Timur terdapat 22 (dua) embung yaitu Embung Aleu Mboi- Mboi, Embung Aleu Nibong, Embung Aleu Rangen, Embung Blang Kumahang, Embung Pasir Putih, Embung Paya Enjee, Embung Paya Ketapang, Embung Seuneubok Dalam, Embung Aleu Cantek, Embung Aleu Dua, Embung Aleu Rambong, Embung Blang Barom, Embung Buket Hitam, Embung Bukit Siraja, Embung Lhok Rambong, Embung Paya Pasi, Embung Paya Dua, Embung Paya Uno, Embung Seuneubok Jalan, Embung Merbau Dua, Embung Jungka Gajah dan Embung Uteun Dama.

2.4. Kualitas Udara

2.4.1 Pressure

Secara umum, kuantitas bahan pencemar di alam akan ditentukan oleh populasi manusia serta ragam dan intensitas kegiatan yang dilakukan pada suatu wilayah tertentu. Pencemaran merupakan sebuah siklus wajar di dunia karena bersumber dari entropi yang merupakan sisa pemanfaatan energi yang tidak dapat dipergunakan atau tidak lagi dimanfaatkan untuk menghasilkan produk. Pencemaran udara pada hakikatnya dapat disebabkan secara alami maupun akibat ulah manusia atau antropogenik. Namun, pencemaran akibat alam umumnya akan mudah ditanggulangi oleh matri terdampak akibat adanya kelentingan alami.

Berdasarkan paparan pada paragraf di atas, maka faktor tekanan utama pencemaran adalah pertumbuhan populasi penduduk dan meningkatnya aktivitas dalam tinjauan ragam atau jenisnya maupun intensitasnya. Secara spesifik, tekanan atau pressure pencemaran udara di Kabupaten Aceh Timur adalah

- Pertumbuhan populasi yang diiringi oleh meningkatnya intensitas dan ragam aktivitas antropogenik
- Peningkatan angka kepemilikan dan penggunaan kendaraan pribadi secara signifikan
- Tingginya intensitas komuter dari wilayah hinterland yang sebagian besarnya menggunakan kendaraan pribadi
- Keterbatasan luasan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai wahana atau fasilitas pereduksi beberapa parameter emisi secara alami
- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperan serta aktif dalam upaya mereduksi emisi
- Rendahnya penggunaan bahan bakar ramah lingkungan, khususnya untuk sektor industri dan transportasi
- Matri udara belum menjadi obyek penelitian yang populer dan menarik bagi akademisi sehingga terkesan lemah dalam pengembangan upaya mitigasi
- Belum tersedianya sarana monitoring emisi

2.4.2 State

Faktor iklim menjadi penentu kondisi kualitas udara sebuah kawasan disamping tentunya jumlah polutan yang dihasilkan. Oleh sebab itu parameter-parameter iklim akan terlebih dahulu diidentifikasi melengkapi pendataan terhadap kualitas udara.

Temperatur adalah suatu ukuran untuk tingkat panas suatu benda. Suhu suatu benda ialah keadaan yang menentukan kemampuan benda tersebut untuk mentransfer panas atau menerima panas, dari benda satu ke benda yang lain. Distribusi suhu di dalam atmosfer sangat bergantung terutama pada keadaan radiasi matahari, oleh sebab itu suhu udara selalu mengalami perubahan.

Temperatur udara permukaan bumi merupakan salah satu unsur penting yang diamati oleh pengamat cuaca (Meteorological Station maupun Climatological Station). Dalam meteorologi yang dimaksud dengan suhu udara permukaan adalah suhu udara pada ketinggian 1.25 sampai dengan 2 meter dari permukaan tanah.

Hujan merupakan salah satu bentuk presipitasi uap air yang berasal dari alam yang terdapat di atmosfer. Bentuk presipitasi lainnya adalah salju dan es. Hujan berasal dari uap air di atmosfer, sehingga bentuk dan jumlahnya dipengaruhi oleh faktor klimatologi seperti angin, temperatur dan tekanan atmosfer. Uap air tersebut akan naik ke atmosfer sehingga mendingin dan terjadi kondensasi menjadi butir-butir air dan kristal-kristal es yang akhirnya jatuh.

Hingga saat ini belum pernah dilakukan pemantauan terhadap kualitas udara. Namun, mempertimbangkan emisi yang makin meningkat dengan kemampuan mengintervensi kandungan air hujan (SO_x maupun partikulat) serta sifat pergerakan udara yang fleksibel dan kemampuan tinggal cukup lama pada beberapa partikel emisi berbahaya, maka pemantauan kualitas air hujan menjadi tindakan mendesak untuk dilakukan secara konsisten.

Udara merupakan sumber daya alam yang paling berpengaruh bagi kehidupan makhluk hidup di bumi, sehingga harus dijaga dan dipelihara kelestarian karena tanpa udara, makhluk hidup bisa kehilangan kehidupannya. Semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), semakin tinggi pula aktivitas kegiatan ekonomi manusia, di antaranya dengan semakin pesatnya perkembangan proses industrialisasi dan sistem transportasi. Sebagai konsekuensi logis, maka semakin meningkat pula zat-zat polutan yang dikeluarkan kegiatan industri maupun transportasi tersebut. Keberadaan zat-zat polutan di udara ini tentu akan berpengaruh terhadap proses-proses fisik dan kimia yang terjadi di udara.

Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yuridiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhinya kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya. Adanya kegiatan makhluk hidup menyebabkan komposisi udara alami berubah. Jika perubahan komposisi udara alami melebihi konsentrasi tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya, maka udara tersebut dikatakan telah tercemar.

Bentuk upaya pemantauan dari pengelolaan udara ambien adalah dengan melakukan uji laboratorium udara ambien di beberapa titik lokasi. Menurut sumber polutannya maka pengambilan sampel ini diperoleh dari lokasi yang dapat mewakili lokasi di Kabupaten Aceh Timur. Lokasi pengambilan sampel yaitu sebagai berikut:

Tabel.2.1.3.
Kualitas Udara Ambien di Kabupaten Aceh Timur

A.	Tahap I						
1	Jln. B. Aceh - Medan Titi Baro, Kec. Idi Rayeuk	4,935733	97,7823	14 Hari	14,4		11,3
2	Desa Aramiyah Kec. Birem Bayeun	4,570433	97,919267	14 Hari	9,28		3,89

3	Desa Alue bu Tuha Kec. Peureulak Barat	4,866278	97,854528	14 Hari	6,55		4,42
4	Jln. B. Aceh - Medan Titi Baro, Kec. Idi Rayeuk	4,92585	97,78665	14 Hari	7,96		4,16
5	Blak Sample			14 Hari	<2,57		<0,41
B. Tahap II							
1	Jln. B. Aceh - Medan Titi Baro, Kec. Idi Rayeuk	4,935733	97,7823	14 Hari	29,21		17,74
2	Desa Aramiyah Kec. Birem Bayeun	4,570433	97,919267	14 Hari	7,7		4,92
3	Desa Alue bu Tuha Kec. Peureulak Barat	4,866278	97,854528	14 Hari	6,32		4,73
4	Jln. B. Aceh - Medan Titi Baro, Kec. Idi Rayeuk	4,92585	97,78665	14 Hari	3,89		4,05
5	Blak Sample			14 Hari	<0.41		<2.57

Sumber : Tabel 37 Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Aceh Timur 2021

Hasil dari uji udara ambien menunjukkan tidak ada permasalahan serius pada kualitas udara karena berdasarkan parameter dipantau nilainya masih berada di bawah baku mutu. Meskipun demikian, penetapan status mutu dan *air quality management* tidak bisa ditetapkan sekedar dari uji ambien. Hasil dari inventarisasi emisi terkait sumber dan potensi merupakan bagian pertimbangan wajib bersama uji ambien untuk memutuskan status mutu udara lokal.

2.4.3. Response

Konsep serupa pada seluruh respon masalah pencemaran adalah mempersiapkan mitigasi untuk reduksi jumlah polutan dan minimalisasi dampak. Tahap awal mitigasi tersebut adalah melalui pemantauan yang

konsisten pada seluruh sumber emisi potensial di Kabupaten Aceh Timur. Mengingat dalam konteks ini adalah terkait pencemaran udara, maka pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui dua pendekatan yaitu uji udara ambien dan inventarisasi emisi.

Upaya pemantauan udara ambien telah rutin dilakukan oleh DLH Kabupaten Aceh Timur setiap tahunnya mencakup titik titik yang mewakili pemanfaatan ruang tertentu (pemukiman, perdagangan atau transportasi). Hanya saja, parameter pemantauan masih terbatas sekali lagi akibat keterbatasan instrumen analisis laboratorium.

Secara garis besar, upaya respon dalam penanggulangan pencemaran udara di Kabupaten Aceh Timur mencakup

- a. Pemantauan kualitas udara ambien maupun inventarisasi emisi
- b. Pengawasan dan uji kualitas udara pada berbagai aktivitas
- c. Penyediaan transportasi massal yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas maupun jangkauan layanan, termasuk rintisan transportasi untuk memfasilitasi mobilitas komuter di Kabupaten Aceh Timur
- d. Penyediaan sarana dan fasilitas penunjang bagi kenyamanan dan kemudahan pengguna transportasi massal
- e. Pembangunan koneksi intermoda untuk memudahkan akses angkutan massal seperti penyediaan halte dan Terminal Tirtonadi
- f. Pembangunan pedestrian yang nyaman terutama kawasan Central Business District (CBD) untuk memberikan fasilitas lebih bagi pejalan kaki maupun pesepeda agar terlepas dari budaya penggunaan kendaraan bermotor pribadi
- g. Pelaksanaan program-program yang menjadi media perubahan pola pikir masyarakat mengenai transportasi dan pemanfaatan jalan raya seperti pelaksanaan Car Free Night, Car Free Day dan sosialisasi transportasi massal Batik Solo Trans (BST) ke sekolah-sekolah.

- h. Upaya penambahan ruang terbuka hijau (RTH) terutama pada kawasan pusat bisnis (CBD) dengan pemilihan tanaman yang lebih berfungsi optimal untuk lingkungan khususnya untuk mereduksi cemaran karbondioksida dan partikulat serta menyediakan cukup oksigen pada siang hari.
- i. Upaya pengadaan alat monitoring kualitas udara untuk ditempatkan di lokasi-lokasi strategis sebagai informasi teraktual bagi masyarakat mengenai kualitas udara di Kabupaten Aceh Timur

kendaraan yang beroperasi terkhusus pada kendaraan bermotor pribadi. Industri telah disampaikan bukan merupakan kontributor utama emisi. Meski demikian pihak pemerintah kota melalui DLH secara konsisten terus melakukan pemantauan aktif terhadap emisi yang dihasilkan oleh industri.

2.5. Resiko Bencana

2.5.1. Pressure

Faktor terjadinya bencana secara umum akan terbagi dua yaitu natural (alam) dan antropogenik (ulah manusia). Faktor kedua merupakan fenomena yang banyak terjadi saat ini dengan kemampuan untuk memicu faktor pertama atau secara langsung menyebabkan bencana karena terjadinya degradasi lingkungan

a. Faktor Alam

1. Karakter wilayah Surakarta yang secara alami rawan terhadap bencana alam khususnya bencana banjir.

2. Perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan musim dan intensitas hujan sehingga berdampak pada kapasitas sarana pengendali dampaknya
3. Fasilitas pengendali dampak seperti drainase yang sudah menua dan mengalami penurunan fungsi

b. Faktor Manusia (antropogenik)

1. Rencana pembangunan dan penanggulangan bencana Kota Surakarta dipandang belum terintegrasi
2. Pembangunan sistem penanggulangan bencana yang handal melalui kelembagaan yang kuat dan ketersediaan pendanaan yang memadai
3. Kesiapan dan ketangguhan masyarakat dalam tanggap bencana dianggap masih kurang dan perlu untuk ditingkatkan secara merata
4. Wawasan dan persepsi masyarakat terhadap lingkungan masih kurang, terutama pada perilaku yang dapat meningkatkan dan mereduksi resiko bencana lokal.

Saat ini salah satu permasalahan utama pendorong besarnya dampak bencana adalah kepadatan populasi yang ironisnya berbanding terbalik dengan kondisi persepsi lingkungan. Persepsi tersebut didorong oleh budaya dan kebutuhan sehingga muncul kecenderungan mengabaikan lingkungan dan secara tidak sadar menabur benih pemicu bencana.

2.5.2. State

Secara umum, kebencanaan dikategorikan menjadi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan bencana lingkungan. Bencana alam merupakan kondisi yang kerap kali hadir secara alami, tidak dapat dicegah hanya dapat dipersiapkan langkah penanggulangannya untuk menurunkan resiko kerusakan, kerugian atau korban. Bencana non alam adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam akibat kelalaian manusia

seperti kebakaran. Bencana sosial adalah kondisi bencana yang dipicu oleh permasalahan sosial berkaitan dengan interaksi antar manusia. Bencana lingkungan merupakan bencana yang menyebabkan penurunan atau bahkan kerusakan komponen lingkungan, contohnya adalah pencemaran. Karakter bencana lingkungan adalah efek yang tidak terjadi seketika, terakumulatif dan dapat memicu terjadi bencana kategori lainnya, termasuk bencana alam.

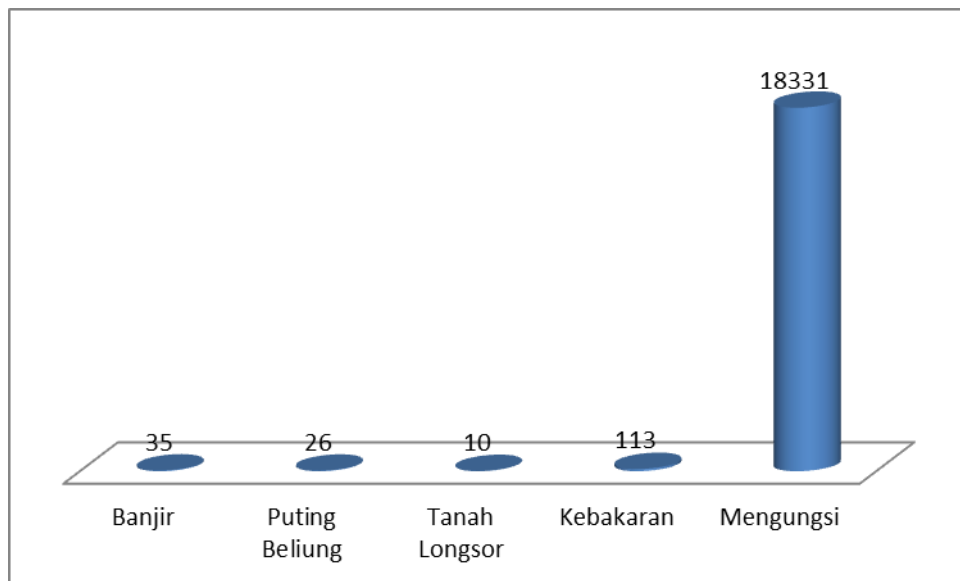
Bencana pada kehidupan modern ditinjau dari faktor penyebabnya lebih didominasi oleh faktor manusia, khususnya karena intensitas kegiatan antropogenik yang mengabaikan aspek lingkungan. Dokumen izin lingkungan adalah muara dari sebuah proses untuk memitigasi dampak lingkungan sebuah kegiatan. Melalui pengkajian tersebut upaya penanggulangan akan lebih sistematis dan terencana sehingga dapat dilakukan minimalisasi dampak terhadap manusia maupun lingkungan. Penyusunan dokumen lingkungan menjadi salah satu langkah mitigasi bagi bencana lingkungan.

Limbah B3 disadari merupakan ancaman nyata bagi kesehatan lingkungan termasuk masyarakat sebagai obyeknya. Sementara itu, pada era modern, bahan-bahan berkategori beracun dan berbahaya umum dimanfaatkan dalam beragam kegiatan. Aspek bahaya limbah B3 beresiko tinggi dalam memicu bencana lingkungan. Oleh sebab itu, pengelolaan limbah tersebut mendapatkan perhatian yang lebih dari stakeholder lingkungan setempat, salah satunya adalah kewajiban pengajuan izin bagi pengelola limbah lingkungan. Bersumber dari kegiatan atau jenis usaha kesehatan baik berupa rumah sakit maupun klinik. Sisanya adalah dari fasilitas komersial/perdagangan. Keseluruhan izin pengelolaan tersebut berupa penyediaan TPS B3 pada fasilitas bangunan masing-masing. Untuk pengelolaan lanjutan dari limbah yang dihasilkan dalam keterangan dinyatakan akan diserahkan pada pihak ketiga.

Berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2013, Kabupaten Aceh Timur termasuk sebagai kategori resiko sedang. Kondisi

ini membaik dari indeks tahun 2007 dalam dokumen yang sama yang mengkategorikan Kabupaten Aceh Timur sebagai resiko tinggi untuk terjadinya multiple hazard. Bencana banjir memiliki resiko kerawanan tinggi untuk probabilitas kejadiannya di wilayah Kabupaten Aceh Timur.

Gambar .2.1.8.
Bencana banjir, Mengungsi dan Kebakaran
Kabupaten Aceh Timur



Sumber : Tabel.44- Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Aceh Timur 2021

Tidak tersedia data detail mengenai kejadian banjir pada tahun 2021 pada tingkat kecamatan. Tipikal banjir yang lebih kerap terjadi pada Tahun 2021 adalah akibat penggenangan air terutama pada jalan-jalan utama di wilayah sentra bisnis. Hal tersebut diperkirakan sebagai dampak menurunnya kinerja drainase Kabupaten Aceh Timur.

2.5.2. Response

Selaras dengan Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) yang dirilis oleh BNPB, maka banjir dan tanah longsor menjadi prioritas dalam penyiapan, pananggulangan dan penanganan bencana. Meskipun demikian, pada faktanya banjir menjadi bencana yang berkelanjutan dan konsisten terjadi terutama pada puncak-puncak penghujan. Salah satu

upaya mitigasi tersebut adalah dengan menyusun peta rawan bencana dan deskripsi kawasannya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Timur telah merilis peta rawan bencana lengkap. Pada peta tersebut, BPBD membagi kerawanan menjadi rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Kerentanan banjir tertinggi pada akhirnya memang dipetakan pada wilayah-wilayah berdekatan dengan aliran sungai.

Upaya respon terhadap banjir dilakukan pula melalui pendekatan non fisik dengan pembentukan persepsi lingkungan yang tepat pada masyarakat dan pembentukan masyarakat siaga bencana. Upaya tersebut salah satunya melalui Prokasih (Prokasih) yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Program tersebut pada dasarnya adalah upaya mengendalikan pencemaran dan melindungi kualitas sungai. Secara langsung, wujud pelaksanaan program tersebut akan mengurangi resiko banjir di Kabupaten Aceh Timur. Hal tersebut tertuang dalam salah satu manfaat Prokasih terhadap lingkungan yaitu mengurangi resiko terjadinya banjir karena adanya pendangkalan sebagai dampak tertumpuknya sampah di sungai. Program tersebut dilakukan dengan pendekatan pencegahan maupun penanggulangan. Pendekatan-pendekatan melalui penyadaran masyarakat untuk tidak menempatkan sungai sebagai wadah pembuangan limbah sedangkan pendekatan penanggulangan dilakukan melalui pembersihan dan normalisasi sungai bersama-sama dengan memberdayakan masyarakat melalui program padat karya.

Program lain yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah optimalisasi dan penambahan ruang terbuka hijau, salah satunya adalah penghijauan. Ruang terbuka hijau memberikan kawasan resapan air yang baik terutama apabila pemilihan tanaman dilakukan secara teliti serta diletakkan secara langsung berkaitan dengan tanah atau lahan. Penanaman pohon atau penghijauan pada media khusus berupa pot atau atap (roofgarden) tidak berfungsi optimal atau bahkan tidak sama sekali berperan dalam resapan air.

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berupaya mengubah persepsi masyarakat tentang sungai. Persepsi masyarakat dibentuk untuk tidak lagi memandang sungai sebagai bagian belakang rumah, bermakna sebagai tempat pembuangan akhir yang tidak perlu ditata, namun berubah dengan menjadikan sungai sebagai halaman depan bahkan beranda rumah yang menjadi etalase untuk ditata sebaik mungkin.

2.6. Perkotaan

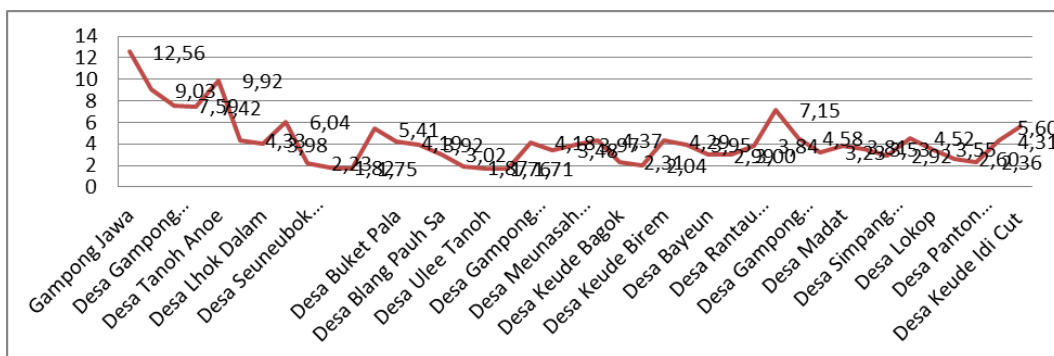
2.6.1 Persampahan

2.6.1.1 Pressure

Sampah merupakan salah satu jenis pencemar lingkungan. Apabila tidak bisa ditanggulangi, sampah dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan masyarakat seperti terjangkitnya diare, kolera, serta tifus. Selain itu, sampah juga memberi kontribusi terhadap pemanasan global, mengingat sampah dapat menghasilkan gas metan (CH₄) yang bisa merusak atmosfer bumi.

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dan semakin bertambahnya konsumsi masyarakat serta aktivitas lainnya akan berdampak pada terjadinya penambahan volume sampah yang dihasilkan. Grafik di bawah (Gambar 49) menunjukkan bahwa percepatan laju jumlah sampah terbuang lebih tinggi dibandingkan populasi penduduk. Hal tersebut mengindikasikan dua hal, pertama adalah ancaman pertumbuhan sampah secara signifikan akibat pertumbuhan populasi dan modernisasi gaya hidup dan kedua adalah sifat konsumerisme dan etika antropogenik masyarakat yang cenderung enggan mengolah atau mengelola sampah.

Gambar .2.1.9. Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari Kabupaten Aceh Timur



Sumber : Tabel.47- Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Aceh Timur 2022

Secara umum, tekanan atau pressure untuk permasalahan sampah di Kabupaten Aceh Timur antara lain :

- a. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Timur menyebabkan meningkatnya sampah domestik.
- b. Rendahnya kesadaran dalam usaha mengelola sampah. Masyarakat merasa bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab pemerintah karena mereka sudah membayar retribusi.
- c. Rendahnya kemampuan masyarakat untuk melaksanakan pola pengelolaan 3R (reduce, reuse dan recycle) pada sampah
- d. Permasalahan pada komitmen petugas sampah, khususnya pada petugas yang terjun langsung pada masyarakat
- e. Terbatasnya lahan TPA Birem Bayeun dan TPA Lhok Tujoh yang saat ini sudah *overload*. Luas lahan Birem Bayeun dan TPA Lhok Tujoh kurang lebih 7 hektare hanya mampu menampung 650.000 m³ Kapasitas.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Acehe Timur telah menginisiasi pelaksanaan bank sampah sebagai wadah meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat dalam peran serta mengelola sampah. Namun, pelaksanaan bank sampah masih mengalami tantangan yang dapat dimasukkan sebagai bagian pressure terhadap masalah persampahan. Tekanan atau permasalahan tersebut antara lain

- Adanya salah paham dengan pengepul keliling
- Kurangnya koordinasi dengan masyarakat luas. Selama ini anggota bank sampah umumnya hanya warga sekitar yang lokasi rumahnya

dekat dengan bank sampah. Sedangkan tujuan bank sampah adalah mengajak masyarakat luas untuk mengelola sampah mereka, sehingga akan membentuk sistem pengelolaan sampah yang baik.

- Minimnya kreasi produk daur ulang sampah yang dihasilkan. Selain dijual dalam bentuk sampah (botol, kaleng, kertas, dll), bank sampah biasanya menjual barang jadi dalam bentuk produk daur ulang sampah. Namun ternyata hal tersebut mengalami kendala dalam penjualannya dikarenakan minimnya kreasi produk daur ulang tersebut.

2.6.1.2 State

Penduduk merupakan faktor penting dalam sebuah estimasi ataupun analisis masalah persampahan pada satu wilayah. Berdasarkan teori terdapat pendekatan sampah yang dihasilkan oleh perkapita penduduk, namun kenyataan saat ini adalah produksi sampah perkapita dapat bervariasi dipengaruhi oleh gaya hidup dan persepsi masyarakat suatu kawasan terhadap lingkungan. Adapaun pengetahuan mengenai pemanfaatan sampah akan menentukan nilai lanjut dari sampah menjadi produk baru atau dimanfaatkan kembali untuk kepentingan lainnya

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menginisiasi terbentuknya bank-bank sampah di masyarakat sebagai wahana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan sampah. Bidang persampahan di DLH Kabupaten Aceh Timur mendeskripsikan saat ini setidaknya sudah ada 2 bank sampah di Kabupaten Aceh Timur. Sayangnya, belum terbentuk bank sampah tingkat kota yang berperan mengkoordinasi bank-bank sampah pada tataran bawahnya sehingga upaya pendataan jumlah sampah serta hasil kegiatan ini belum dapat dilakukan. Bank-bank sampah yang ada, mayoritas digerakkan oleh PKK ataupun komunitas sosial yang belum memiliki kantor atau lokasi tetap

pengelola. Kegiatan dilakukan secara sporadis pada acara-acara kemasyarakatan rutin.

2.6.1.2 Response

Terkait dengan upaya melibatkan atau memberdayakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, pemerintahan Kabupaten Aceh Timur mengandalkan operasional bank sampah yang telah cukup banyak beroperasi di masyarakat. Membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh bank sampah, maka pemerintah melaksanakan program-program sebagai berikut :

- DLH Kabupaten Aceh Timur berencana melaksanakan pelatihan dan menyalurkan produk – produk daur ulang dari bank sampah kepada konsumen. Konsumen yang dimaksud adalah perusahaan – perusahaan besar yang nantinya dijual dalam bentuk souvenir perusahaan.
- DLH Kabupaten Aceh Timur membantu dalam sosialisasi kepada masyarakat luas. Program bank sampah nantinya akan dilaksanakan di tiap – tiap kelurahan dan berlanjut ke tingkat RW.

2.6.2. Kemiskinan

2.6.2.1. Pressure

Kemiskinan seringkali dipandang tidak berkaitan langsung dengan permasalahan lingkungan. Namun, pada hakikatnya permasalahan kemiskinan dan lingkungan memiliki interaksi timbal balik. Kemiskinan mengakibatkan terbatasnya akses baik pada penyediaan sarana pendukung maupun pendidikan hingga memaksa masyarakat memandang peran lingkungan secara tidak tepat dan cenderung bersikap abai. Pada siklus berbeda kerusakan lingkungan akan memacu munculnya masalah baru khususnya terkait kesehatan yang pada akhirnya

memberikan tekanan tambahan bagi perekonomian kelompok menengah-bawah bahkan memicu pertumbuhan masyarakat miskin akibat tekanan tersebut.

Pressure atau tekanan terhadap permasalahan kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur meliputi hal-hal sebagai berikut

- Kesenjangan pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan Kabupaten Aceh Timur (2010-2019)
- Keterbatasan untuk memperoleh kehidupan layak akibat terbatasnya skill
- Keterbatasan akses pada pemukiman layak huni

2.6.2.2 State

Kemiskinan akan memiliki efek domino terhadap munculnya fenomena lainnya pada kawasan perkotaan yang seringkali merugikan kepentingan lingkungan hidup atau setidaknya memberikan masalah bagi lingkungan. Salah satu yang tampak nyata adalah munculnya kawasan kumuh terutama bantaran sungai. Beberapa permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh kawasan kumuh Kabupaten Aceh Timur adalah :

- Okupansi dan gangguan pada potensi pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) pada kawasan bantaran sungai
- Terganggunya fungsi ekosistem tepian sungai (riparian) terhadap lingkungan perkotaan akibat munculnya dominasi aktivitas antropogenik dengan arah tidak terkendali
- Potensi besar limbah domestik terbuang langsung ke sungai akibat ketidaktersediaan sarana pengolahan limbah ideal
- Terganggunya beberapa kawasan luapan sungai sekaligus potensi ancaman pencemaran dan gangguan kesehatan lingkungan lebih besar ketika terjadi luapan

Permasalahan tersebut tentunya lebih memiliki nilai penting dibandingkan sekedar masalah estetika akibat adanya bangunan kumuh pada bantaran sungai (riverbank).

**Tabel.2.1.6.
Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Aceh Timur**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Miskin	Prosentase Rumah Tangga miskin
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Aceh Timur	-	62340	14,08

Sumber : Tabel.34- Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Aceh Timur 2020

Data dari BPS (2022) menyebutkan bahwa masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Timur saat ini hanya sebesar 14,08% dari (pendataan 2020).

2.6.2.3 Respons

Respons pemerintah Kabupaten Aceh Timur terhadap kemiskinan dan dampak lanjutannya berupa munculnya pemukiman kumuh terutama pada upaya pengentasan kemiskinan dan membantu pembangunan atau penyediaan akses rumah layak huni. Upaya pengentasan dilakukan dengan pemberian dan penyediaan akses pada layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta pelatihan keterampilan. Untuk penyediaan akses pada rumah layak huni.

Pembangunan rumah Duafa sebagai contoh, merupakan bagian dari penataan kawasan kumuh Kabupaten Aceh Timur sekaligus normalisasi bantaran sungai. Melalui penyediaan tersebut masyarakat akan memperoleh hunian layak dan meninggalkan kawasan kumuh.

BAB III

ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

3.1. ISU LINGKUNGAN YANG TERJADI DI KABUPATEN ACEH TIMUR

Perubahan kondisi lingkungan yang terjadi saat ini telah menjadi perhatian dan tema penting baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah. Hal ini wajar terjadi karena lingkungan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Perubahan kondisi lingkungan terjadi sebagai akibat dari berbagai macam kegiatan yang telah dilakukan oleh manusia sehingga terjadinya penurunan kualitas fungsi lingkungan baik itu penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara, perubahan sumberdaya alam, tataguna lahan dan tata kelola lingkungan, sehingga menimbulkan resiko bencana bagi kehidupan manusia itu sendiri.

Untuk mengambil kebijakan dalam rangka mengantisipasi dampak dari perubahan kondisi lingkungan, maka perlu diketahui apa penyebab utama perubahan itu terjadi, seberapa besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, serta seberapa penting penyebab perubahan lingkungan itu terjadi. Penyebab dan besaran dampak yang telah terjadi selanjutnya dapat ditentukan kebijakan yang akan diambil dalam pembangunan, sehingga pada satu sisi dapat tetap memenuhi kebutuhan hidup manusia, namun pada sisi lainnya dapat seoptimal mungkin mengurangi dampak yang terjadi.

Pada proses penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur (DIKPLHD) Tahun 2022 dilakukan penyampaian isu-isu lingkungan melalui pendapat publik, yang dihadiri oleh perwakilan dari kalangan pemerintahan daerah, pemerintahan camat dan nagari, perwakilan masyarakat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, serta anggota tim data dan tim penyusun DIKPLHD Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022. Isu lingkungan yang

diangkat adalah isu yang dominan dan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, serta pengaruhnya berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Beberapa isu lingkungan yang muncul yaitu diantaranya:

- 1) Permasalahan persampahan dan drainase pada pemukiman penduduk yang tidak terkelola dengan baik. Sering kali terjadi pembangunan perumahan namun tidak disertai dengan pembangunan drainase dan fasilitas pengelolaan sampah.
- 2) Terjadinya banyak penyakit yang mudah menyerang tubuh. Sayangnya, kondisi ini masih cenderung diabaikan oleh masyarakat, terlebih pada golongan menengah ke bawah yang tinggal di lingkungan padat penduduk. karena selain diare, penyakit ini rentan terjadi pada wilayah dengan sanitasi yang kurang baik
- 3) Masih ada ditemukan penduduk yang MCK di sungai, perlu adanya sosialisasi lingkungan sehat ke nagari-nagari melalui kelompok-kelompok tani, seperti KWT (Kelompok Tani Wanita) yang dengan sukarela menjaring pendanaan dan membangun MCK di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS), supaya tidak ada lagi masyarakat yang MCK di Sungai, dan menjaga agar lingkungan sepanjang sungai bersih dari limbah manusia.
- 4) Terjadinya banjir jika musim penghujan datang, banyak rumah penduduk terendam dan mengalami kerugian harta benda.
- 5) Isu penataan *drainase* yang tidak dirawat dan dibersihkan, sehingga menyebabkan permasalahan banjir di kawasan perumahan, bahkan ada di kawasan perumahan yang tidak memiliki aliran drainase yang jelas aliran buangnya.
- 6) Adanya lahan tandus yang tidak terkelola, sehingga menyebabkan erosi tanah dan sedimentasi pada sungai yang berada dekat dari lahan tersebut.
- 7) Masih adanya masyarakat yang membakar sampah dan membakar sisa pemotongan rumput di lahan perkebunan pada saat musim

kemarau sehingga menambah polusi udara dan dapat memicu kebakaran lahan.

- 8) Masalah persampahan terutama yang berasal dari sampah pasar, karena di setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Timur ada terdapat pasar yang menghasilkan sampah organik yang cukup banyak. Jika diolah dan dimanfaatkan bisa menjadi pupuk kompos organik.
- 9) Masih ditemukan adanya pertambangan tanpa izin yang menyebabkan terjadinya pencemaran air dan air sungai yang ada tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sungai.
- 10) Terjadinya perubahan fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan perkebunan, yang dapat berpengaruh terhadap ketersediaan pangan di Kabupaten Aceh Timur, selain itu juga berdampak terhadap ketersediaan pasokan air karena sawit banyak mengkonsumsi air tanah.
- 11) Pencemaran udara akibat aktivitas pabrik dan juga asap kabut akibat dari kebakaran hutan/lahan dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, seperti pada kasus tahun 2015, Kabupaten Aceh Timur menerima asap kiriman yang sangat pekat dari provinsi tetangga, Riau dan Jambi
- 12) Perlu adanya pengelolaan limbah domestik terpadu melalui Gerakan Masyarakat Sehat (Germas), atau dikenal dengan sanitasi total bermasyarakat yang sudah mencakup pengelolaan sanitasi masyarakat, jamban, sampah, *drainase*, limbah domestik, dll).
- 13) Penyampaian isu-isu lingkungan oleh para peserta konsultasi public tersebut akan disaring untuk diseleksi menjadi isu prioritas daerah. Melalui pelaksanaan konsultasi publik ini, diharapkan nantinya akan diperoleh isu prioritas lingkungan Kabupaten Aceh Timur minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) isu prioritas sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Juknis Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang dikeluarkan oleh

Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

3.2. PROSES PERUMUSAN ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

Isu prioritas adalah isu utama yang menjadi prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah. Isu prioritas berisikan minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) isu. Penetapan isu prioritas didasarkan pada proses partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan di daerah. Proses pelaksanaan konsultasi publik untuk menentukan isu prioritas lingkungan di Kabupaten Aceh Timur dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap persiapan, penyiapan surat permintaan data kepada dinas/kantor terkait yang ada di Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa, yaitu terdiri dari instansi pemerintahan daerah, yaitu Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Aceh Timur, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur, Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Rakyat Kabupaten Aceh Timur, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur, Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Timur, Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur, Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur, Dinas Parawisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Timur dan Kantor Pengelolaan Hutan Wilayah III Aceh, Tim Data dan Analisis, Tim Penyusun, serta dari Bidang terkait Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur.

2. Persiapan bahan data primer dan data sekunder yang telah dihimpun selama tahun 2022 yang terangkum dan disusun dalam 61 tabel utama dan analisis kondisi lingkungan berdasarkan data.
3. Partisipatif peserta melalui komunikasi Group WA juga terlihat pada saat penyampaian beberapa isu lingkungan yang sedang berkembang dan terjadi di masyarakat, sangat antusias.
4. Semua isu-isu yang ada diterima dan dicatat sebagai isu publik.
5. Kemudian ditetapkan 4 (empat) Isu Prioritas mengacu kepada data yang terkumpul.

Adapun hasil keputusan bersama dengan OPD/SKPK terkait isu prioritas lingkungan hidup pada Kabupaten Aceh Timur diperoleh 3 (Tiga) isu prioritas lingkungan hidup sebagai berikut :

1. Pengendalian Banjir
2. Pengelolaan Sanitasi
3. Pengendalian Pencemaran Air dan Udara

3.3. PENETAPAN ISU PRIORITAS LINGKUNGAN KABUPATEN ACEH TIMUR

Perumusan isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Timur dilaksanakan melalui konsultasi publik dengan melakukan penyaringan terhadap isu lingkungan yang berkembang dan dominan terjadi di masyarakat, serta kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Timur. Adapun kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan dan analisis isu prioritas adalah: kerusakan sumber daya alam; kerusakan keanekaragaman hayati; pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup; dan mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen). Konsultasi Publik dan Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup dilakukan melalui penyaringan

yang akan dituangkan dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur Tahun 2023.

Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur Tahun 2023 ditetapkan oleh Bupati Aceh Timur berdasarkan hasil Rapat antar OPD/SKPK yang ditetapkan melalui surat pernyataan dan ditandatangani oleh Bupati Aceh Timur. Adapun 3 (Tiga) isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Timur yang telah ditetapkan oleh Bupati Aceh Timur yaitu sebagai berikut :

4. Pengendalian Banjir
5. Pengelolaan Sanitasi
6. Pengendalian Pencemaran Air dan Udara

Isu prioritas lingkungan hidup yang telah ditetapkan akan diintegrasikan kedalam analisis *Pressure, state* dan *response* untuk tataguna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana dan perkotaan, serta memuat inisiatif yang dilakukan oleh kepala daerah melalui program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kedepannya dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meminimalisir isu prioritas lingkungan dalam bentuk tindak lanjut program kegiatan dan kebijakan yang akan dimuat dalam Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur Tahun 2023.

3.4. Deskripsi Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur

3.4.1 Pengelolaan Sampah

Persampahan menjadi masalah global yang dihadapi oleh seluruh kawasan. Faktor utama pendorongnya adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi, tidak diimbangi dengan skema pengelolaan sampah yang memadai, khususnya untuk sampah padat. Setiap individu akan menghasilkan sampah dari aktivitas kesehariannya, sehingga

pertambahan jumlah penduduk dipastikan akan menambah jumlah sampah.

Keseluruhan pengelolaan sampah padat di Kabupaten Aceh Timur terpusat pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Birem Bayeun. Sentra pembuangan sampah Kabupaten Aceh Timur tersebut mulai beroperasi tahun 2010 dengan luasan total 2 Ha, sebagai tempat pembuangan sampah. Pengolahan sampah pada TPA Birem Bayeun dilakukan dengan metode Control Lanfill / open dumping.

Kesimpulannya, tekanan utama permasalahan sampah adalah pertumbuhan poulasi Kabupaten Aceh Timur dan ragam aktivitas menyebabkan sampah bertambah sementara kapasitas TPA Birem Bayeun dan TPA Lhok Tujoh semakin berkurang hingga mendekati titik kritis. Hal yang menjadikan permasalahan sampah menjadi salah satu isu prioritas lingkungan Kabupaten Aceh Timur adalah:

Pressure :

- a. Pertumbuhan jumlah penduduk akan selalu diikuti dengan penambahan volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat
- b. Belum ada metode ideal dalam pengelolaan sampah TPA Birem Bayeun untuk mengurangi jumlah timbunannya secara signifikan

State :

- a. Pertumbuhan jumlah sampah akibat pertumbuhan penduduk adalah faktor yang tidak dapat dikendalikan, sementara itu TPA Birem Bayeun sebagai sentra pengolahan sampah Kabupaten Aceh Timur mendekati titik kritis kapasitasnya
- b. Belum ada sumber daya manusia dan tenaga teknis pada TPA Lhok Tujoh.

Response:

- a. Upaya untuk mereduksi sampah dari hulu atau sumbernya (masyarakat) melalui bank sampah maupun pelaksanaan 3R (reuse, reduce dan recycle) dinilai belum berjalan secara optimal

- b. Pemerintah telah memberikan izin operasional PLTsa (pembangkit listrik tenaga sampah) di TPA Lhok Tujoh yang direncanakan untuk memulai uji coba pada 2022. Pemanfaatan tersebut diperkirakan akan mampu mengurangi tumpukan sampah di TPA Lhok Tujoh secara signifikan

3.4.2 Pengendalian Banjir

Banjir merupakan sebuah bencana alam yang kerap terjadi di Kabupaten Aceh Timur, Terlalu tinggi curah hujan pada tahun 2022 telah mengakibatkan dampak sangat besar sehingga terjadinya longsor di beberapa lokasi di Kabupaten Aceh Timur. Bantuan tanggap darurat ada dari pihak pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pertimbangan untuk menjadikan banjir sebagai salah satu isu prioritas lingkungan adalah besaran dampaknya pada manusia dan kecenderungan perulangan peristiwa ini. Banjir tidak dapat dipungkiri memberikan dampak besar bagi masyarakat, terutama kerugian materiil baik akibat genangan secara langsung maupun kegiatan ekonomi yang terhambat secara tidak langsung. Tentu saja, hal tersebut kembali akan bermuara pada kerugian material yang semakin besar.

Penurunan kualitas air permukaan (sungai) akan memunculkan potensi gangguan kesehatan masyarakat yang meluas ketika air tersebut meluap sebagai banjir. Gangguan tersebut terjadi akibat pencemaran yang terjadi pada air permukaan (isu prioritas ke 2) maupun sifat alami air sebagai media yang baik bagi penyebaran penyakit (vomit). Dampak peristiwa ini salah satunya kembali pada beban ekonomi yang harus ditanggung baik oleh masyarakat maupun pemerintah setempat

Pada aspek sosial, penelitian dari Anna dan Rudiyanto (2016) menemukan bahwa berdasarkan kinerja sosial kerentanan lahan di Kabupaten Aceh Timur tergolong sedang. Kerentanan terhadap perubahan lahan Aceh Timur lebih didorong oleh kepadatan penduduk yang

menuntut perubahan lahan untuk kawasan pemukiman baru. Sosiokultural masyarakat merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari pengendalian banjir, terutama karena masyarakat menjadi bagian yang akan terdampak oleh peristiwa banjir. Kepadatan penduduk yang tinggi menekan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat untuk berperan dalam upaya pengendalian banjir. Upaya tersebut kerap kali terbentur oleh kurangnya minat masyarakat untuk berperan serta. Berdasarkan pemaparan tentang banjir, maka faktor-faktor yang menjadikan banjir layak diajukan sebagai isu prioritas lingkungan Kabupaten Aceh Timur adalah :

Pressure :

- a. Kabupaten Aceh Timur memiliki faktor alami yang mendorong potensi besar pada terjadinya banjir meliputi jenis tanah, kelerengan atau gradien lahan dan penggunaan lahan
- b. Terjadi penyempitan pada beberapa badan sungai diikuti dengan sedimentasi akibat penggunaan lahan bantaran sebagai pemukiman dan pembuangan sampah
- c. Penuaan usia drainase yang diikuti dengan anomali iklim mengakibatkan fasilitas tersebut tidak lagi mampu menampung air limpasan

State :

- a. Banjir merupakan bencana khas yang kerap kali dialami Kabupaten Aceh Timur dan saat ini berkembang tidak sekedar pada banjir luapan di bantaran sungai namun juga genangan pada area pemukiman di Kecamatan Idi Rayeuk, Banda Alam, Idi Tunong, Peureulak, Peureulak Barat, Pante Bidari, dan Indra Makmu.

Response:

- a. Pemerintah telah menetapkan kawasan rawan banjir luapan khususnya di Kecamatan Peureulak, Peureulak Barat, Pantee Bidari, Julok, dan Indra Makmu.

- b. Pemerintah telah berinisiatif menambah kawasan resapan air dengan normalisasi bantaran sungai, namun upaya ini akan membutuhkan waktu lebih panjang dan anggaran yang besar
- c. Pemerintah mulai merestorasi fasilitas drainase di beberapa kota dalam Kabupaten Aceh Timur dan memperbaiki secara fisik kondisi beberapa sungai utama

3.4.3 Sanitasi

Sanitasi adalah sebuah perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup dengan bersih dan bermaksud untuk mencegah manusia bersentuhan secara langsung dengan bahan-bahan kotor dan berbahaya yang mana perilaku ini menjadi usaha yang diharapkan bisa menjaga serta meningkatkan kesehatan manusia. Jadi, dengan kata lain pengertian dari sanitasi ini merupakan upaya yang dilakukan demi menjamin dan mewujudkan kondisi yang sudah memenuhi syarat kesehatan.

Selain itu, ada beberapa pengertian sanitasi menurut para ahli yang di antaranya adalah menurut Hopkins bahwa sanitasi merupakan cara pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh pada lingkungan. Tak jauh berbeda, Azrul Anwar mengatakan bahwa sanitasi merupakan cara pengawasan oleh masyarakat terhadap faktor-faktor lingkungan yang mungkin berpengaruh pada kesehatan masyarakat. Selain itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dikatakan bahwa sanitasi adalah usaha dalam membina serta menciptakan suatu kondisi yang baik dalam bidang kesehatan, terutama untuk kesehatan masyarakat.

Persoalan sanitasi lingkungan bukan sekadar masalah kesehatan masyarakat, melainkan masalah pengelolaan ekonomi nasional dan kualitas hidup dalam arti yang lebih luas. Oleh sebab itu, kami

berpendapat bahwa sanitasi dan pelayanan yang buruk merupakan akar dari kemiskinan.

Berdasarkan pemaparan tersebut beberapa alasan yang menjadikan permasalahan sanitasi tersebut sebagai salah satu isu prioritas lingkungan di Kabupaten Aceh Timur adalah :

Pressure :

1. sebagian besar rumah tangga memiliki akses terhadap sarana jamban, namun masih ada rumah tangga yang memiliki akses terhadap jamban membuang limbah cairnya ke tempat-tempat terbuka. penduduk perdesaan tidak memiliki akses terhadap jamban. Dengan kata lain, mereka membuang air besar di lingkungan terbuka. membuang limbahnya ke sarana-sarana pribadi dan umum yang disalurkan ke tempat pembuangan yang kurang baik kualitasnya dan ke tempat terbuka, seperti sungai. Sebagian besar pembuangan air limbah di perdesaan telah mencemari lingkungan.
2. Organisasi kemasyarakatan, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, telah turut serta meningkatkan akses masyarakat ke jamban. Model MCK komunal yang telah digagas misalnya SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat). Model ini telah dilengkapi teknologi pengolahan air limbah. Cara kerjanya menggunakan prinsip cost recovery. Prinsip ini diterapkan untuk menjaga keberlanjutan kegiatan. itu sendiri, sehingga akses masyarakat ke jamban dapat terpelihara.

State :

Salah satu dari upaya sanitasi lingkungan adalah pengelolaan pembuangan limbah kotoran manusia. Limbah kotoran manusia merupakan hasil ekskresi manusia berupa tinja dan urine. Dan merupakan media kultur yang baik bagi pertumbuhan beberapa spesies mikroba baik yang patogen maupun non patogen. Oleh sebab itu penanganan limbah tersebut harus dilaksanakan baik secara pribadi maupun kelompok.

1. Menjamin lingkungan serta tempat kerja yang bersih dan baik.

2. Melindungi setiap orang dari faktor-faktor lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan fisik maupun mental.
3. Mencegah timbulnya berbagai macam penyakit menular.
4. Mencegah terjadinya kecelakaan dan menjamin keselamatan kerja.

Response :

1. Pembuangan air limbah. Sistem pembuangan air limbah harus baik, saluran terbuat dari bahan kedap air, tidak merupakan sumber pencemar, misalnya memakai saluran tertutup, septik tank dan riol. Saluran air limbah dari dapur harus dilengkapi perangkat lemak.
2. Tempat sampah. Tempat sampah dibuat dari bahan kedap air, tidak mudah berkarat, mempunyai tutup dan memakai kantong plastik khusus untuk sisa-sisa bahan makanan dan makanan jadi yang cepat membusuk. Jumlah dan volume tempat sampah disesuaikan dengan produk sampah yang dihasilkan pada setiap tempat kegiatan.
3. Jamban harus dibuat dengan tipe leher angsa dan dilengkapi dengan air penggelontoran yang cukup serta sapu tangan kertas (*tissue*). Jumlah toilet untuk pengunjung dan tenaga kerja.
4. Peralatan pencegahan masuknya serangga dan tikus tempat penyimpanan air bersih harus tertutup sehingga dapat menahan masuknya tikus dan serangga termasuk juga nyamuk *Aedes aegypti* serta *Aedes albopictus*. Setiap lubang pada bangunan harus dipasang alat yang dapat mencegah masuknya serangga (kawat kasa berukuran 32 mata per inchi) dan tikus (teralis dengan jarak 2 cm). Setiap persilangan pipa dan dinding harus rapat sehingga tidak dapat dimasuki serangga.

3.4.1 Pengendalian Pencemaran Air dan Udara

Pencemaran merupakan konsekuensi dari aktivitas yang memanfaatkan energi dan menjadi permasalahan utama pada kawasan

perkotaan modern. Mayoritas pencemaran pada kawasan perkotaan adalah hasil dari aktivitas antropogenik. Kabupaten Aceh Timur menghadapi permasalahan pencemaran khususnya pada air permukaan (sungai) dan udara. Tekanan utama masalah pencemaran pada kedua matra tersebut di Kabupaten Aceh Timur adalah kecenderungan meningkatnya populasi masyarakat yang diiringi bertambahnya ragam aktivitas antropogenik. Pada sisi berbeda, kepedulian terhadap lingkungan dan aksesibilitas penyediaan sarana pengendali pencemaran masih rendah.

Berdasarkan pemaparan tersebut beberapa alasan yang menjadikan permasalahan pencemaran air dan udara sebagai salah satu isu prioritas lingkungan di Kabupaten Aceh Timur adalah :

Pressure :

- a. Kecenderungan peningkatan pencemaran baik pada air permukaan maupun udara sebagai konsekuensi meningkatnya aktivitas antropogenik perkotaan di Kabupaten Aceh Timur
- b. Pencemaran belum terkelola dengan baik dengan keterbatasan pada akses teknologi pengendalinya dan kurangnya kepedulian masyarakat terutama pelaku kegiatan

State :

- a. Pemerintah harus tegas menindak perusahaan industri yang membuang limbah ke sungai. Kebijakan pemerintah senantiasa mengarah kesadaran, perlindungan dan tanggung jawab lingkungan yang bersih dan sehat.

Response :

- a. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur khususnya melalui Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki program pemantauan kualitas air dan udara namun belum memiliki mekanisme evaluasi aktif dengan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pencemaran.

Dampak dari pencemaran tidak ringan bagi komunitas di sekitarnya meski tidak semuanya akan dapat langsung dirasakan. Secara umum, pencemaran akan mengakibatkan menurunnya kualitas hingga

mengakibatkan tidak dapat lagi mendukung fungsinya secara optimal, bahkan tidak lagi layak digunakan. Ketika kuantitasnya juga ikut menurun (seperti pada masalah air permukaan), maka keterpaksaan memanfaatkan akan menyebabkan permasalahan kesehatan lingkungan.

3.5. **Indek Kualitas Lingkungan Hidup**

Pada tahun 2009 KLH bekerja sama dengan DANIDA menunjuk tim konsultan untuk menyusun indeks kualitas lingkungan. Tim konsultan kemudian mengajukan konsep yang merupakan adopsi dari EPI. Selain itu BPS juga sejak tahun 2008 mengembangkan indeks kualitas lingkungan perkotaan. Dari berbagai seminar yang diadakan oleh BPS dan focus discussion group (FGD) yang diadakan oleh KLH bekerjasama dengan DANIDA, akhirnya diputuskan untuk mengadopsi konsep indeks yang dikembangkan oleh BPS dan VCU yang dimodifikasi.

Konsep IKLH, seperti yang dikembangkan oleh BPS, hanya mengambil tiga indikator kualitas lingkungan yaitu kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan. Berbeda dengan BPS, IKLH dihitung pada tingkat provinsi sehingga akan didapat indeks tingkat nasional. Perbedaan lain dari konsep yang dikembangkan oleh BPS dan VCU adalah setiap parameter pada setiap indikator digabungkan menjadi satu nilai indeks. Penggabungan parameter ini dimungkinkan karena ada ketentuan yang mengaturnya, seperti:

1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pedoman ini juga mengatur tatacara penghitungan indeks pencemaran air (IPA).
2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara.

Tabel.3.1. Indikator dan Parameter IKLH

No	Indikator	Parameter	Bobot	Keterangan
1	Kualitas		1/3	

	Udara	SO2	0,5	
		NO2	0,5	
2	Kualitas Air		1/3	Dihitung nilai indeks pencemaran air (IPA)
		Ph		
		TDS		
		DO		
		BOD		Parameter yang dihitung dalam IKLH 2009,2010 dan 2011 adalah TSS,DO,dan COD
		COD		
		NO2		
		NO3		
		NH3		
		Fosfat		
		Fenol		
		Detergen		
3	Tutupan Hutan		1/3	
		Luas Hutan Primer		Total Luas Hutan Primer dan Sekunder
		Luas Hutan Sekunder		

Penetapan parameter berdasarkan pada kelengkapan dan kontinuitas data tahun 2009 - 2011. Berdasarkan hal tersebut akhirnya ditetapkan parameter dari setiap indikator untuk perhitungan IKLH tahun 2011 sebagaimana dapat dilihat pada tabel. Parameter kualitas air, karena akan diperbandingkan dengan indeks tahun 2017 dan 2020 maka yang akan dihitung tetap tiga parameter, yaitu TSS, DO dan COD.

Ketiga indikator tersebut dianggap mempunyai tingkat kepentingan yang sama untuk setiap provinsi, sehingga bobot untuk setiap indikator ditetapkan masing-masing 1/3. Setelah didapatkan nilai indeks provinsi kemudian dihitung indeks nasional dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Perhitungan nilai indeks kualitas air dan udara mengacu pada baku mutu atau standar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (baku mutu air dan baku mutu udara ambien).

Tabel.3.2. Indek Kualitas Lingkungan Hidup Aceh Tahun 2022 Kabupaten Aceh Timur

Indek Kualitas Air

No	Kategori	Angka Rentang	Hasil IKA	Status
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$		
2.	Baik	$70 \leq x < 90$		
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$	55	SEDANG
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$		
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$		

Indek Kualitas Lahan

No	Kategori	Angka Rentang	Hasil IKL	Status
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$		
2.	Baik	$70 \leq x < 90$		
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$	67.03	SEDANG
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$		
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$		

Indek Kualitas Udara

No	Kategori	Angka Rentang	Hasil IKU	Status
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$		
2.	Baik	$70 \leq x < 90$	88.27	BAIK
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$		
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$		
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$		

Indek Kualitas Lingkungan Hidup

No	Kategori	Angka Rentang	Hasil IKLH	Status
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$		
2.	Baik	$70 \leq x < 90$	71.11	BAIK
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$		
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$		
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$		

Sumber : Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur

Indek Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022 Adalah sebesar 74.66 (Katagori Baik), Tapi belum memenuhi target yang dibebankan sebesar 74,66 (SE.04.KLHK).

Mengacu kepada RPPLH Kabupaten Aceh Timur, target IKLH Kabupaten Aceh Timur Sebesar 73.67.

3.5.1. Indek Kualitas Air

Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Data dari BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2007 sekitar 3 persen rumah tangga di Indonesia menjadikan sungai sebagai sumber air minum. Selain itu air sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik. Di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Parameter pemantauan air ditetapkan sebagai berikut :

- Derajat keasaman (Ph)
- Oksigen terlarut (DO)
- Kebutuhan oksigen biologis (BOD)
- Kebutuhan oksigen biologis kimiawi (COD)
- Pendataan tersuspensi total (TSS)
- Nitrat ($\text{NO}_3\text{-N}$)
- Total fosfat (T-phosphat)
- Fecal coliform (fecal Coli)

Karena peranannya tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Selain kualitasnya, sebenarnya ketersediaan air sungai (debit air) juga perlu dijadikan indikator. Namun karena data yang tidak tersedia, maka debit air untuk sementara tidak dimasukkan sebagai indikator.

Dalam hal ini peruntukan yang akan digunakan adalah klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Formula penghitungan indeks pencemaran adalah:

$$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$$

dimana:

$(C_i/L_{ij})_M$ adalah nilai maksimum dari C_i/L_{ij}

$(C_i/L_{ij})_R$ adalah nilai rata-rata dari C_i/L_{ij}

Evaluasi terhadap PI_j adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika $0 \leq PI_j \leq 1,0$
2. Tercemar ringan jika $1,0 < PI_j \leq 5,0$
3. Tercemar sedang jika $5,0 < PI_j \leq 10,0$
4. Tercemar berat jika $PI_j > 10,0$.

Indek kualitas Air Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022 Sebesar 63.26 (Kategori Baik) Tapi belum memenuhi target yang dibebankan sebesar 63.16 (SE.04).

3.5.2. Indek Kualitas Udara

Kualitas udara, terutama di kota-kota besar dan metropolitan, sangat dipengaruhi oleh kegiatan transportasi. Pada tahun 2008 kegiatan transportasi di Indonesia diperkirakan mengemisikan CO₂, CH₄, dan N₂O masing-masing sebesar 83 juta ton, 24 ribu ton, dan 3,9 ribu ton.

Data kualitas udara didapatkan dari pemantauan di beberapa kabupaten/kota seluruh Indonesia dengan menggunakan metode passive sampler. Dilakukan empat kali per tahun di lokasi-lokasi yang mewakili daerah permukiman, industri, dan padat lalu lintas kendaraan bermotor. Sedangkan parameter yang diukur adalah SO₂ dan NO₂.

Pengukuran kualitas udara yang dilakukan sebanyak empat kali per tahun dianggap mewakili kualitas udara tahunan untuk masing-masing parameter. Nilai konsentrasi tahunan setiap parameter adalah rata-rata dari nilai konsentrasi triwulanan. Selanjutnya nilai konsentrasi rata-rata

tersebut dikonversikan menjadi nilai indeks dalam skala 0 – 100 untuk setiap ibukota provinsi. Formula untuk konversi tersebut adalah:

$$IP_{NO_2} = \{-0,2 \times (0,177 \times \text{Konsentrasi}_{NO_2})\} + 100$$

$$IP_{SO_2} = \{-0,2 \times (0,625 \times \text{Konsentrasi}_{SO_2})\} + 100$$

Berdasarkan Tabel. 3.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Aceh Tahun 2022, Didapat Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Aceh Timur 88.47 (Katagori Baik). Tapi belum memenuhi target yang dibebankan sebesar 88.37 (SE.04).

Berdasarkan data diatas Kabupaten Aceh Timur Telah Melakukan Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Udara kearah yang lebih baik.

3.5.3. Tutupan Hutan

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan data dari program Menuju Indonesia Hijau (MIH), klasifikasi hutan terbagi atas hutan primer dan hutan sekunder. Hutan primer adalah hutan yang belum mendapatkan gangguan atau sedikit sekali mendapat gangguan manusia. Sedangkan hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh melalui suksesi sekunder alami pada lahan hutan yang telah mengalami gangguan berat seperti lahan bekas pertambangan, peternakan, dan pertanian menetap.

Untuk menghitung indeks tutupan hutan yang pertama kali dilakukan adalah menjumlahkan luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi. Nilai indeks didapatkan dengan formula:

$$ITH = \frac{LHP + LHS}{LKH}$$

dimana:

ITH = indeks tutupan hutan

LHP = luas hutan primer

LHS = luas hutan sekunder

LKH = luas kawasan hutan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan

Meskipun kerapatan hutan sekunder lebih kecil dari hutan primer namun secara alami hutan sekunder mulai membentuk hutan kembali meskipun prosesnya sangat lambat. Selain itu ada juga upaya-upaya yang dilakukan manusia untuk mempercepat proses penghutanan kembali hutan sekunder.

Membandingkan luas hutan primer dan hutan sekunder yang bersumber dari program MIH dengan luas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan barangkali kurang tepat karena mungkin lokasinya yang berbeda. Namun yang penting adalah bahwa perbandingan tersebut sedikit memberikan gambaran tentang seberapa besar kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia.

Indek Kualitas Tutupan Hutan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2022 Sebesar 70,41 (Katagori Baik), Tapi belum memenuhi target yang dibebankan sebesar 74.66 (SE.04).

BAB IV INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1.1. Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi dirumuskan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta selaras pula dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Timur 2019-2022 menetapkan visi **“Melanjutkan Pembangunan dan Tatanan Kehidupan Masyarakat Aceh Timur Yang Islami, Bermartabat, Adil dan Demokratis Berlandaskan UUPA Sebagai Wujud Implementasi MOU Helsinki Untuk Kesejahteraan Rakyat Aceh Timur”**.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi RPJMD Kabupaten Aceh Timur 2019-2022 yaitu sebagai berikut:

Penjelasan Visi pemerintah Kabupaten Aceh Timur ini adalah sebagai berikut:

1. Tatanan Kehidupan : Nilai-nilai ataupun aturan-aturan dalam kehidupan yang mengatur hubungan hidup masyarakat Aceh Timur antara satu dengan lainnya untuk menuju arah yang lebih baik.

2. Masyarakat : Komunitas yang terdiri dari individu dan kelompok-kelompok yang ada di Kabupaten Aceh Timur yang saling tergantung satu sama lainnya.
3. Islami : Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak karimah dengan melaksanakan kewajiban sesuai Syariat Islam serta senantiasa memelihara hubungan yang harmonis antar umat beragama.
4. Bermartabat : Terciptanya kondisi masyarakat Aceh Timur yang memiliki peradaban tinggi, akhlak mulia, cerdas, berwawasan luas, taat hukum, sehat sesuai dengan standar kehidupan serta terwujudnya Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang mampu melaksanakan kewenangan khusus dan istimewa yang dimilikinya.
5. Adil : Terwujudnya pembangunan yang merata, partisipatif dan proporsional sesuai dengan potensi dan keunggulan wilayah berlandaskan azas manfaat bagi kehidupan masyarakat.
6. Demokratis : Segala kegiatan pembangunan yang melibatkan seluruh masyarakat Aceh Timur baik dalam proses pelaksanaan pembangunan maupun dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
7. UUPA : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 yang merupakan andasan bagi Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan Pemerintahan secara istimewa dan khusus.
8. Kesejahteraan : Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat yang layak baik materil maupun spiritual yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat.

Visi diatas menempatkan masyarakat Kabupaten Aceh Timur sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berperan sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan. Visi yang ditetapkan merupakan keinginan masyarakat Aceh Timur yang memusatkan pada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat

beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah di masa depan.

Penjelasan Misi :

Misi yang ingin dicapai dalam pembangunan Kabupaten Aceh Timur, 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan Syariat Islam secara kaffah.

Syariat Islam adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim. Syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini, maka Syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini.

2. Meningkatkan pendidikan dayah/pasantren secara terpadu.

Dayah/pasantren adalah lembaga pendidikan Islam dan merupakan sumber pengkaderan umat Islam di bidang pemahaman, penghayatan dan pengamalan Syariat Islam secara kaffah.

3. Menjaga keberlangsungan perdamaian.

Perdamaian merupakan ujung tombak dalam memajukan pemerintahan dan pembangunan, oleh karena itu perdamaian perlu dijaga bersama.

4. Mengupayakan kelanjutan proses reintegrasi, hak-hak masyarakat korban konflik dan eks kombatan.

Reintegrasi salah satu faktor yang mendukung proses kelanjutan perdamaian yang sedang berjalan, mengupayakan melanjutkan pemenuhan hak-hak masyarakat korban konflik dan eks kombatan yang belum tertangani.

5. Mewujudkan *Good Governance* dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

6. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, menerima saran, aspirasi masyarakat serta berpartisipasi dan terbuka kepada publik.

7. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat.

Meningkatkan perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber ekonomi sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah serta menciptakan kemakmuran masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi sesuai dengan potensi unggulan masing-masing tempat.

8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan IPTEK.

Meningkatkan pelayanan umum dalam bidang kesehatan, pendidikan yang lebih maju dan persoalan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi yang sedang berkembang.

9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Meningkatkan kemampuan dan mutu sarana jalan, jembatan sebagai pilar roda perputaran kegiatan ekonomi masyarakat dan prasarana umum lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan agar tidak berdampak negatif terhadap ekosistem ke depan.

10. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan beragama, bernegara dan bermasyarakat.

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing dan mencegah aliran-aliran sesat yang meresahkan masyarakat serta membina masyarakat dalam tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

4.2 Inisiatif Kepala Daerah dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

4.2.1.Kelembagaan

Pada tahun 2016, instansi lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Timur berstatus Badan Lingkungan Hidup dengan fungsi lebih dititik beratkan pada fungsi koordinasi. Adapun struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup pada tahun 2016 terdiri dari 3 (tiga) bidang kerja dengan dengan lingkup kerja : Bidang Penataan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan PPLH, Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, dan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, serta rujukan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka melalui Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Qanun) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur, nomenklatur urusan lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Timur menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur dengan bidang tata kelola urusan bidang lingkungan hidup, persampahan dan pertamanan. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaatn Aceh Timur saat ini berstatus sebagai dinas maka fungsi kerjanya tidak hanya fungsi koordinasi tetapi juga melaksanakan fungsi teknis. Selain itu, urusan pertamanan dan persampahan langsung menjadi urusan Dinas Lingkungan Hidup. Komprehensifnya tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur tersebut dapat mengakomodir semua

lingkup fungsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan penegakan hukum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari 3 (tiga) Bidang Urusan dan 8 (delapan) Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Kelompok Jabatan Fungsional yakni Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan dan Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan. Bidang urusan dalam struktur organisasi OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur terdiri dari bidang urusan Penataan dan Petaan Lingkungan Hidup yang mengelola urusan perencanaan lingkungan seperti KLHS, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, RPPLH, kajian perencanaan lingkungan hidup lainnya, dan penyusunan regulasi lingkungan hidup. Pada bidang ini juga mengelola urusan pengawasan lingkungan hidup, pengaduan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan. Dalam kegiatan teknisnya bidang ini didukung oleh kelompok jabatan fungsional tertentu yakni Fungsional Pengawas Lingkungan dan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan. Bidang urusan selanjutnya adalah Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan mengelola urusan persampahan dan limbah B3 yang dibantu oleh UPT Pengelola Sampah dan Limbah B3 serta pengadaan dan perawatan taman-taman kota. Dan terakhir bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan serta Peningkatan Kapasitas Lingkungan yang tugas fungsinya melakukan pemantauan kualitas lingkungan dan melakukan penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan perusakan lingkungan yang didukung oleh UPT Laboratorium selaku dukungan teknis penyediaan data kualitas lingkungan.

Berikut ini struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur yang melaksanakan fungsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Timur.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup secara tugas dan fungsi mengakomodir kebutuhan tugas dan fungsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Timur. Tetapi sampai dengan saat ini untuk UPT Laboratorium Lingkungan dan UPT Pengelolaan Sampah belum aktif.

Adapun salah satu lingkup rencana operasional UPT Pengelolaan Sampah pada tahun 2019 ini antara lain menjalankan konsep pengelolaan sampah sesuai dengan Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Konsep pengelolaan sampah yang akan dikembangkan pada Kabupaten Aceh Timur adalah *sanitary landfill* sebagian yang di kerjakan pada Tempat Pemrosesan Sampah Akhir (TPA) Kabupaten Aceh Timur Kecamatan Birem Bayeun.

Kabupaten Aceh Timur Telah Menetapkan 3 (tiga) Peraturan Bupati Menyangkut pengelolaan sampah. Peraturan Bupati No. 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Kabupaten Aceh Timur Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Bupati No. 68.b Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Sampah Rumah Tangga Dan Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah.

4.2.2 Peningkatan Kapasitas Personil

Dari struktur organisasi tersebut diatas, sampai dengan saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur didukung sumber daya manusia dengan gambaran komposisi jumlah personil dan tingkat pendidikan personil tersebut sebagai berikut :

Dari 71 (tujuh puluh satu) orang pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur yang mempunyai tingkat pendidikan Sarjana sebanyak 64 orang atau sebesar 0.64%, untuk tingkat pendidikan Master sebanyak 1 orang atau sebesar 0,1%, dan tingkat D3 sebanyak 6 (enam) atau sebesar sehingga dari gambaran tersebut lebih dari 1,38% tingkat pendidikan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur mempunyai tingkat pendidikan sarjana keatas. Secara persentase tingkat pendidikan komposisinya telah cukup baik tetapi secara jumlah personil dengan adanya 3 (tiga) bidang teknis belum mencukupi kapasitasnya.

Untuk peningkatan kapasitas pegawai, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur senantiasa mengirimkan pegawainya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selama masa pandemic covid-19 Sampai saat ini tidak melakukan peningkatan sumber daya manusia (pegawai) Melalui bimbingan teknis ataupun pendidikan. saat ini diklat teknis dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diikuti oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

- Kapasitas personil dalam mengelola pengurusan izin lingkungan dengan pengenalan diklat AMDAL baik diklat Dasar – Dasar AMDAL maupun Penilai AMDAL sebanyak 1 (satu orang) pegawai yang bekerja pada bidang terkait telah mengikuti diklat tersebut, saat ini tenaga teknis tersebut telah dimutasikan ke BAPPEDA Kabupaten Aceh Timur.
- Terkait dengan tugas fungsi penegakan hukum lingkungan baik pengawasan dan penyidikan, untuk diklat Dasar-Dasar Pengawas Lingkungan (Diklat PPLH) telah diikuti oleh 1 (satu) orang personil yang telah mengikuti diklat Penyidik Pengawasan Lingkungan Hidup (Diklat PPLH), Belum ada penetapan surat keputusan Kepala Daerah.
- Fungsi evaluasi Kebijakan Rencana Program (KRP) berupa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Daya Dukung dan Daya

Tampung Lingkungan (DDDTLH), 2 (dua) orang personil Dinas Lingkungan Hidup telah mengikuti Bimbingan Teknis Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penghitungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta 2 (dua) orang telah mengikuti Bimbingan Teknis (PPLH).

- Fungsi Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Pertamanan adalah lingkup bidang kerja baru pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur. Untuk pengelolaan persampahan 2 (dua) orang personil telah mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Persampahan dan 4 (empat) orang personil telah mengikuti Bimtek Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah tinja . Fungsi pengelolaan pertamanan sampai saat penyusunan dokumen ini belum ada satupun personil lingkungan hidup yang pernah mengikuti pelatihan baik setingkat Diklat maupun Bimtek.
- Fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, sampai saat ini telah ada 2 (dua) orang personil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur telah mengikuti Diklat Pengendalian Pencemaran Air.
- Fungsi Peningkatan Kapasitas Lingkungan juga menjadi lingkup kerja bidang ini, terdapat 2 (dua) orang personil yang telah memahami tentang Program Adiwiyata, Program Proklam, Program Adipura, dan program-program peningkatan kapasitas lainnya.

4.2.3. Anggaran Kegiatan OPD Bidang Lingkungan Hidup

Kegiatan instansi lingkungan hidup dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang terakomodir dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN/DAK Bidang Lingkungan Hidup), nominal besaran anggaran pengelolaan lingkungan hidup memang tidak terlalu besar tetapi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempunyai inisiatif untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui kontribusi berbagai

kegiatan dan dukungan dari stakeholder terkait. Sebagai gambaran, pada tahun 2021 direncanakan ada Program Penghijauan di sekolah – sekolah dalam Kabupaten Aceh Timur melalui program sekolah adiwiyata dan duta lingkungan

Konsep kebijakan dari Kabupaten Aceh Timur pengembangan program kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya bergantung dari anggaran pemerintah tetapi peran serta stakeholder terkait juga dimana fungsi pemerintah adalah konseptor dan stimulator bagi stakeholder terkait dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4.2.4 Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup yang Diraih

Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021

Masa pandemic covid-19 telah berlangsung hampir dua tahun telah memporak-porandakan ekonomi dunia, ekonomi nasional dan perubahan tatanan hidup (prokes) dan proses belajar melalui daring sangat sulit dilakukan proses pemilihan duta lingkungan sehingga tidak dilaksanakan kegiatan tersebut. Selama 3 (tiga) Tahun terakhir program sekolah adiwiyata tetap kami laksanakan untuk pembinaan sekolah hijau, pihak dinas lingkungan hidup telah mendistribusikan kelengkapan pembinaan sekolah hijau sebagai berikut :

- Tahun 2017 : Pemberian tong sampah
- Tahun 2018 : Pemberian Baner dan Tanaman Hias
- Tahun 2019 : Pemberian Baner dan Tanaman Hias
- Tahun 2020 : Pemberian Baner dan Tanaman Produktif
- Tahun 2021 : pemberian Baner dan Pemberian Uang

Pembinaan 3 (Tiga) Sekolah Terbaik

Pada tahun 2021 telah di berikan uang pembinaan sekolah terbaik di Kabupaten Aceh Timur sebanyak 3 (Tiga) Sekolah terbaik, SMA Negeri Unggul Aceh Timur, SMA Negeri 1 Peureulak dan SMP Negeri 1 Peudawa

dalam Kabupaten Aceh Timur. Pihak sekolah sangat antusias dan mendukung kegiatan pembinaan sekolah adiwiyata tersebut.

4.2.5. Prioritas Program dan Kegiatan di Bidang Lingkungan

Dengan keterbatasan APBK untuk mendukung program dan kegiatan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berusaha untuk mengintegrasikan dan mensinergiskan semua sumber daya stakeholder terkait untuk mendukung dan menjalankan program dan kegiatan tersebut. Beberapa program dan kegiatan prioritas dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sedang dan akan dikembangkan penuh pada dukungan APBK Kabupaten Aceh Timur antara lain :

- Program Pengendalian, pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sangsi Upaya dan Rencana PPLH (Proper Lingkungan)
 - Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Izin Lingkungan Hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (kegiatan movev dan pelaporan)
 - Pemberian penghargaan lingkungan hidup (duta lingkungan dan adiwiyata)
 - Pasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau Izin PPLH (Inventarisasi Lingkungan)
 - Pengurangan Emisi Rumah Kaca (Kegiatan Proklim)
- Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH (Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah)
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- Pengelolaan dan pengangkutan sampah

4.2.6. Kegiatan Inovasi Pada Dinas Terkait

inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau pun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau pun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau pun proses produksinya.

Menurut Kuniyoshi Urabe, inovasi merupakan setiap kegiatan yang tidak bisa dihasilkan dengan satu kali pukul, melainkan suatu proses yang panjang dan kumulatif, meliputi banyak proses pengambilan keputusan, mulai dari penemuan gagasan hingga ke implementasi nya di pasar.

Posisi strategis pembentukan APBD dalam konteks otonomi daerah menjadi determinan untuk terwujudnya aspek-aspek yang penting dalam pembangunan daerah, begitu pula aspek terwujudnya wawasan lingkungan. Besar kecilnya kepedulian dalam proses dan hasil pembentukan APBD bagi anggaran penerapan wawasan lingkungan sangat menentukan konfigurasi baik buruknya lingkungan di daerah setempat. APBD dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang berwawasan lingkungan atau sebaliknya menjadi agen utama pengrusakan lingkungan di daerah. Otonomi daerah menjadikan posisi wawasan lingkungan sangat potensial terpinggirkan akibat orientasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mengkaji posisi rencana anggaran dari sektor lingkungan hidup dalam APBD menjadi suatu urgent, mengingat lingkungan hidup adalah persoalan keberlanjutan kehidupan dari generasi ke generasi. Alokasi anggaran juga dinilai punya peran strategis dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup. Daerah yang memiliki APBD besar

dimungkinkan memiliki anggaran lingkungan hidup yang cukup besar, terlebih jika ditambah dana lain dari APBN dan lembaga donor lainnya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur senantiasa mengalokasikan anggaran untuk sektor Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Timur, sebagai berikut :

- Pembangunan Tambak Udang oleh Dinas Perikanan untuk Budi Daya Udang Paname Dengan Sistem Kalaster, Meningkatkan Perekonomian Budidaya Udang Paname Setempat dan Sangat Mengurangi Dampak Lingkungan Pada Pemamfaatan Lahan yang terbatas
- Pengembangan Kawasan Baru Komoditi Jahe di Kecamatan Banda Alam oleh Dinas Penanaman Pangan dan Holtikultura dengan mengurangi Penggunaan Pupuk Organik Ke Pupuk an-organik
- Inseminasi Buatan Pada Ternak Sapi dan Kambing Sumber Dana DAK, Dengan Adanya Kegiatan Inseminasi Melahirkan Hewan Ternak Unggul Sehingga Dapat Meningkatkan Perekonomian Ternak Sapi dan Kambing dan Menggunakan Pakan Ternak Ramah Lingkungan.
- Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dengan Adanya Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan di Sekitar Lebih Terkendali Sehingga Tidak Menimbulkan Dampak Negatif Untuk Lingkungan Sekitar Seperti Banjir, dan sebagai nya.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Perubahan kondisi lingkungan yang terjadi saat ini telah menjadi perhatian dan tema penting baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah. Hal ini wajar terjadi karena lingkungan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Perubahan kondisi lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari berbagai macam kegiatan yang telah dilakukan oleh manusia sehingga terjadinya penurunan kualitas fungsi lingkungan baik itu penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara, perubahan sumberdaya alam, tataguna lahan dan tata kelola lingkungan, sehingga menimbulkan resiko bencana bagi kehidupan manusia itu sendiri.

Untuk mengambil kebijakan dalam rangka mengantisipasi dampak dari perubahan kondisi lingkungan, maka perlu diketahui apa penyebab utama perubahan itu terjadi, seberapa besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, serta seberapa penting penyebab perubahan lingkungan itu terjadi. Dengan mengetahui penyebab dan besaran dampak yang telah terjadi inilah selanjutnya dapat ditentukan kebijakan yang akan diambil dalam pembangunan, sehingga pada satu sisi dapat tetap memenuhi kebutuhan hidup manusia, namun pada sisi lainnya dapat seoptimal mungkin mengurangi dampak yang terjadi.

Pada proses penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur dilakukan penyampaian isu-isu lingkungan melalui pendapat publik, yang dihadiri oleh perwakilan dari kalangan pemerintahan daerah, perwakilan masyarakat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, serta anggota tim data dan tim penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur. Isu lingkungan yang diangkat adalah isu yang dominan dan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, serta pengaruhnya berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat.

Adapun kriteria yang dapat dijadikan isu prioritas adalah : kerusakan sumber daya alam; kerusakan keanekaragaman hayati; pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup; dan mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (*urgen*). Adapun hasil konsultasi publik perumusan isu prioritas lingkungan hidup pada Kabupaten Aceh Timur diperoleh 4 (lima) isu prioritas lingkungan hidup sebagai berikut :

1. Pengendalian Banjir
2. Pengelolaan Sanitasi
3. Pengendalian Pencemaran Air dan Udara

Selain dari sisi persepsi publik melalui penelaahan *pressure, statue* dan *response* dari data primer dan data sekunder diperoleh gambaran informasi sebagai berikut :

1. Tataguna lahan

- Berdasarkan tren penggunaan lahan sebagai perkebunan terjadi penurunan luasan perkebunan tahun 2019 jumlah luasan,tahun 2021 luasan lahan perkebunan masih memiliki persentase luasan tertinggi untuk jenis penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Timur yakni mencapai 64% dari jumlah luasan wilayah administratif Kabupaten Aceh Timur;
- Evaluasi kerusakan tanah di lahan kering akibat erosi air di Kabupaten Aceh Timur menunjukkan untuk tanah yang ditanami komoditi Hutan Tanaman Industri (akasia) kondisi kualitas tanah dimana hanya lapisan permukaan yakni ketebelan <50 cm yang mengalami penurunan kualitasnya sehingga diluar baku mutu PP 150 Tahun 2000, sedangkan untuk lahan yang ditanami komoditi kelapa sawit kualitas tanahnya masih memenuhi baku mutu PP 150 Tahun 2000;

- Luas areal pertambangan jenis galian c mencapai 9 ribu ton/tahun, Tetapi jumlah luasan pertambangan galian c di Kabupaten Aceh Timur mencapai 57.65 Ha yang terdapat di beberapa kecamatan.

2. Kualitas air

- Beberapa tekanan terhadap lingkungan yang menyebabkan penurunan kualitas air antara lain: perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi lahan terbuka sehingga mengurangi *catchment* area, kerusakan Sumber Daya Alam (SDA) akibat kegiatan Pertambangan Tanpa izin (PETI), kondisi kualitas kehidupan masyarakat seperti ketersediaan fasilitas MCK, peningkatan jumlah penduduk suatu wilayah yang tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, pengelolaan limbah padat dan cair masih belum terkelola dengan baik, begitu juga untuk pengelolaan limbah B3 padat dan limbah B3 cair,
- Kondisi kualitas air di Kabupaten Aceh Timur sebagai berikut :
 1. Perhitungan Indeks Pencemaran Air (IPA) tahun 2021 telah dilakukan berdasarkan hasil analisis konsentrasi dari beberapa parameter, parameter DO menunjukan nilai tercemar ringan disemua sungai. Parameter COD juga tercemar tinggi di beberapa sungai, perlu ditingkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran dalam hal pengambilan titik sampel yang banyak dan dilakukan dalam 2 (dua) priode setahun.
 2. Kualitas Air Tanah atau Sumur yang ada di Kabupaten Aceh Timur rata-rata masih belum memenuhi kriteria baku mutu untuk parameter kimia anorganik dan mikrobiologi, sehingga untuk dapat dijadikan air baku harus dilakukan pengelolaan yang baik.
 3. Kualitas air danau/embung yang ada di Kabupaten Aceh Timur juga tercemar parameter COD pada satu lokasi danau.

- Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 1. Menanam tanaman penyangga seperti rumput vetifer disekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk menghindari terjadinya erosi pada bibir sungai dan menambah areal resapan air dengan meningkatkan fungsi ekohidrologis;
 2. Bentuk kebijakan lainnya yaitu melalui sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat melalui program dan kegiatan penyuluhan;
 3. Sosialisasi dan edukasi tentang pengelolaan lingkungan hidup pada lingkungan sekitar tempat tinggal, serta pembinaan tentang pengolahan persampahan dan prinsip 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) kepada masyarakat, pembentukan Bank Sampah dan kelompok peduli sampah, dan pelarangan membuang sampah disekitar DAS, serta membuat papan informasi tentang pengelolaan lingkungan hidup di sekitar DAS;
 4. Penertiban usaha/kegiatan disekitar DAS yaitu dengan melakukan kegiatan inventarisasi terhadap usaha/kegiatan yang telah atau belum memiliki izin lingkungan dan dokumen lingkungan yang ada di Kabupaten Aceh Timur, dan melaksanakan pengawasan rutin 1-4 bulan, serta memberikan teguran secara lisan maupun tertulis terhadap usaha/kegiatan menurut tingkat ketaatannya dalam melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 5. Melakukukan pemantauan kondisi dan kualitas air sungai melalui program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada kegiatan pemantauan kualitas lingkungan yang rutin dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun;

6. Memantau debit air sungai DAS Krueng Peureulak untuk menghindari terjadinya banjir besar dikala musim penghujan dengan curah hujan tinggi;
7. Membuat DAM atau bendungan di sekitar sepadan DAS sebagai salah satu upaya memperkuat tebing pada bibir sungai dan menghindari terjadinya erosi;
8. Pengendalian pencemaran air dan pengelolaan sumber air juga dilakukan oleh masyarakat, seperti membuat lubang larangan yang berisi ikan bertuah pada aliran sungai yang ada di lingkungan tempat tinggal, dan hanya akan dipanen pada waktu-waktu tertentu dengan izin kepala suku/adat. Ini telah menjadi kearifan lokal pada beberapa nagari yang ada di Kabupaten Aceh Timur;

3. Kualitas Udara

- Beberapa tekanan terhadap lingkungan yang menyebabkan penurunan kualitas udara antara lain : perubahan iklim secara global di seluruh dunia telah menjadi isu lingkungan, tidak hanya di tingkat internasional, namun juga nasional dan daerah, pencemaran yang disebabkan oleh emisi sumber tak bergerak yaitu yang berasal dari penggunaan bahan bakar minyak, gas dan bahan bakar lainnya untuk kegiatan industri atau usaha/kegiatan pengolahan melalui tungku bakar, cerobong mesin *boiler* atau genset, pencemaran oleh emisi sumber bergerak yang berasal dari penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, kebakaran hutan atau lahan yang dipicu oleh pembukaan lahan baru dan ditemukannya titik panas dan titik api pada beberapa lokasi di Kabupaten Aceh Timur.
- Adapun kondisi kualitas udara dapat terlihat dari informasi antara lain :

1. Kualitas udara ambien di Kabupaten Aceh Timur tergolong baik dengan nilai rata-rata Indeks Pencemaran Udara (IPU) sebesar 88,27.
- Respon yang dilakukan pemerintah daerah antara lain :
 1. Pemerintah Daerah bersama masyarakat ikut aktif terlibat dalam menggerakkan Program Kampung Iklim sebagai Program Nasional dengan menerapkan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Kegiatan ini didukung oleh anggaran APBK Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur dalam Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Kegiatan Pengembangan Dampak Perubahan Iklim;
 2. Uji Kier kendaraan bermotor berkala;
 3. Melakukan pengawasan terhadap usaha/kegiatan sesuai dengan dokumen lingkungannya;

4. Resiko Bencana

Kabupaten Aceh Timur merupakan kawasan rawan bencana khususnya banjir dan tanah longsor. Salah satu upaya yang dapat ditempuh kembali melalui mitigasi untuk mempersiapkan adaptasi dan masyarakat yang siap menghadapi bencana. Beberapa saran yang dapat diajukan terkait penanggulangan bencana antara lain

- Pelengkapan data bencana sebagai data dasar dalam penyusunan ataupun analisis mitigasi bencana kota
- Peningkatan kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi masyarakat khususnya pada pemukiman-pemukiman yang teridentifikasi rawan bencana untuk membentuk kesiapan menghadapi bencana

- Menyusun dan membuat sistem peringatan dini (early warning system) bencana alam yang mudah diakses, diminati dan dimengerti oleh masyarakat

5. Perkotaan

Kawasan perkotaan (urban) adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011-2031, sistem perkotaan yang direncanakan pada Kabupaten Aceh Timur yaitu sebagai berikut: Adapun kondisi lingkungannya sebagai berikut :

1. Peningkatan Good Governance dan Akuntabel Penyelenggaraan Pemerintahan yang Aspiratif, Partisipatif dan Transparan.
2. Peningkatan Pembangunan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi serta Optimalisasi Potensi Basis Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Sosial Dasar Lainnya serta Pemanfaatan IPTEK.
4. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Publik yang Memadai serta Pemerhatian Terhadap Kelestaian Lingkungan Hidup.

1.2. Saran Tindak Lanjut

Diperlukan perencanaan yang matang dan terpadu dalam usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diharapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (RPPLHD) segera dapat tersusun untuk dapat mensinergikan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap RPJMD serta program dan kegiatan pemerintah daerah. Selanjutnya beberapa konsep inovasi tersebut diatas belum dapat menghasilkan dampak yang signifikan terkait

perbaikan kualitas lingkungan, diperlukan sinergisitas antara semua *stakeholder* baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, pelaku usaha, masyarakat dalam menjalankan program yang berbasis perbaikan kualitas lingkungan. Selain sinergisitas *stakeholder*, diperlukan juga kerja sama yang erat secara ekoregion dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, penerapan konsep jasa lingkungan pada wilayah lainnya seperti konsep jasa lingkungan kualitas air Sungai Bayeun antara daerah hulu dan hilir untuk mendorong dan memotivasi daerah hulu Sungai Peureulak dan Arakundo dalam menjaga kualitas lingkungan.

Tabel - 1.

Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RT/RW dan Tutupan Lahannya Kabupaten Aceh Timur Tahun. 2022

1	2	Nama Kawasan		Luas Kawasan (Ha)	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area	Tanah	Badan
						Terbangun	Terbuka	Air
3	4	5	6	7	8	9		
Kawasan Lindung	Kawasan lindung terhadap kawasan bawahanya	1	Kawasan Hutan Lindung	167,317,22	-	-	-	-
		2	Kawasan Bergambut					
		3	Kawasan Resapan air					
	Kawasan Perlindungan setempat	1	Sempadan pantai	1,116,44				
		2	Sempadan Sungai	9,742,56				
		3	Kawasan Sengkitar Danau					
		4	Ruang Terbuka Hijau	-	-	-	-	-
	Kawasan Suaka, alam pelestarian alam dan Cagar budaya	1	Kawasan Suaka alam	-	-	-	-	-
		2	Kawasan suaka laut dan perairan	-	-	-	-	-
		3	Suaka margasatwa dan margasatwa laut	-	-	-	-	-
		4	Cagar alam Cagar Alam Geologi	118,183,74	-	-	-	-
		5	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	-	-	-	-	-
		6	Taman nasional dan taman nasional	-	-	-	-	-
		7	Taman wisata alam dan taman wisata laut	-	-	-	-	-
		8	Kawasan Cagar Alam dan Kawasan Ilmu Budanya	-	-	-	-	-
Kawasan Rawan Bencana	1	Kawasan Rawan Tanah Longsor	134,31	-	-	-	-	
	2	Kawana Rawan Gelombang Besar	-	-	-	-	-	
	3	Kawasan Rawan Banjir	630,01	-	-	-	-	
Kawasan Lindung Geologi	1	Kawasan Cagar Alam	i	Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil	-	-	-	-
			ii	Kawasan Keuanikan Bentang Alam	-	-	-	-
			iii	Kawasan Keunikan Proses Geologi	118,183,74	-	-	-
	2	Kawasan Rawan Bencana	i	Kawasan Rawan Rawan Letusan	-	-	-	-

	Gunggung Berapi					
	ii Kawasan Rawan Gempa Bumi	-	-	-	-	-
	iii Kawasan Rawan Gerakan Tanah	134,31	-	-	-	-
	iv Kawasan yang Terletak di Zona Patahan Aktif	-	-	-	-	-
	v Kawasan Rawan Tsunami	5,764,77	-	-	-	-
	vi Kawasan Rawan Abrasi	294,04	-	-	-	-

			vii Kawasan Rawan Gas Beracun	-	-	-	-	-
		3 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah	i Kawasan Imbuhan Air Tanah	118,157,25	-	-	-	-
			ii Sempada Mata Air	-	-	-	-	-
Kawasan Lindung Lainnya		1 Cagar Biosfit		-	-	-	-	-
		2 Ramsar		-	-	-	-	-
		3 Taman Baru		-	-	-	-	-
		4 Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah		-	-	-	-	-
		5 Kawasan Pengungsiaan Satwa		-	-	-	-	-
		6 Terumbu Karang		-	-	-	-	-
		7 Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa atau Biota Laut yang Dilindungi		-	-	-	-	-
Kawasan Budidanya	Kawasan Hutan Produksi			93.023,26	-	-	-	-
	Kawasan Pertanian	1 Lahan Kering		40.843,91	-	-	-	-
		2 Lahan Basanh		14.853,28	-	-	-	-
	Kawasan Perikanan			12.545,14	-	-	-	-
	Kawasan Industri	1 Industri Menengah		51.31	-	-	-	-
		2 Industri Kecil dan Mikro		7.28	-	-	-	-
	Kawasan Pertambangan			641.651,67	-	-	-	-
	Kawasan Parawisata	1 Tegu Monisa		-	-	-	-	-
		2 Meriam		-	-	-	-	-
	Kawasan Pemukiman	1 Perkotaan		1.961,10	-	-	-	-
		2 Perdesaan		10.765,62	-	-	-	-
	Kawasan Peruntukan Lainnya	1 Kawasan TNI		-	-	-	-	-
		2 Kawasan POLRI		-	-	-	-	-
		3 Kawasan Trans Migrasi		8.168,66	-	-	-	-

Keterangan : Data Tahun 2020

Sumber : BAPPEDA Aceh Timur

Tabel. 2
Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama di Kabupaten Aceh Timur
Tahun : 2022

No	Kecamatan	Luas Lahan Non Pertanian (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Perkebunan (Ha)	Luas Lahan Hutan (Ha)	Luas Lahan Badan Air (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Serbajadi	79,444	371	71,730	15,000	50,003	18
2	Simpang Jernih	39,425	83	43,119	523	1,313	-
3	Peunaron	673	677	2,109	2,274	2,241	-
4	Birem Bayeun	6,610	308	9,505	7,350	1,595	-
5	Rantau Seulamat	6,974	214	7,424	896	472	-
6	Sungai Raya	4,797	644	4,477	5,200	3,782	-
7	Peureulak	7,317	2,420	5,969	12,642	200	3,254
8	Peureulak Timur	4,622	414	4,021	6,516	855	1,842
9	Peureulak Barat	5,225	1,667	1,446	840	40	12
10	Rantau Peureulak	2,580	1,559	2,644	6,000	117	-
11	Idi Rayeuk	2,393	439	4,327	177	-	624
12	Peudawa	1,515	672	2,046	2,166	1,491	-
13	Banda Alam	1,980	484	6,162	-	463	6
14	Idi Tunong	2,649	520	3,672	-	629	-
15	Darul Ikhsan	621	277	2,046	1,677	829	-
16	Idi Timur	765	248	2,174	2,209	-	119
17	Darul Aman	4,131	852	4,924	1,200	2,043	-
18	Nurussalam	5,373	1,063	1,966	4,026	-	1,279
19	Darul Falah	1,054	279	1,537	620	750	-
20	Julok	9,911	785	5,737	5,290	-	1,713
21	Indra Makmur	722	287	1,967	5,883	44	2
22	Pante Bidari	11,143	1,648	6,304	1,340	2,890	-
23	Simpang Ulim	4,883	1,361	2,786	906	-	2,444
24	Madat	2,625	2,181	3,715	150	-	11,413
Total		207,432	19,453	201,807	82,885	69,757	22,726

Keterangan : Data Tahun 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur

Tabel. 3
Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status di Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2022

No.	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
1	2	3
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		-
1	Hutan Produksi	93.023,26
2	Hutan Lindung	167.317,22
3	Taman Nasional	-
4	Taman Wisata Alam	-
5	Taman Buru	-
6	Cagar Alam Serba Jadi	300,41
7	Suaka Margasatwa	-
8	Taman Hutan Raya	-
B. Berdasarkan Status Hukum		-
1	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	-
2	Hutan Hak/Hutan Rakyat	-
3	Hutan Kota	-
4	Taman Hutan Raya	-
5	Taman Keanekaragaman Hayati	-

Keterangan : Data Tahun 2021

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur

Tabel. 4
Keadaan Flora dan Founa di Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2022

No	Gololongan	Nama Spesies			Status		
		Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hewanmenyusui	1	1	-	-	-	-
		2	2	-	-	-	-
		3	3	-	-	-	-
2	Burung	1	1	-	-	-	-
		2	2	-	-	-	-
		3	3	-	-	-	-
3	Reptil	1	1	-	-	-	-
		2	2	-	-	-	-
		3	3	-	-	-	-
4	Amphibi	1	1	-	-	-	-
		2	2	-	-	-	-
		3	3	-	-	-	-
5	Ikan	1	1	-	-	-	-
		2	2	-	-	-	-
		3	3	-	-	-	-
6	Keong	1	1	-	-	-	-
		2	2	-	-	-	-
		3	3	-	-	-	-
7	Serangga	1	1	-	-	-	-
		2	2	-	-	-	-
		3	3	-	-	-	-
8	Tumbuh Tumbuhan	1	1	-	-	-	-
		2	2	-	-	-	-
		3	3	-	-	-	-

Keterangan : Tidak ada data

Sumber

Tabel - 5.
Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar Kabupaten Aceh Timur
Tahun: 2022

No.	Nama Perusahaan	SK	Jenis Satwa Yang ditangkarkan
1	2	3	4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Keterangan : Tidak ada data

Sumber :

Tabel. 6**Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan****Tahun :2022**

No.	Kabupaten/ Kota/ Kecamatan	Kritis (Ha)		Sangat Kritis (Ha)		Potensi Kritis (Ha)		Agak Kritis (Ha)		Tidak Kritis (Ha)	
		Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan : Tidak ada data

Sumber :

Tabel. 7**Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air****Tahun 2022**

No.	Loksdi	Tebal Tanah	Ambang Kritis Erosi (150/2000) (mm/ 10 Tahun)	Besaran erosi (mm / 10 Tahun	Status Melebihi / Tidak
1	2	3	4	5	6
1		< 20 cm	0,2 – 1,3	-	-
2		20 - < 50 cm	1,3 - < 4	-	-
3		50 - < 100 cm	4,0 - < 9,0	-	-
4		100 – 150 cm	9,0 – 12	-	-
5		> 150 cm	> 12	-	-

Keterangan : Tidak ada data

Sumber :

Tabel - 8.
Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering
Tahun 2022

No.	Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil	Status
				Pengamatan	Melebihi/Tidak
1	2	3	4	5	6
1		Ketebalan Solum	< 20 cm	-	-
2		Kebatuan Permukaan	> 40 %	-	-
3.A		Komposisi Fraksi	< 18 % koloid;	-	-
3.B		Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	-	-
4		Berat Isi	> 1,4 g/cm ³	-	-
5		Porositas Total	< 30 % ; > 70 %	-	-
6		Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0 cm/jam	-	-
7		pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	-	-
8		Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	-	-
9		Redoks	< 200 mV	-	-
10		Jumlah Mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	-	-

Keterangan : Tidak ada data

Sumber :

Tabel. 9
Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah
Tahun : 2022

No.	Lokssi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Melebihi/Tidak
1	2	3	4	5	6
1		Subsistensi Gambut di atas pasir kuarsa	> 35 cm/tahun untuk ketebalan gambut \geq 3 m atau 10% / 5 tahun untuk ketebalan gambut < 3 m	-	-
2		Kedalaman Lapisan Berpirit dari permukaan tanah	< 25 cm dengan pH \leq 2,5	-	-
3		Kedalaman Air Tanah dangkal	> 25 cm	-	-

Keterangan : Tidak ada data

Sumber :

Tabel. 10
Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove
Tahun : 2022

No.	Lokasi	Luas Lokasi (Ha)	Persentase tutupan (%)	Kerapatan (pohon/Ha)
1	2	3	4	5
1	Serbajadi	-	-	-
2	Simpang Jernih	-	-	-
3	Peunaron	-	-	-
4	Birem Bayeun	-	-	-
5	Rantau Selamat	-	-	-
6	Sungai Raya	-	-	-
7	Peureulak	-	-	-
8	Peureulak Timur	-	-	-
9	Peureulak Barat	-	-	-
10	Rantau Peureulak	-	-	-
11	Idi Rayeuk	-	-	-
12	Peudawa	-	-	-
13	Banda Alam	-	-	-
14	Idi Tunong	-	-	-
15	Darul Ikhsan	-	-	-
16	Idi Timur	-	-	-
17	Darul Aman	-	-	-
18	Nurussalam	-	-	-
19	Darul Falah	-	-	-
20	Julok	-	-	-
21	Indra Makmur	-	-	-
22	Pante Bidari	-	-	-
23	Simpang Ulim	-	-	-
24	Madat	-	-	-

Keterangan : Tidak ada data

Sumber :

Tabel. 11
Luas dan Kerusakan Padang Lamun
Tahun : 2022

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase Area Kerusakan (%)
1	2	3	4
1	Serbajadi	-	-
2	Simpang Jernih	-	-
3	Peunaron	-	-
4	Birem Bayeun	-	-
5	Rantau Selamat	-	-
6	Sungai Raya	-	-
7	Peureulak	-	-
8	Peureulak Timur	-	-
9	Peureulak Barat	-	-
10	Rantau Peureulak	-	-
11	Idi Rayeuk	-	-
12	Peudawa	-	-
13	Banda Alam	-	-
14	Idi Tunong	-	-
15	Darul Ikhsan	-	-
16	Idi Timur	-	-
17	Darul Aman	-	-
18	Nurussalam	-	-
19	Darul Falah	-	-
20	Julok	-	-
21	Indra Makmur	-	-
22	Pante Bidari	-	-
23	Simpang Ulim	-	-
24	Madat	-	-

Keterangan : Tidak ada data

Sumber :

Tabel. 12
Luas Tutupandan Kondisi Terumbu Karang
Tahun : 2022

No.	Kecamatan	Luas Tutupan (Ha)	SangatBaik (%)	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Serbajadi	-	-	-	-	-
2	Simpang Jernih	-	-	-	-	-
3	Peunaron	-	-	-	-	-
4	Birem Bayeun	-	-	-	-	-
5	Rantau Selamat	-	-	-	-	-
6	Sungai Raya	-	-	-	-	-
7	Peureulak	-	-	-	-	-
8	Peureulak Timur	-	-	-	-	-
9	Peureulak Barat	-	-	-	-	-
10	Rantau Peureulak	-	-	-	-	-
11	Idi Rayeuk	-	-	-	-	-
12	Peudawa	-	-	-	-	-
13	Banda Alam	-	-	-	-	-
14	Idi Tunong	-	-	-	-	-
15	Darul Ikhsan	-	-	-	-	-
16	Idi Timur	-	-	-	-	-
17	Darul Aman	-	-	-	-	-
18	Nurussalam	-	-	-	-	-
19	Darul Falah	-	-	-	-	-
20	Julok	-	-	-	-	-
21	Indra Makmur	-	-	-	-	-
22	Pante Bidari	-	-	-	-	-
23	Simpang Ulim	-	-	-	-	-
24	Madat	-	-	-	-	-

Keterangan : Tidak ada data

Sumber :

Tabel. 13**Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian di Kabupaten Aceh Timur****Tahun : 2022**

No.	Jenis Penggunaan Baru	Luas Lama (Ha)	Luas Baru (Ha)
1	2	3	4
1	Permukiman Perkantoran dan sungai		207,432
2	Industri		-
3	Sawah		19,453
4	Tanah kering		-
A.	Tegal/Kebun		68,239
B.	Ladang/huma		73,455
C.	Perkebunan		82,885
D.	Hutan Rakyat		4,936
E.	Padang Pengembalaan/padang rumput		1,330
F.	Hutan Negara		64,821
G.	Sementara Tidak di usahakan		58,783
H.	Lainya, Tambak,Kolam, Empang, Dll		22,726
5	Perkebunan		-
6	Semak belukar		-
7	Tanah kosong		-
8	Perairan/kolam		-
9	Lainnya (sebutkan)		-
Jumlah		Luas Aceh Timur	604,060

Keterangan : Data Tahun 2021

Sumber : Dinas Pertanian dan hortikultura kabupaten aceh timur

Tabel. 14
Jenis Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Aceh Timur
Tahun : 2022

No.	Jenis Pemanfaatan Lahan	Jumlah	Skala Usaha	Luas	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tambang	Besar	-	-
			Menengah	-	-
			Kecil	-	-
			Rakyat	-	-
2	Perkebunan	...	Besar	-	-
			Menengah	-	-
			Kecil	-	-
			Rakyat	-	-
3	Pertanian	...	Besar	-	-
			Menengah	-	-
			Kecil	-	-
			Rakyat	-	-
4	Pemanfaatan Hutan	...	Besar	-	-
			Menengah	-	-
			Kecil	-	-
			Rakyat	-	-

Keterangan : Tidak ada data

Sumber :

Tabel. 15**Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian di Kabupaten Aceh Timur****Tahun : 2022**

No.	Lokasi	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
1	Tanah	CV. HAJAR ALAM	10	-	-	-
2	Pasir	CV. ANEUK	1	-	-	-
3	Tanah	UD. CITRA	2	-	-	-
4	Tanah	UD. KELUARGA	1	-	-	-
5	Tanah	UD. BEUTARI	2	-	-	-
6	Tanah	SAID HUSEIN	1	-	-	-
7	Tanah	MONT BATEE	1	-	-	-
8	Pasir	MUSLEM	1,88	-	-	-
9	Tanah	T.	2	-	-	-
10	Tanah	TAHIROE JAYA	1	-	-	-
11	Tanah	ZULKIFLI JAYA	1	-	-	-
12	Tanah	MUHAMMAD	2	-	-	-
13	Pasir	NURDIN SAAD	1,47	-	-	-
14	Pasir	M. JUNED	2	-	-	-
15	Tanah	ZAINAL ABIDIN	12.7	-	-	-
16	Tanah dan	KUD PURNAMA JAYA	2	-	-	-
17	Tanah	MITRAZ	2	-	-	-
18	Pasir dan	RUSLI RANTO, SH.	0.95	-	-	-
19	Tanah	BERSAMA	1	-	-	-
20	Pasir	KASAT ARINA	1,8	-	-	-
21	Tanah	RIDWAN S.Pd.MM	2	-	-	-
22	Tanah	Drs. T. SYAHRUL	2	-	-	-
23	Tanah	M. NUDIR	2	-	30,000	-
24	Tanah	SAFRIJAL	1,4	-	-	-
25	Tanah	IBRIHAM ALI	1	-	-	-
26	Tanah	YUSRI	1,7	-	-	-
27	Tanah	BUSTAMI	2	-	-	-
28	Sirtu	UD. PAYA PASI	2	-	-	-
29	Tanah	SYAKIRIN	1,7	-	30,000	-
30	Tanah	TARMIZI	2	-	30,000	-

Keterangan : Data Tahun 2022

Sumber : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ACEH TIMUR

Tabel. 16
Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi di Kabupaten Aceh Timur
Tahun : 2022

No.	Kecamatan	Lokasi Penanaman	Penghijauan				Reboisasi		
			Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)	Jumlah Pohon Hidup Batang	Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Serbajadi	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Simpang Jernih	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Peunaron	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Birem Bayeun	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Rantau Selamat	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sungai Raya	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Peureulak	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Peureulak Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Peureulak Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Rantau Peureulak	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Idi Rayeuk	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Peudawa	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Banda Alam	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Idi Tunong	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Darul Ikhsan	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Idi Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Darul Aman	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nurussalam	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Darul Falah	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Julok	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Indra Makmur	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Pante Bidari	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Simpang Ulim	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Madat	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan : Tidak ada data

Sumber :

Tabel. 17
Luas dan Kerusakan Lahan Gambut di Kabupaten Aceh Timur
Tahun : 2022

No.	Kecamatan	Lokasi	Luas (Ha)	kedalaman (M)	Prosentase Kerusakan (%)	Penyebab Kerusakan
1	2	3	4	5	6	7
1	Serbajadi	-	-	-	-	-
2	Simpang Jernih	-	-	-	-	-
3	Peunaron	-	-	-	-	-
4	Birem Bayeun	-	-	-	-	-
5	Rantau Selamat	-	-	-	-	-
6	Sungai Raya	-	-	-	-	-
7	Peureulak	-	-	-	-	-
8	Peureulak Timur	-	-	-	-	-
9	Peureulak Barat	-	-	-	-	-
10	Rantau Peureulak	-	-	-	-	-
11	Idi Rayeuk	-	-	-	-	-
12	Peudawa	-	-	-	-	-
13	Banda Alam	-	-	-	-	-
14	Idi Tunong	-	-	-	-	-
15	Darul Ikhsan	-	-	-	-	-
16	Idi Timur	-	-	-	-	-
17	Darul Aman	-	-	-	-	-
18	Nurussalam	-	-	-	-	-
19	Darul Falah	-	-	-	-	-
20	Julok	-	-	-	-	-
21	Indra Makmur	-	-	-	-	-
22	Pante Bidari	-	-	-	-	-
23	Simpang Ulim	-	-	-	-	-
24	Madat	-	-	-	-	-

Keterangan : Tidak ada data

Sumber :

Tabel. 18
Jumlah dan Produksi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Tahun : 2022

No.	Kecamatan	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
1	2	3	4	5	6
1	Serbajadi	-	-	-	-
2	Simpang Jernih	-	-	-	-
3	Peunaron	-	-	-	-
4	Birem Bayeun	-	-	-	-
5	Rantau Selamat	-	-	-	-
6	Sungai Raya	-	-	-	-
7	Peureulak	-	-	-	-
8	Peureulak Timur	-	-	-	-
9	Peureulak Barat	-	-	-	-
10	Rantau Peureulak	-	-	-	-
11	Idi Rayeuk	-	-	-	-
12	Peudawa	-	-	-	-
13	Banda Alam	-	-	-	-
14	Idi Tunong	-	-	-	-
15	Darul Ikhsan	-	-	-	-
16	Idi Timur	-	-	-	-
17	Darul Aman	-	-	-	-
18	Nurussalam	-	-	-	-
19	Darul Falah	-	-	-	-
20	Julok	-	-	-	-
21	Indra Makmur	-	-	-	-
22	Pante Bidari	-	-	-	-
23	Simpang Ulim	-	-	-	-
24	Madat	-	-	-	-

Keterangan : Tidak ada data

Sumber :

Tabel. 19**Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kabupaten Aceh Timur
Tahun : 2022**

No	Kecamatan	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Serbajadi	-	-	-
2	Simpang Jernih	-	-	-
3	Peunaron	-	-	-
4	Birem Bayeun	-	-	-
5	Rantau Selamat	-	-	-
6	Sungai Raya	-	-	-
7	Peureulak	-	-	-
8	Peureulak Timur	-	-	-
9	Peureulak Barat	-	-	-
10	Rantau Peureulak	-	-	-
11	Idi Rayeuk	-	-	-
12	Peudawa	-	-	-
13	Banda Alam	-	-	-
14	Idi Tunong	-	-	-
15	Darul Ikhsan	-	-	-
16	Idi Timur	-	-	-
17	Darul Aman	-	-	-
18	Nurussalam	-	-	-
19	Darul Falah	-	-	-
20	Julok	-	-	-
21	Indra Makmur	-	-	-
22	Pante Bidari	-	-	-
23	Simpang Ulim	-	-	-
24	Madat	-	-	-

Keterangan : Tidak ada data

Sumber :

Tabel. 20
Perdagangan Satwa dan Tumbuhan
Tahun : 2022

No.	Nama Spesies	Bagian-bagian yang diperdagangkan	Status menurut CITES
1	2	3	4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Keterangan : Tidak ada data

Sumber :

Tabel. 21
Jumlah dan Ijin usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
Kabupaten Aceh Timur
Tahun : 2022

No.	Jenis IUPJLWA							SK
	Nama Perusahaan	Luas Pemanfaatan Jasa Aliran Air (Ha)	Luas Pemanfaatan Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	Luas Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Ha)	Luas Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (Ha)	Luas Penyerapan Karbon (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan : Tidak ada data

Sumber :

Tabel. 24
Curah Hujan Rata - Rata Bulanan
Kabupaten Aceh Timur
Tahun : 2022

No.	Nama dan Lokasi Stasiun Pengamatan	Titik Koordinat		Bulan											
		Latitude	Longitude	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ACEH TIMUR			107	53	31	114	123	108	270	116	192	176	223	466
2	DISTARA			488	25	92	149	133	125	145	194	96	188	166	328

Keterangan : Data Tahun 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur

Tabel. 25
Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum
Kabupaten Aceh Timur
Tahun : 2022

No.	Kecamatan	Puskesmas	Mata Air	Ledeng/PAM	Sumur	Sungai	Hujan	Kemasan	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Serbajadi	Lokup	1552	0	101		0	1	
2	Simpang Jernih	Simpang Jernih	821	0	170		209	0	
3	Peunaron	Peunaron	116	1055	431		2814	1339	
4	Birem Bayeun	Birem Bayeun	630	0	3266		0	4500	
5	Rantau Selamat	Ranto Seulamat	0	495	960		12	5	
6	Sungai Raya	Sungai Raya	0	0	2539		0	0	
7	Peureulak	Peureulak	0	16248	4779		0	0	
		Lubok Pempeng	265	3264	501		735	580	
8	Peureulak Timur	Peureulak Timur	220	0	5017		60	423	
9	Peureulak Barat	Peureulak Barat	0	1157	7827		0	788	
10	Rantau Peureulak	Ranto Peureulak	0	3849	3811		0	5613	
11	Idi Rayeuk	Idi Rayeuk	0	218	14306		0	2302	
12	Peudawa	Peudawa	0	340	3332		0	658	
13	Banda Alam	Keude Gerobak	953	0	4582		89	0	
14	Idi Tunong	Idi Tunong	0	0	1030		0	1	
15	Darul Ihsan	Darul Ihsan	0	40	478		6	2	
16	Idi Timur	Idi Timur	1	11	2336		0	0	
17	Darul Aman	Darul Aman	0	169	19059		0	1732	
18	Nurussalam	Nurussalam	0	312	4272		0	2	
19	Darul Falah	Darul Falah	1	0	528		0	1	
20	Julok	Julok	0	4964	0		4	8931	
21	Indra Makmur	Aleu Ie Mirah	462	0	629		0	138	
		Perkebunan Inti	157	0	485		0	618	
22	Pante Bidari	Matang Pudeng	48	244	6943		0	0	
		Pantee Bidari	0	1796	6708		0	0	
23	Simpang Ulim	Simpang Ulim	6	7796	6606		230	0	
24	Madat	Madat	0	2922	16329		0	0	
TOTAL			5,232	44,880	117,025	-	4,159	27,634	-

Keterangan : Data Tahun 2021

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur

BUKU KERJA		PENDUDUK DENGAN AKSES BERKELANJUTAN TERHADAP AIR MINUM BERKUALITAS (LAYAK)																				ACEH TIMUR			TRIWULAN/PERTAHUN			FORM PL2							
NO	PUSKESMAS	PENDUDUK	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN																				TAHUN 2018			IV/2018			PENDUDUK DENGAN AKSES BERKELANJUTAN TERHADAP AIR MINUM LAYAK	Jumlah	%				
			SUMUR GALI TERLINDUNG				SUMUR GALI DENGAN POMPA				SUMUR BOR DENGAN POMPA				TERMINAL AIR				MATA AIR TERLINDUNG				PENAMPUNGAN AIR HUJAN				PERPIPAAN (PDAM,BPSPAM)								
			Jumlah Sarana	Jumlah Penduduk Pengguna	Memenuhi Syarat		Jumlah Sarana	Jumlah Penduduk Pengguna	Memenuhi Syarat		Jumlah Sarana	Jumlah Penduduk Pengguna	Memenuhi Syarat		Jumlah Sarana	Jumlah Penduduk Pengguna	Memenuhi Syarat		Jumlah Sarana	Jumlah Penduduk Pengguna	Memenuhi Syarat		Jumlah Sarana	Jumlah Penduduk Pengguna	Memenuhi Syarat		Jumlah Sarana	Jumlah Penduduk Pengguna				Memenuhi Syarat		Jumlah Sarana	Jumlah Penduduk Pengguna
1		3			4	5			6	7			8	9			10	11			12	13			14	15			16	17	18	19	20		
1	Darul Aman	Darul Aman	19,437	3,705	19,437	3,395	17,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	697	0	0	17,094	88			
2	Keude Geureubak	Keude Geureubak	8,458	348	1392	248	992	0	0	0	0	25	177	25	177	0	0	0	0	2	27	2	27	0	0	0	0	0	0	0	0	1,196	14		
3	Simpang Jernih	Simpang Jernih	3,876	6	20	6	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508	2437	506	2437	199	722	199	722	0	0	0	0	3,179	82		
4	Darul Ihsan	Darul Ihsan	6,740	490	3,748	490	3,748	0	0	0	0	203	1,647	203	1,647	0	0	0	0	0	0	0	6	42	6	42	40	230	40	230	5,667	84			
5	Peureulak Barat	Peureulak Barat	16,394	1839	9665	1405	8698	0	0	0	0	646	3814	597	3605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,707	71		
6	Peunaron	Peunaron	10,025	112	399	112	399	22	90	22	90	0	0	0	0	0	0	0	0	21	66	21	66	761	2743	761	2743	286	1029	286	1029	4,327	43		
7	Birem Bayeun	Birem Bayeun	26,303	1896	7584	1896	7584	5	20	5	20	834	3336	834	3336	0	0	0	0	219	876	219	876	0	0	0	0	0	0	0	0	11,816	44		
8	Peureulak Timur	Peureulak Timur	14,884	438	5,045	438	4,762	271	557	161	341	496	3,583	484	3,637	0	0	0	0	102	220	102	220	30	60	30	60	30	180	30	180	9,200	62		
9	Serbaladi	Lokoo	7,548	68	470	68	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	5629	34	5629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,099	80		
10	Madat	Madat	27,320	3,872	15,488	3,347	13,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428	1712	428	1712	15,100	55			
11	Sungai Raya	Sungai Raya	12,285	700	6,279	443	2539	508	2,445	48	240	362	3561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,779	23		
12	Julik	Julik	25,434	0	0	0	0	3285	16425	3029	15415	508	2,485	428	2,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,541	7705	1,541	7705	25,260	99			
13	Simpang Ulim	Simpang Ulim	20,577	3,872	15,488	3,347	16,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428	1,712	428	2,140	18,875	92			
14	Rantau Seulamat	Rantau Seulamat	12,119	952	4,484	234	1,143	134	672	0	0	516	1,962	272	1,044	0	0	0	0	0	0	0	1	132	1	132	5	1,087	5	1,137	3,456	29			
15	Indra Makmu	1. Perik Inli Alue Te Itam 2. Alue Te Mirah	6,107	86	293	51	168	136	517	92	301	648	1815	583	1731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200	36			
16	Pseudawa	Pseudawa	11,770	347	1388	302	1206	1088	4272	278	1112	761	3044	442	1768	50	202	44	176	203	812	80	320	81	324	30	120	432	1728	216	864	5,568	47		
17	Peudawa	Peudawa	12,980	624	3722	299	2957	784	4640	440	3805	442	3545	405	3285	1	110	1	110	0	0	0	0	0	0	0	1	340	1	225	10,162	78			
18	Peureulak	Peureulak	35,027	792	3,878	0	0	148	4,380	0	0	142	1,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,401	13,914	0	0	0	0	0		
19	Idi Rayeuk	Idi Rayeuk	38,135	1,411	7,571	1,400	7571	1666	9117	1675	9117	384	2,034	384	2,034	2,997	13,568	2,997	13,568	0	0	0	0	0	0	0	1,838	3,409	1,838	3,409	35,699	94			
20	Ranto Peureulak	Ranto Peureulak	23,619	1,560	6,243	1272	5088	2834	11336	2675	10700	465	1860	456	1824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045	4,180	1045	4180	21,792	92			
21	Idi Tunong	Idi Tunong	10,665	1,034	6,449	740	4,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,569	43		
22	Pante Bidari	1. Matano Pudeng 2. Pante Bidari	10,978	1769	6885	861	3444	0	0	0	0	26	104	20	80	0	0	0	0	96	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	128	0	3,524	32
23	Nurussalam	Nurussalam	14,602	2,246	8,984	1,633	6,532	0	0	0	0	251	1004	217	868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606	2,424	606	2,424	9,824	67			
24	Idi Timur	Idi Timur	17,606	2,561	9,536	960	4,279	22	165	14	73	368	780	253	390	16	0	0	0	0	0	0	2	10	0	0	352	919	352	919	5,661	32			
25	Darul Fatah	Darul Fatah	6,387	595	2,611	595	2,611	197	1,005	197	1,005	375	1,875	375	1,875	0	0	0	1	1	1	5	0	0	0	0	15	15	15	75	5,571	87			
26	Jumlah (KAB/KOTA)	Jumlah (KAB/KOTA)	3,679	720	3600	556	2796	0	0	0	0	86	525	86	525	0	0	0	1	16	1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	3,326	90			
			403,655	32063	150458	24098	118185	11063	55641	8636	42019	7538	38246	6064	29950	3064	13880	3042	13854	1186	10468	966	9595	1080	4033	1027	3819	10655	41409	6831	26229	243,651	60,3611995		

Sumber: Penanganjwab Program Kesehatan Lingkungan Puskesmas Aceh Timur Tahun 2018

Tabel. 26
Kualitas Air Hujan
Kabupaten Aceh Timur
Tahun : 2022

Lokasi Pemantauan	Titik Koordinat		Waktu Pemantauan	pH	DHL	SO ₄	NO ₃	Cr	NH ₄	Na	Ca ²⁺	Mg ²⁺
	Lotitude	Longitud										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan : Tidak Ada Data

Sumber :

Tabel. 27
Kondisi Sungai
Kabupaten Aceh Timur
Tahun : 2022

No.	Nama Sungai	Lokasi	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sungai Peureulak	165,50	75	50	3-4	43,80	6,32	-
2.	Sungai Arakundo	22	140	80	10	237,24	23,72	-
3.	Sungai Idi Rayeuk	42	80	50	4	10,46	0,59	-

Keterangan : DATA TAHUN 2020

Sumber : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR

Tabel. 28
Kondisi Danau / Waduk / Situ / Embung
Kabupaten Aceh Timur
Tahun : 2022

No.	Nama Danau/Waduk/Situ/Embung	Lokasi	Luas(Ha)	Volume(m3)
1	2	3	4	5
1	D.I ALUE MBOI-MBOI	1.5 X 1.5	22,500.00	-
2	D.I ALUE NIBONG	1.8 X 2	36,000.00	-
3	D.I ALUE RANGEN	1.0 X1	10,000.00	-
4	D.I BLANG KUMAHANG	1.0 X 1.2	12,000.00	-
5	D.I PASIR PUTIH	1.0 X 2.0	20,000.00	-
6	D.I PAYA ENJEE	1.2 X 1.5	18,000.00	-
7	D.I PAYA KEUTAPANG	2.0 X 1.8	36,000.00	-
8	D.I SEUNEUBOK DALAM	1.8 X.0	36,000.00	-
9	D. I ALUE CANTEK	1.0 X 1.0	10,000.00	-
10	D.I ALUE DUA	1.0 X 1.0	10,000.00	-
11	D.I ALUE RAMBONG	1.5 X 1.5	22,500.00	-
12	D.I BLANG BAROM	1.0 X 1.0	10,000.00	-
13	D.I BUKIT HITAM	2.0 X 2.0	40,000.00	-
14	D.I BUKIT SIRAJA	1.5 X 2.0	30,000.00	-
15	D.I LHOK RAMBONG	1.5 X 1.0	15,000.00	-
16	D.I PAYA PASI	1.5 X 1.2	18,000.00	-
17	D.I PAYA PUA	12.0 X 1,2	144,000.00	-
18	D.I PAYA UNO	2.0 X 1.6	32,000.00	-
19	D.I SEUNEUBOK JALAN	1.0 X 1.2	12,000.00	-
20	D.I MERBAU DUA	1.5 X 2.0	30,000.00	-
21	D.I JUNGKA GAJAH	1.5 X 2.0	30,000.00	-
22	D.I UTEUN DAMA	6.0 X 2.2	132,000.00	-

Keterangan : Data Tahun 2020

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Aceh Timur

Tabel 29
Kualitas Air Sungai
Kabupaten Aceh Timur
Tahun : 2022

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	pH	DHL(µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorinbebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	MinyakdanLemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/ 100 ml)	Total coliform (jmlh/ 100ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)	
			Lintang	Bujur				9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Sungai Asamera	a. Gp. Kliet Peureulak	04.45'29,68"	097.48'00,34"	4/4/2022	6,90	155,6	107,9	26	6,92	2,07	17,06						<0,07		0,371	0,15	226	12.997			
		b. Gp. Kliet Peureulak	04.45'29,68"	097.48'00,34"	25/08/2022	6,91	218,3	110	24	7,04	2,09	16							0,246		1,0	<0,025	53,8	1.723,9		
2	Sungai Pasar Peureulak	a. Gp. Tanjong Tualang	04.48'40,9"	097.53'27,3"	4/4/2022	6,97	25,5	20,3	30	7,17	7,17	18,34						0,016		0,415	0,12	605,0	5.475			
		b. Gp. Tanjong Tualang	04.48'40,9"	097.53'27,3"	25/08/2022	6,95	180,3	92	25	6,27	2,05	17,00							0,095		1,2	0,12	64,4	920,8		
3	Sungai Peureulak	a. Gp. Matang Aron	04.51'02,6"	097.53'57,2"	4/4/2022	6,99	216,1	199,2	42,5	6,40	2,26	13,60						0,136		0,389	0,11	4611	24.196			
4	Sungai Bayeun	a. Birem Bayeun			18/11/2022	6,60		79,0	21	72,913	213,312	25,03						0,179		1,0	0,025	1046,2				
		b. Birem Bayeun			18/11/2022	6,96		73,0	23	69,035	252,096	18,78							0,144		0,8	0,11	816,4			
		c. Birem Bayeun			18/11/2022	7,15		90,1	27	69,423	2.598,528	23,78							0,091		1,0	0,06	98,7			
5	Sungai Arakundo	a. Gp. Blang Glem			18/11/2022	7,23		73,0	26	74,853	2.637,312	19,41						0,10		1,2	1,10	1986,3				
		b. Gp. Blang Glem			18/11/2022	7,37		74,1	21	70,199,00	2.676,096	22,53							0,119		1,4	0,21	1299,7			
		c. Gp. Blang Glem			18/11/2022	7,33		76,8	28,5	72,913,00	2.171,904,00	20,03							0,175		0,8	0,03	261,3			

Keterangan : Data Tahun 2021

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur

Tabel. 30
Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung
Kabupaten Aceh Timur
Tahun : 2022

No	Nama	Waktu sampling (g/btu/ thn)	Titik Koordinat		Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (mg/L)	Detergen (mg/L)	Fecal coliform (pnib/ 100 ml)	Total coliform (pnib/ 100 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
			Lintang	Bujur																						
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28
1	Danau ...																									
2	Situ ...																									
3	Embung ...																									
	Tambung ...																									

Keterangan :

Sumber :

Tabel. 31
Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar
Kabupaten Aceh Timur
Tahun : 2022

No.	Kecamatan	Jumlah KK	Fasilitas Tempat Buang Air Besar			
			Sendiri	Bersama	Umum	Sungai
1	2	3	4	5	6	7
1	Serbajadi	1965	1458	37		
2	Simpang Jernih	885	393	24		
3	Peunaron	2513	1046	184		
4	Birem Bayeun	7356	6222	486		
5	Rantau Selamat	3078	2231	13		
6	Sungai Raya	2625	1999	80		
7	Peureulak	11442	8962	1702		
8	Peureulak Timur	3377	3109	103		
9	Peureulak Barat	4289	3363	23		
10	Rantau Peureulak	6992	6698	180		
11	Idi Rayeuk	8758	6872	33		
12	Peudawa	3388	2290	12		
13	Banda Alam	1958	1165	68		
14	Idi Tunong	2506	1908	5		
15	Darul Ikhsan	1857	1046	26		
16	Idi Timur	1691	1159	320		
17	Darul Aman	4390	3902	0		
18	Nurussalam	4226	3429	304		
19	Darul Falah	953	830	30		
20	Julok	5609	3930	243		
21	Indra Makmur	8247	502	295		
22	Pante Bidari	6045	4173	355		
23	Simpang Ulim	4601	3431	447		
24	Madat	7025	4811	1053		
		105,776	74,929	6,023		

Keterangan : Data Tahun 2021

Sumber : DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TIMUR

Tabel. 32
Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan
Kabupaten Aceh Timur
Tahun : 2022

No.	Kecamatan	Tidak Sekolah		SD		SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2		S3	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Serbajadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Simpang Jernih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Peunaron	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Birem Bayeun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Rantau Selamat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sungai Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Peureulak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Peureulak Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Peureulak Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Rantau Peureulak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Idi Rayeuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Peudawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Banda Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Idi Tunong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Darul Ikhsan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Idi Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Darul Aman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nurussalam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Darul Falah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Julok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Indra Makmur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Pante Bidari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Simpang Ulim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Madat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan : Tidak Ada Data

Sumber :

Tabel. 33
Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk
Kabupaten Aceh Timur
Tahun : 2022

No.	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
1	2	3
PENYAKIT RAWAT JALAN		
1	COMMON COLD	20432
2	ISPA AKUT LAINYA	28291
3	DYSPEPSIA	20870
4	RHEOMATHOID ATTHRITIS	9442
5	DERMATITIS ALERGI	17284
6	GASTRITIS	7734
7	HIPERTENSI	5711
8	ALERGI	2264
9	PENYAKIT KULIT KARNA INFEKSI	2033
10	DIABETES MELITUS	3201
PENYAKIT RAWAT INAP		
1	GASTRITIS	281
2	THYPOID FAVER	287
3	DYSPEPSIA	284
4	GEA / DIARE	106
5	OBS. FEBRIS	238
6	HYPERTENSI	233
7	ASMA BRONCHIALE	83
8	GE	106
9	DIABETES MELITUS	70
10	DISPEPSIA LIKE ULCER	86

Keterangan : DATA TAHUN 2021

Sumber : DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TIMUR

BUKU KERJA		PENDUDUK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (MENURUT JENIS JAMBAN									
NO	PUSKESMAS	JUMLAH PENDUDUK	KOMUNAL					LEHER ANGS			
			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEI	
					JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	%			JUMLAH SARANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Darul Aman	Darul Aman	19437	11	0	11	-	#DIV/0!	1,195	16,339	1,147
2	Keude Geuruebak	Keude Geuruebak	8458	21	335	21	335	100	684	2465	684
3	Simpang Jernih	Simpang Jernih	3876	0	0	0	0	#DIV/0!	348	1745	248
4	Darul Ihsan	Darul Ihsan	6740	22	248	20	248	100	952	4,254	952
5	Peureulak Barat	Peureulak Barat	16394	17	286	17	286	100	1535	9328	1532
6	Peunaron	Peunaron	10025	0	0	0	0	#DIV/0!	494	1703	452
7	Birem Bayeun	Birem Bayeun	26903	15	336	15	336	100	3,030	12,120	3,021
8	Peureulak Timur	Peureulak Timur	14990	0	0	0	0	#DIV/0!	1,431	5,397	1,431
9	Serbajadi	Lokop	7801	0	0	0	0	#DIV/0!	1025	5024	1025
10	Madat	Madat	27320	0	0	0	0	#DIV/0!	2,775	11,100	2,202
11	Sungai Raya	Sungai Raya	12285	72	290	71	285	98.27586	1,570	6,279	1,569
12	Julok	Julok	25434	269	1345	269	1,076	80	3,244	13,149	3,155
13	Simpang Ulim	Simpang Ulim	20577	0	0	0	0	#DIV/0!	2,627	7,771	2,627
14	Rantau Seulamat	Rantau Seulamat	12119	22	98	13	33	33.67347	1371	5,413	1132
15	Indra Makmu	1. Perk Inti Alue l'e Itam	6107	0	0	0	0	#DIV/0!	975	4045	975

JAMBA SEHAT)	ACEH TIMUR						TRIWULAN/PERTAHUN						FORM PL4	
	TAHUN 2018						IV/2018							
JENIS SARANA JAMBAN												PENDUDUK DENGAN AKSES SANITASI LAYAK (JAMBAN SEHAT)		
TAHUN 2018				CEMPLUNG				CEMPLUNG						
MEMENUHI SYARAT				MEMENUHI SYARAT				MEMENUHI SYARAT				JUMLAH	%	
JUMLAH PENDUDUK PENGUNGAN A	% PENDUDUK PENGUNGAN	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGUNGAN	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGUNGAN A	% PENDUDUK PENGUNGAN A	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGUNGAN	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGUNGAN A	% PENDUDUK PENGUNGAN			
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
3,769	23.07	42	53	18	53	100	744	2,429	744	2,093	86.17	5,915	30	
2465	100	0	0	0	0	#DIV/0!	495	1614	495	1614	100	4,414	52	
1745	100.00	0	0	0	0	#DIV/0!	111	176	105	167	95	1,912	49	
4,254	100.00	41	183	41	183	100	119	664	119	664	100	5,349	79	
9328	100	301	1569	233	1319	84	776	3819	349	2090	55	13,023	79	
1703	100	156	574	158	574	100	708	2492	688	2492	100	4,769	48	
12,084	99.70	1,686	6,744	556	2,224	33	590	2,360	115	460	19	15,104	56	
5,397	100	199	1,065	116	1,065	100	533	1,893	212	1,893	100	8,355	56	
5024	100	0	0	0	0	#DIV/0!	6	30	6	30	100	5,054	65	
11,010	99.19	142	778	125	220	28	1,999	7,826	1,888	7,188	100	18,418	67	
6,276	99.95	538	2,155	518	2,072	96	901	3,561	901	3,561	100	12,194	99	
12,793	97.29	207	828	165	660	80	803	3,212	644	2,576	100	17,105	67	
7,771	100.00	741	2,397	741	2,397	100	770	2,944	770	2,971	101	13,139	64	
3,635	67.15	274	1058	49	200	19	266	1117	3	10	1	3,878	32	
4015	99	87	493	87	463	94	50	345	45	295	86	4,773	78	

	Alue I'e Mirah	2. Alue I'e Mirah	11770	35	181	35	181	100	860	4300	842
16	Peudawa	Peudawa	12980	3	53	3	25	47.16981	824	4351	658
17	Peureulak	Peureulak	35027	8	0	8	-	#DIV/0!	3,347	16,687	3,347
18	Idi Rayeuk	Idi Rayeuk	38135	0	0	0	0	#DIV/0!	5981	24649	5981
19	Ranto Peureulak	Ranto Peureulak	23619	0	0	0	0	#DIV/0!	2,602	10,408	2,602
20	Idi Tunong	Idi Tunong	10655	0	0	0	0	#DIV/0!	819	5,476	819
21	Pante Bidari	1. Matang Pudeng	10978	3	40	0	0	0	896	3584	896
		2. Pante Bidari	14602	419	1668	419	1668	100	1539	6132	1533
22	Nurussalam	Nurussalam	17606	0	0	0	0	#DIV/0!	1,671	6,731	1,643
23	Idi Timur	Idi Timur	6387	0	0	0	0	#DIV/0!	597	2,985	597
24	Darul Falah	Darul Falah	3,679	0	0	0	0	#DIV/0!	722	2888	382
JUMLAH (KAB/KOTA)			403,904	917	4880	902	4,473	92	43114	194323	41452

Sumber: Penanggungjawab Program Kesehatan Lingkungan Puskesmas Aceh Timur Tahun 2018

4210	98	165	935	165	935	100	457	2453	227	1226	50	6,552	56
3951	91	22	159	19	102	64	454	1892	99	1695	90	5,773	44
16,687	100.00	49	1,463	49	1,463	100	730	4,374	730	4,374	100	22,524	64
24649	100	764	2786	764	2786	100	1178	4628	1178	4628	100	32,063	84
10,408	100.00	1,999	7,996	1,905	7,620	95	1,130	4,520	212	848	19	18,876	80
5,476	100.00	0	0	0	0	#DIV/0!	509	2,916	509	2,916	100.00	8,392	79
3584	100	95	380	95	380	100	1054	4221	1054	4221	100	8,185	75
6132	100	117	468	117	468	100	533	2132	533	2132	100	10,400	71
6,731	100.00	486	1,833	486	1,833	100	1,044	3,452	1,044	3,452	100	12,016	68
2,985	100.00	81	355	81	355	100	266	1,116	286	1,116	100	4,456	70
1960	68	84	336	44	220	65	171	684	104	520	76	2,700	73
178042	92	8276	34608	6532	27592	80	16397	66870	13060	55232	83	265,339	65.69358065

Tabel. 34

Jumlah Rumah Tangga Miskin

Kabupaten Aceh Timur

Tahun : 2022

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Miskin	Prosentase Rumah Tangga miskin
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Aceh Timur	-	62340	14,08

Keterangan : DATA TAHUN 2022

Sumber : BPS ACEH TIMUR

Tabel. 35
Jumlah Limbah Padat dan Cair berdasarkan Sumber Pencemaran
Kabupaten Aceh Timur
Tahun : 2022

No.	Sumber Pencemaran	Lokasi	Type/ Jenis/ Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (Ton/ Hari	Volume Limbah (m3 / hari	Jumlah Limbah B3 Padat (Ton/ Hari	Jumlah Limbah B3 Cair (m3/tahun)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	a. Bergerak :	-	-	-	-	-	-	-
	1.	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
	Dst	-	-	-	-	-	-	-
	b. Tidak Bergerak	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-	-	-
	Dst	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan : Tidak Ada Data

Sumber :

Tabel. 36
Suhu Udara Rata-Rata Bulanan
Kabupaten Aceh Timur
Tahun : 2022

No	Nama dan Lokasi Stasiun	Lokasi	Titik Koordinat		Suhu Udara Rata-Rata Bulanan (⁰ C)											
			Latitude	Longitude	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dst															

Keterangan : Tidak Ada Data

Sumber :

Tabel. 37
Kualitas Udara Ambien
Kabupaten Aceh Timur
Tahun : 2022

No	Lokasi	Totik Koordinat		Lama Pengukuran	SO ₂ (µg/Nm ³)	CO (µg/Nm ³)	NO ₂ (µg/Nm ³)	O ₃ (µg/Nm ³)	HC (µg/Nm ³)	PM10 (µg/Nm ³)	PM2,5 (µg/Nm ³)	TSP (µg/Nm ³)	Pb (µg/Nm ³)	Dustfall (µg/Nm ³)	Total Fluorides Sebagai F	Fluor Index (µg/Nm ³)	Kadmium dan Klorine	Sulfat Index (µg/Nm ³)
		Latitude	Longitude															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. Tahap I																		
1	Jln. B. Aceh - Medan Titi Baro, Kec. Idi Raveuk	4.935733	97.7823	14 Hari	14.4		11.3											
2	Desa Aramiyah Kec. Birem Bayeun	4.570433	97.919267	14 Hari	9.28		3.89											
3	Desa Alue bu Tuha Kec. Peureulak Barat	4.866278	97.854528	14 Hari	6.55		4.42											
4	Jln. B. Aceh - Medan Titi Baro, Kec. Idi Raveuk	4.92585	97.78665	14 Hari	7.96		4.16											
5	Blak Sample			14 Hari	<2,57		<0,41											
B. Tahap II																		
1	Jln. B. Aceh - Medan Titi Baro, Kec. Idi Raveuk	4.935733	97.7823	14 Hari	29.21		17.74											
2	Desa Aramiyah Kec. Birem Bayeun	4.570433	97.919267	14 Hari	7.7		4.92											
3	Desa Alue bu Tuha Kec. Peureulak Barat	4.866278	97.854528	14 Hari	6.32		4.73											
4	Jln. B. Aceh - Medan Titi Baro, Kec. Idi Raveuk	4.92585	97.78665	14 Hari	3.89		4.05											
5	Blak Sample			14 Hari	<0,41		<2,57											

Keterangan : Data Tahun 2021

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur

Tabel. 38
Penggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga
Kabupaten Aceh Timur
Tahun : 2022

No.	Penggunaan	Minyak Bakar	Minyak Diesel	Minyak Tanah	Gas	Batubara	LPG	Briket	Kayu Bakar	Biomassa	Bensin	Solar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Industri :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Kimia dasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Mesin dan logam dasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Industri Kecil	-	-	-	386516	-	-	-	183004	-	-	1285840
4	Aneka Industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Rumah Tangga :	-	-	-	135649	-	-	-	2664	-	-	-

Keterangan : Tahun 2022

Sumber : Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Aceh Timur

Tabel. 39

**Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Bahan Bakar yang di gunakan
Kabupaten Aceh Timur
Tahun : 2022**

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah (Unit)			
		Jumlah	Bensin	Solar	Gas
1	2	3	4	5	6
1	Mobil Beban	51		√	
2	Penumpang pribadi	302	√	√	
3	Penumpang umum	0		√	
4	Bus besarp ribadi	0			
5	Bus besar umum	0		√	
6	Bus kecil pribadi	23			
7	Bus kecil umum	2271		√	
8	Truk besar	197		√	
9	Truk kecil	550	√		
10	Roda tiga	0	√		
11	Roda dua	27147	√		

Keterangan : Data Tahun 2021

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur

Tabel. 40
Tabel Perubahan Penambahan Ruas Jalan
Kabupaten Aceh Timur
Tahun : 2022

No	Kelas Jalan	Panjang Jalan dua tahun terakhir (Km)	
		tahun	tahun
1	2	3	4
1	Jalan Bebas Hambatan	-	-
2	Jalan Raya	-	-
3	Jalan Sedang	-	-
4	Jalan Kecil	-	-

Keterangan : Tidak Ada Data

Sumber :

Tabel. 41
Dokumen Izin Lingkungan
Kabupaten Aceh Timur
Tahun : 2022

No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilaian	Pemrakarsa	Dokumen
1	2	3	4	5	6	7
1	10/11/21	SPPL	ENDANG GUSRINA	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
2	10/11/21	SPPL	MAKDAN KADI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
3	10/11/21	SPPL	SYAHRUL SAIFUDDIN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
4	10/11/21	SPPL	PATONI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
5	11/11/21	SPPL	ENDAR RIA NAULI PANE	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
6	11/11/21	SPPL	AISYAH ISMAIL	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
7	11/11/21	SPPL	MUZAKIR	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
8	11/11/21	SPPL	NIDARLI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
9	14/11/21	SPPL	ERASIAH	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
10	14/11/21	SPPL	SALMIAH	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
11	14/11/21	SPPL	SAMIUN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
12	14/11/21	SPPL	LINA WATI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
13	14/11/21	SPPL	RADIAH	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
14	14/11/21	SPPL	MAHARANI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
15	14/11/21	SPPL	INTAN NURLIANA	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
16	14/11/21	SPPL	HENDRA SYAHPUTRA	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
17	14/11/21	SPPL	HENDRA SYAHPUTRA	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
18	15/11/21	SPPL	SUTRISNO	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
19	15/11/21	SPPL	MASRIZAL	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
20	15/11/21	PKKPR Darat	GLOBAL TIMUR ENERGI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
21	16/11/21	SPPL	BUKHARI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
22	16/11/21	SPPL	BUKHARI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
23	16/11/21	SPPL	MUHAMMAD HILMI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
24	16/11/21	SPPL	SYAIFUL	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
25	16/11/21	SPPL	MUKHTAR	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
26	16/11/21	SPPL	NASRUL HADI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
27	17/11/21	SPPL	NILAWATIH	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
28	17/11/21	Sertifikat Standar	BUMI AND SONS LESTARI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
29	17/11/21	Persetujuan PKPLH	BUMI AND SONS LESTARI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
30	18/11/21	SPPL	RAZALI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
31	18/11/21	SPPL	AMAT SAH	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
32	18/11/21	SPPL	PAHRI SIREGAR	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
33	18/11/21	SPPL	MAT ASA	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
34	18/11/21	SPPL	YUSNIDAR	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
35	18/11/21	SPPL	DAHLAN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
36	18/11/21	SPPL	MAT DOLAH	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
37	18/11/21	SPPL	ABD LATIF	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
38	18/11/21	SPPL	AIYUB	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
39	18/11/21	SPPL	HUSNI H M NUR	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
40	18/11/21	SPPL	JAFAR SIDIK	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
41	19/11/21	SPPL	MARIAMAN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
42	19/11/21	SPPL	ASNAWI AB	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
43	19/11/21	SPPL	JUMAR	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
44	19/11/21	SPPL	RAMLI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
45	19/11/21	SPPL	SURYA DARMA	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
46	19/11/21	SPPL	SYAFRUDDIN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
47	19/11/21	SPPL	SURYATI PANJAITAN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
48	19/11/21	SPPL	DESNAL SIANTURI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
49	19/11/21	SPPL	JONI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
50	19/11/21	SPPL	RAFFLES SEPARLIN SIANTURI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
51	19/11/21	SPPL	MARIANA	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
52	19/11/21	SPPL	SRI WAHYUNI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
53	19/11/21	SPPL	SUDIRMAN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
54	19/11/21	SPPL	SUHADA	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
55	19/11/21	SPPL	JUMIAH	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
56	20/11/21	SPPL	HARIANTO	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
57	20/11/21	SPPL	HARIANTO	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
58	20/11/21	SPPL	M ZAINI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
59	21/11/21	SPPL	AMIRUDDIN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
60	21/11/21	SPPL	M SANIF EFENDI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
61	21/11/21	SPPL	ASRI YANTO	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
62	21/11/21	SPPL	LEGINO	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
63	21/11/21	SPPL	ABDUL QADIM	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
64	22/11/21	SPPL	DUTA NIAGA MANDIRI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
65	22/11/21	SPPL	IDA FITRIANA	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
66	22/11/21	SPPL	MARIHAH	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
67	22/11/21	SPPL	HALIMAH	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
68	24/11/21	SPPL	ADNAN AHMAD	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
69	24/11/21	SPPL	M ZUBIR	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
70	24/11/21	SPPL	M ZUBIR	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		

No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilaian	Pembrakarsa	Dukumen
71	24/11/21	SPPL	M ZUBIR	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
72	24/11/21	SPPL	M ZUBIR	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
73	24/11/21	SPPL	ANWAR	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
74	24/11/21	SPPL	NGATINO	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
75	24/11/21	SPPL	MUNAWIR AYUDI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
76	24/11/21	SPPL	LISA	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
77	24/11/21	Sertifikat Standar	TEUKU NYAK ALFIAN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
78	24/11/21	SPPL	AMIRULLAH	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
79	24/11/21	SPPL	ABD WAHAB	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
80	24/11/21	SPPL	ROYANDRI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
81	24/11/21	SPPL	DONY AFRIZAL	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
82	24/11/21	SPPL	RAHMAN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
83	24/11/21	SPPL	WAHIDIN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
84	24/11/21	SPPL	MITRA SEJAGAT	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
85	24/11/21	SPPL	ABDUL JAMAL	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
86	24/11/21	SPPL	BUKHARI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
87	24/11/21	SPPL	MUNIR YASIN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
88	24/11/21	SPPL	ADNAN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
89	24/11/21	SPPL	ABU BAKAR	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
90	24/11/21	SPPL	AZHARI USMAN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
91	25/11/21	SPPL	ANWAR	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
92	25/11/21	SPPL	AGUS MULIADI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
93	25/11/21	SPPL	DAHLAN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
94	25/11/21	SPPL	EFENDI HASAN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
95	25/11/21	SPPL	FITRIANA	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
96	25/11/21	SPPL	IDRIS BEN HASAN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
97	25/11/21	SPPL	ILYAS	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
98	25/11/21	SPPL	ISMAIL	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
99	25/11/21	SPPL	JAMALUDDIN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
100	25/11/21	SPPL	KAMARUDDIN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
101	25/11/21	SPPL	M JAFAR D	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
102	25/11/21	SPPL	ABU HINDI ALASYI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
103	25/11/21	SPPL	NURHAYATI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
104	25/11/21	SPPL	MJAFAR	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
105	25/11/21	SPPL	M.NURDIN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
106	25/11/21	SPPL	M.THAIB	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
107	25/11/21	SPPL	M.YUSRIJAL	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
108	25/11/21	SPPL	TARMIDI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
109	25/11/21	SPPL	M.YUSUF	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
110	25/11/21	SPPL	M. YUSUF	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
111	25/11/21	SPPL	M.YUSUF	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
112	25/11/21	SPPL	MAIMUN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
113	25/11/21	SPPL	MANSUR	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
114	25/11/21	SPPL	MARHABAN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
115	25/11/21	SPPL	MARZUKI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
116	25/11/21	SPPL	MUHAMMAD HS	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
117	25/11/21	SPPL	MUHAMMAD ZAINI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
118	25/11/21	SPPL	MULYADI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
119	25/11/21	SPPL	EVI YULIANTI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
120	25/11/21	SPPL	MUSLIADI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
121	25/11/21	SPPL	MUSMADAR HASAN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
122	25/11/21	SPPL	NURDIN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
123	25/11/21	SPPL	RIDWAN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
124	25/11/21	SPPL	MUZAKIR	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
125	25/11/21	SPPL	KARTINAH	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
126	25/11/21	SPPL	ILYAS RAMLI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
127	25/11/21	SPPL	ABDUL KADIR	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
128	25/11/21	SPPL	SITI JEMAH	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
129	25/11/21	SPPL	M ALI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
130	25/11/21	SPPL	ABDUL KARIM	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
131	26/11/21	SPPL	CV. LUMBUNG EMAS PERKASA	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
132	26/11/21	SPPL	MITRA SEJAGAT	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
133	26/11/21	SPPL	RUSLI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
134	26/11/21	SPPL	RUWAIDA	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
135	26/11/21	SPPL	SAIDAN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
136	26/11/21	SPPL	SAMSUL AMAD	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
137	26/11/21	SPPL	SAUDAH	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
138	26/11/21	SPPL	GAPOKTAN BABURRAHMAT	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
139	26/11/21	SPPL	KUSNEN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
140	26/11/21	SPPL	AMAT M	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
141	26/11/21	SPPL	SELAMAT	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
142	26/11/21	SPPL	LEGIMAN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
143	26/11/21	SPPL	ROSO SUNGKOWO	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
144	26/11/21	SPPL	IBRAHIM	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
145	26/11/21	SPPL	ABDUL RAHMAN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		

No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilaian	Pembrakarsa	Dukumen
146	26/11/21	SPPL	YUSNIAR YUNUS	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
147	26/11/21	SPPL	SULAIMAN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
148	26/11/21	SPPL	ZULHELMI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
149	26/11/21	SPPL	SULAIMAN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
150	26/11/21	SPPL	SYAMSIDAR	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
151	26/11/21	SPPL	TARMIZI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
152	26/11/21	SPPL	M NUR	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
153	26/11/21	SPPL	TUNDIR	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
154	26/11/21	SPPL	ZAINAL AB	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
155	26/11/21	SPPL	ABDULLAH YUNUS	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
156	26/11/21	SPPL	ZAINAL ABIDIN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
157	26/11/21	SPPL	ZAINAL ABIDIN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
158	26/11/21	SPPL	NURDIN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
159	26/11/21	SPPL	ZULKIFLI HARUN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
160	26/11/21	SPPL	UNIYAWATI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
161	26/11/21	SPPL	JUWONO	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
162	26/11/21	SPPL	ZUL FADLY	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
163	26/11/21	SPPL	SUTRESNO	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
164	26/11/21	SPPL	SUTINO	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
165	26/11/21	SPPL	SYARIBANUN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
166	26/11/21	SPPL	MARIANTO	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
167	26/11/21	SPPL	SAHIMAN SYAFII	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
168	26/11/21	SPPL	SUMARSO	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
169	26/11/21	SPPL	ASIAH	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
170	26/11/21	SPPL	DANDAN PURNAMA SARI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
171	27/11/21	SPPL	DARSINI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
172	27/11/21	SPPL	ANDIKA	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
173	27/11/21	SPPL	BUKHARI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
174	27/11/21	SPPL	HASBALLAH	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
175	27/11/21	SPPL	HERI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
176	27/11/21	SPPL	KASEH	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
177	27/11/21	SPPL	KATINO	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
178	28/11/21	SPPL	SUBANDI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
179	28/11/21	Sertifikat Standar	EDI EFRIAN MAULANA	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
180	28/11/21	SPPL	EDI EFRIAN MAULANA	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
181	28/11/21	SPPL	ABDULLAH USMAN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
182	28/11/21	SPPL	ZAINAL IBRAHIM	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
183	28/11/21	SPPL	KUSINI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
184	28/11/21	SPPL	MARDIANA	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
185	28/11/21	SPPL	IDRIS	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
186	28/11/21	SPPL	MUKHSIN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
187	28/11/21	SPPL	RAHMAH	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
188	28/11/21	SPPL	RINAL	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
189	28/11/21	SPPL	SUNARIYO	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
190	28/11/21	SPPL	SUPADI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
191	28/11/21	SPPL	SUPRALENA	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
192	28/11/21	SPPL	ROHANA	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
193	28/11/21	SPPL	SUPARDI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
194	28/11/21	SPPL	ADIANTO	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
195	28/11/21	SPPL	ADIANTO	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
196	28/11/21	SPPL	ADNAN YUNUS	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
197	28/11/21	SPPL	IRSAL	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
198	28/11/21	SPPL	HASANUDDIN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
199	28/11/21	SPPL	ABDUS SALAM USMAN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
200	29/11/21	SPPL	SULAIMAN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
201	29/11/21	SPPL	SAKDIAH	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
202	29/11/21	SPPL	ZULKIFLI A MANAF	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
203	29/11/21	SPPL	JULIANA	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
204	29/11/21	SPPL	ADRIYATI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
205	29/11/21	SPPL	ILYAS	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
206	29/11/21	SPPL	KANA RAHMAT	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
207	29/11/21	SPPL	KANA RAHMAT	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
208	29/11/21	SPPL	INDI EKA SAHPUTRA	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
209	29/11/21	SPPL	SELAMAT AMIN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
210	29/11/21	SPPL	ARIADI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
211	29/11/21	SPPL	NILAWATI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
212	29/11/21	SPPL	ABDULLAH	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
213	29/11/21	SPPL	SUKOCO	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
214	29/11/21	SPPL	BUKHARI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
215	29/11/21	SPPL	ZULFIKAR	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
216	29/11/21	SPPL	JASMAN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
217	29/11/21	SPPL	NGADIMAN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
218	29/11/21	SPPL	PONIDI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
219	29/11/21	SPPL	SUBUR HARDIANTO	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
220	29/11/21	SPPL	NURSI AH	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		

No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilaian	Pembrakarsa	Dukumen
221	29/11/21	SPPL	SRI WAHYUNI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
222	29/11/21	SPPL	MUSLIADI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
223	29/11/21	SPPL	SARBINI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
224	29/11/21	SPPL	SUWARNO	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
225	29/11/21	SPPL	RICO SUKMANA	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
226	29/11/21	SPPL	MARLINI	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
227	29/11/21	SPPL	RICO SUKMANA	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
228	29/11/21	SPPL	SANOTO	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
229	29/11/21	SPPL	JUMINGIN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
230	29/11/21	SPPL	SALIM	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
231	29/11/21	SPPL	MELU SATU	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
232	29/11/21	SPPL	MASAYIIN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
233	29/11/21	SPPL	SUGIMAN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
234	30/11/21	SPPL	KHAIRUR RIZAL	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
235	30/11/21	SPPL	KAMARUZZAMAN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
236	30/11/21	SPPL	HERMANSYAH PURBA	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
237	30/11/21	SPPL	HERMANSYAH PURBA	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
238	30/11/21	SPPL	MASIKUN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
239	30/11/21	SPPL	MASIKUN	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
240	30/11/21	SPPL	TEDDY SUPRIADY	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		
241	30/11/21	SPPL	TEDDY SUPRIADY	Bupati Aceh Timur-Kepala DPMPTSP Aceh Timur		

Sumber : Data Tahun 2021

Keterangan : Dinas Perizinan Penanaman Modal Terpadu Kabupaten Aceh Timur

Tabel. 42

Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3

Kabupaten Aceh Timur

Tahun : 2022

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Kegiatan/Usaha	Jenis Izin	Nomor SK
1	2	3	4	5	6	7
1	2022	Rumah Sakit Geraha Bunda	Jln. Medan - Banda Aceh, Gp. Buket Pala	Rumah Sakit	TPS LB3	660/21/PTLB3/ 2022
2	2022	PT. AZFA MEGA ROYAL	Gampong Alue Tho Kecamatan Peureulak	Pabrik Es Balok	TPS LB3	660/23/PTLB3/ 2022
3	2022	Pt. Perkasa Subur Sakti	Gampong Tualang Pateng Kecamatan Peureulak	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit	TPS LB3	660/16/PTLB3/ 2022

Keterangan : Tahun 2022

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur

Dokumen
8
Rancangan Teknis TPS LB3
Rincian Teknis LB3
Rincian Teknis LB3

Tabel. 43**Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)****Kabupaten Aceh Timur****Tahun : 2022**

No.	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)
1	2	3	4	5
1	Desa Tualang Pateng Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur		PT. PERKASA SUBUR SAKTI	14-11-2022
2	Gampong Blang Glem Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur		PT. TEUPIN LADA	15 -11-2022
3	Desa Keubon Teumpen Barat Kabupaten Aceh Timur	2022	PT. MUTIARA SAWIT LESTARI	16-11-2022
4	Desa Aluer Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur	2022	PT AGRA BUMI NIAGA	28-11-2022
5	Gampong Seuneubok Bayu Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur		PT BUGAK PALMA SEJAHTERA	24-08-2022
6	Desa Aramiyah Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur	2022	PT ENSEM SAWITA	29-09-2022
7	Desa Meurbou Dua Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur	2022	PT ANUGERAH FAJAR REZEKI	20-10-2022

Keterangan : Data Tahun 2021

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur

Tabel. 44
Kebencanaan
Kabupaten Aceh Timur
Tahun : 2022

No	Kecamatan	lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Yang Terdampak				Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)			
				Banjir	Puting Beliung	Tanah Longsor	Kebakaran	Mengungsi	Meninggal				
1	2	3	4						10	11			
1	Serbajadi	7 Desa	Banjir, Tanah Longsor dan Kebakaran										
2	Simpang Jernih	7 Desa	Banjir, Tanah Longsor dan Kebakaran										
3	Peunaron	2 Desa	Banjir, Tanah Longsor dan Kebakaran									18	
4	Birem Bayeun	17 Desa	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung										
5	Rantau Selamat	8 Desa	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung										
6	Sungai Raya	13 Desa	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung									00	
7	Peureulak	24 Desa	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung									26	
8	Peureulak Timur	20 Desa	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung									76	
9	Peureulak Barat	14 Desa	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung									53	
10	Ranto Peureulak	22 Desa	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung									20	
11	Idi Rayeuk	13 Desa	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung									89	
12	Peudawa	11 Desa	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung									80	
13	Banda Alam	12 Desa	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung					80					
14	Idi Tunong	22 Desa	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung dan Kebakaran	1	1	1	2	2,096					
15	Darul Ihsan	16 Desa	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung dan Kebakaran	1	1		2						
16	Idi Timur	12 Desa	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung dan Kebakaran	1	1		2						
17	Darul Aman	27 Desa	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung dan Kebakaran	1	2		2	83					
18	Nurussalam	22 Desa	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung dan Kebakaran	1	1		3	328					
19	Darul Falah	11 Desa	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung dan Kebakaran	1	1		2						
20	Julok	28 Desa	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung dan Kebakaran	2	2		4						
21	Indra Makmur	11 Desa	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung dan Kebakaran	1	1		2	3,366					
22	Pante Bidari	9 Desa	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung dan Kebakaran	3	1		3	1,976					
23	Simpang Ulim	7 Desa	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung dan Kebakaran	2	2		4	40					
24	Madat	13 Desa	Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung dan Kebakaran	1	1		5						
				35	26	10	113	18331	0				

Keterangan : Data Tahun 2021

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Timur

Tabel. 44
Kebencanaan
Kabupaten Aceh Timur
Tahun : 2022

NO	KECAMATAN	DESA/GAMPOENG	KETINGGIAN AIR	DAMPAK BENCANA										LOKASI PENGUNSI AN			
				TIDAK MENGUNSI		MENGUNSI		JUMLAH TERDAMPAK		LUKA LUKA	SAKIT	HILAN G	MD		KERUSAKAN		
				KK	JIWA	KK	JIWA	KK	JIWA	JIWA	JIWA	JIWA	JIWA				
1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12	13		
1	Birem Bayeun	1 Alue Sentang	30-200 cm (air Sudah Surut)	185	700	225	900	410	1,600						Jalan tert ±4 m	Mesjid, Kantor geucik, Menasah dan Rumah Tetangga Jumlah dapur umum 29 titik	
		2 Paya Tampah		150	543			150	543								
		3 Alue Gadeng Kebu		220	852			220	852								
		4 Paya Bili Sa		116	464	84	336	200	800								
		5 Paya Bili dua		200	764			200	764								
		6 Alur Nyamuk		210	967	40	198	250	1,165								
		7 Aramiyah		100	371			100	371								
		8 Alue Gadeng GP		200	385			200	385								
		9 Birem Rayeuk						-									
		10 Bayeun		70	273			70	273								
		11 Buket Selemak				200	751	200	751								
		12 Merbau Dua		200	739			200	739								
		13 Alu Canang						-									
		14 Bukit Tiga				70	280	70	280								
		15 Benteng				60	240	60	240								
		16 Alue Drin				27	108	27	108								
		17 Paya Paelawi				46	230	46	230								
		JUMLAH				1,651	6,058	752	3,043	2,403	9,101						
2	Indra Makmur	1 Alue Ie Mirah	30-200 cm (air Sudah Surut)	157	478				157	478				Jembatan 1 RB			
		2 Julok Rayeuk Utar		303	917	1		304	917								
		3 Pelita S Jaya		187	503	250	1,400	437	1,903								
		4 Jambo Lubok		203	617			203	617								
		JUMLAH				850	2,515	251	1,400	1,101	3,915						
3	Sungai Raya	1 Buket Drien	20-150 cm (air sudah surut)			300	937	300	937						Meunasah, Mesjid dan rumah tetangga		
		2 Sungai Simpang		90	250	11	50	101	300								
		3 Snb Pase		122	488	120	244	242	732								
		4 Snb Aceh		200	516	54	150	254	666								
		5 Krueng Lingka		45	180	50	130	95	310								
		6 Gajah Meuntah				90	160	90	160								
		7 Alue Itam				90	340	90	340								
		8 Geulumpang Payo		223	892	230	720	453	1,612								
		9 Labuhan Keude				40	160	40	160								
		10 Bukit Selamat				100	385	100	385								
JUMLAH				680	2,326	1,085	3,276	1,765	5,602								
4	Idi Tunong	1 Alue lhok	10-100 cm (air)	60	240	44	176	104	416					jembatan 1 RB	An.Fazri 8 Thn		
		2 Snb.Buya		84	336	17	68	101	404			1					
		3 Blang Siguci		40	160	13	52	53	212								
		4 Blang Minjei		40	160	10	40	50	200								
		5 Paya Gaboh		36	144	10	40	46	184								
		6 Snb.Buloh		30	120	13	52	43	172								

		5 Tepin Raya		45	185			45	185											
		6 Lhok Seuntang		30	120	26	104	56	224											
		JUMLAH		327	1,102	176	566	503	1,668											
10	Nurussalam	1 Gpg. Mesjid	10-70 cm (air sudah surut)	150	531			150	531											
		2 Gpg. Lhee		76	287			76	287											
		3 Alue siwah Serdang		56	198			56	198											
		4 Seumatang Aron		10	52			10	52											
		5 Snb Rambong		15	77			15	77											
		JUMLAH		307	1,145	-	-	307	1,145											
11	Darul Falah	1 Tunong Ulee Gajah	10-65 cm (air sudah surut)			40	225	40	225											
		2 Buket Taufah				35	185	35	185											
		3 Ceumpeudak				30	175	30	175											
		4 Snb.Panton				31	159	31	159											
		5 Keude Blang				15	80	15	80											
		6 Tunong Bugeng				40	227	40	227											
		JUMLAH		-	-	191	1,051	191	1,051											
12	Banda Alam	1 Jambo Reuhat	20-100 cm (air sudah surut)			100	495	100	495											
		2 Blang Rambong				100	489	100	489											
		3 Snb.Pango				100	497	100	497											
		4 Panton Rayeuk M				15	75	15	75											
		5 Snb Benteng			80	400			80	400										
		6 Paya Laman			20	100			20	100										
		7 Uram Jalan			10	50			10	50										
		JUMLAH		110	550	315	1,556	425	2,106											
13	Pante Bidari	1 Blang Seunong	10-50 cm	72	294			72	294											
		2 Sijudo	10-80 cm			47	159	47	159										Gp. Bulut dan len Pipa	
		3 Pante Labu		110	440			110	440											
		4 Pante Rambong						-	-											
		JUMLAH		182	734	47	159	229	893											
14	Simpang Jernih	1 Pante Kera		50	175	4	15	54	190											
		JUMLAH		50	175	4	15	54	190											
15	Puereulak Barat	1 Beusa Seberang	20-70 cm (air Brtambah)	515	1,157	97	361	612	1,518											
		2 Beringin		25	100	7	25	32	125											
		3 Tanjung Tualang		63	252	14	56	77	308											
		4 Kabu							-	-										
		5 Beusa Baro		76	304	20	80	96	384											
		6 Meunasah Gedong							-	-										
		7 Kebon Teumpen							-	-										
		8 Teumpen							-	-										
		9 Payah Gajah							-	-										
		JUMLAH		679	1,813	138	522	817	2,335											
16	Simpang Ulim	1 Teupin Breuh	20 - 60 cm			96	382	96	382										Menasah dan Balai Pengajian	

		2 Blang Ni	30-150 cm	5	18	36	103	41	121											Tanggul sungai arakundo
		JUMLAH		5	18	132	485	137	503											
17	Peunaron	1 Peunaron Baru		50	189	30	124	80	313											
		2 Peunaron Lama		35	142	12	49	47	191											
		3 Arul Pinang		15	64	12	53	27	117											
		JUMLAH		100	395	54	226	154	621											
18	Peureulak	1 Cek Embon		220	900			220	900											
		2 Lubok Pempeng		104	288			104	288											
		3 Blang Simpo		55	181			55	181											
		4 Bandrong		70	200			70	200											
		5 Tanoh Rata		40	150	10	45	50	195											
		6 Blang Batee	10-40 cm	160	480			160	480											
		7 Pasir Putih		30	75			30	75											
		8 Lhok Dalam		340	825			340	825											
		9 Tualang		44	170			44	170											
		10 Blang Bitra		42	164			42	164											
		11 Beusa Meuranoe		150	500	41	115	191	615											
		12 Blang Balok		165	325			165	325											
		13 Alue Dua Paya Gaj	10-40 cm	5	20			5	20											
		14 Paya Lipah		75	120			75	120											
		15 Dama Tutong		35	180			35	180											
		JUMLAH		1,535	4,578	51	160	1,586	4,738											
19	Darul Aman	1 Buket Kulam		31	124			31	124											
		2 Snb. Tuha Sa		60	240			60	240											
		3 Lhok Geulumpang		25	100			25	100											
		4 Jungka Gajah		8	32			8	32											
		5 Alue Gadeng		21	84			21	84											
		6 Blang Buket		27	108			27	108											
		7 Kapai Baro		35	140			35	140											
		8 Dama Pulo Sa		23	92			23	92											
		9 Baro		21	84			21	84											
		10 Keude		65	260			65	260											
		JUMLAH		316	1,264	-	-	316	1,264											
		JUMLAH TOTAL		8,566	28,690	5,152	19,653	13,718	48,343	-	-	-	2							

Keterangan : Data Tahun 2021

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Timur

KETERANGAN

14

Kronologis :

Akibat hujan deras yang terjadi dan meluapnya beberapa sungai pada tanggal 30 Desember 2021 menyebabkan banjir di beberapa kecamatan. Pada tanggal 1 Jan 2022 banjir pukul 11.45 banjir yang melanda beberapa kecamatan dalam wilayah Kecamatan Pante Bidari sebagian Kab. Aceh Timur pada tanggal 2 Januari 2022 ini hari di beberapa kecamatan.

Upaya :

1. Koordinasi dengan Instansi Terkait
2. Melakukan Pendataan
3. Menurunkan Satgas PB di lokasi
4. Melakukan Evakuasi
5. Siaga di lokasi bencana

Hambatan :

1. Akses Menuju lokasi bencana
2. kurangnya perahu karet
3. Kurangnya Logistik

Kebutuhan Mendesak

1. Penambahan perahu karet
2. Penambahan Logistik
3. Dana Siap Pakai untuk kegiatan Tanggap Darurat
4. Tenda Pengungsi

Keadaan Cuaca

Berawan

Kondisi Muktahir

Dibeberapa kecamatan air sudah surut dan pengungsi sudah kembali ke rumah masing masing untuk kecamatan simpang ulim dan julok debit air semakin meningkat karena banjir kiriman dari kecamatan Pante bidari dan

bersamaan dengan pasang air laut

Sampai saat ini petugas posko
Tanggap darurat BPBD Aceh
Timur masih Siaga di kecamatan
simpang ulim

An.M.ficki Raihan Usia.13 Thn

Tabel. 45

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Kabupaten Aceh Timur

Tahun : 2022

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km)	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (%)
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-

Keterangan : Tidak Ada Data

Sumber :

Tabel. 46
Jenis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah
Kabupaten Aceh Timur
Tahun : 2022

No.	Kabupaten	Lokasi	Nama TPA	Jenis TPA	Luas TPA (Ha)	Kapasitas (M3)	Volume Eksisting (M3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Aceh Timur	Desa Seuneubok Dalam, Kec. Darul Ihsan	TPA Lhok 7	sanitary Landfill	5	124	
2	Aceh Timur	Desa Aramiah, Kec. Birem Bayeun	TPA Birem Bayeun	Controlled Landfil	2.06	100	

Keterangan : Data Tahun 2021

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur

Tabel. 47
Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari
Kabupaten Aceh Timur
Tahun : 2022

No	Kecamatan	Lokasi	JumlahPenduduk	Timbulan Sampah (M3/hari)
1	2	3	4	5
1	Kecamatan Idi Rayeuk	Gampong Jawa		12.56
		Desa Keude Aceh		9.03
		Desa Gampong Aceh		7.59
		Desa Kuta Blang		7.42
		Desa Tanoh Anoe		9.92
2	Kecamatan Peureulak	Desa Leugo		4.33
		Desa Lhok Dalam		3.98
		Desa Keude Peureulak		6.04
3	Kecamatan Peureulak Timur	Desa Seuneubok Keude		2.23
		Desa Alue Bu Alue Nireh		1.82
		Desa Alue Bu Alue Lhok		1.75
4	Kecamatan Peureulak Barat	Desa Beusa Seubrang		5.41
5	Kecamatan Ranto Peureulak	Desa Buket Pala		4.19
6	Kecamatan Julok	Desa Keude Kuta Binjei		3.92
		Desa Blang Pauh Sa		3.02
		Desa Blang Uyok		1.87
		Desa Ulee Tanoh		1.76
		Desa Blang Pauh Dua		1.71
7	Kecamatan Simpang Ulim	Desa Gampong Blang		4.18
		Desa Gampong Baro		3.48
8	Kecamatan Pante Bidari	Desa Meunasah Teungoh		3.97
		Desa Keude		4.37
9	Kecamatan Nurussalam	Desa Keude Bagok		2.31
		Gampong Keude Bagok		2.04
10	Kecamatan Birem Bayeun	Desa Keude Birem		4.29
		Desa Birem Rayeuk		3.95
		Desa Bayeun		2.99
11	Kecamatan Rantau Seulamat	Desa Bayeun		3.00
		Desa Rantau Panjang		3.84
12	Kecamatan Sungai Raya	Desa Labuhan Keude		7.15
13	Kecamatan Peudawa	Desa Gampong Keude		4.58
		Desa Seuneubok Peunteut		3.23
14	Kecamatan Madat	Desa Madat		3.81
15	Kecamatan Darul Ihsan	Desa Keude Dua		3.53
16	Kecamatan Simpang	Desa Simpang Jernih		2.92
17	Kecamatan Indra	Desa Seuneubok Bayu		4.52
18	Kecamatan Serbajadi	Desa Lokop		3.55
19	Kecamatan Idi Tunong	Desa Blang Guci		2.60
20	Kecamatan Banda Alam	Desa Panton Rayeuk M		2.36
21	Kecamatan Darul Aman	Desa Gampong Keude		4.31
		Desa Keude Idi Cut		5.60
Total				175.15

Sumber : Data Tahun 2022

Keterangan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur

Tabel. 48
Jumlah Bank Sampah
Kabupaten Aceh Timur
Tahun : 2022

No.	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan : Data Tahun 2021

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur

Tabel. 49
Kegiatan Fisik Lainnya oleh Instansi
Kabupaten Aceh Timur
Tahun : 2022

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
1	2	3	4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
dst			

Keterangan : Tidak Ada Data

Sumber :

Tabel. 50
Status Pengaduan Masyarakat
Kabupaten Aceh Timur
Tahun : 2022

No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
1	2	3	4	5
1	Masyarakat	Air dan Udara (METCO)	2021	Dinas Lingkungan Hidup
2	Masyarakat	Udara (PKS ENSEM)	2021	Dinas Lingkungan Hidup
3	Masyarakat	Air (PKS PPS)	2021	Dinas Lingkungan Hidup
4	Masyarakat	Air (PKS ABN)	2021	Dinas Lingkungan Hidup
5	Masyarakat	Ternak Ayam (Masyarakat)	2021	Dinas Lingkungan Hidup
6	Masyarakat	Air Laut (Pertamina HE)	2021	Dinas Lingkungan Hidup
7	Masyarakat	Kasus Kebakaran Lahan (Ranto Peureulak)	2021	Dinas Lingkungan Hidup
8	Masyarakat	Lahan kebun sawit Pak Sayed Zainon (Pantee	2021	Dinas Lingkungan Hidup
9	Masyarakat	Lahan Kebun Sawit Pak H.Muslim (Banda Alam)	2021	Dinas Lingkungan Hidup

Keterangan : Data Tahun 2021

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur

Tabel. 51**Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup Tahun 2022**

No	Nama LSM	Akta Pendirian
1	2	3
1	Samudra Aceh Timur	No. 23 Tanggal 29-08-2017
2	LSM Aceh Mangrove Care Foundation	No. 6 Tanggal 06-11-2009
3	Komite Pemantauan Program Hutan Indonesia (KPPHI) Kab. Aceh Timur	No 17 Tanggal 08-12-2010
4	LSM Forum Pemerhati Lingkungan Go-Green (Penhijauan Lingkungan) Aceh	No. 37 Tanggal 25-03-2015

Keterangan : Tahun 2022

Sumber : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur

Alamat
4
Jln. Medan Banda Aceh Gampong Aceh Kec. Idi Rayeuk
Jln Tanjong Minjei Msn Asan Gp. Lueng Sa Km 6 Kec. Madat
Jln RSU Rehab Medik Desa Lhok Dalam Kecamatan Peureulak
Jln. Medan - Banda Aceh Desa Peulalu Kec. Simpang Ulim Keb. Aceh Timur

Tabel. 52**Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022**

No.	Tingkat Pendidikan	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Doktor (S3)			
2	Master (S2)	1		1
3	Sarjana (S1)	27	5	32
4	Diploma (D3/D4)	1	2	3
5	SLTA	52	6	58
6	SLTP	5	1	6
7	SD	5	0	5
Jumlah		91	14	105

Keterangan : Data tahun 2021

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur

| |

Tabel. 53**Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan dan Staf yang telah mengikuti Diklat Tahun 2022**

No.	Nama Instansi	Staf Fungsional			Staf Yang Sudah Diklat	
		Jabatan Fungsional	Laki - laki	Perempuan	Laki – laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Lingkunga Hidup	PPLH	3			
2	Dinas Lingkunga Hidup	PEDAL	5	1		

Keterangan : Data Tahun 2021

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur

Tabel. 54
Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup
Tahun 2022

No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
1	2	3	4	5
1	Sekolah	Adiwiyata	Dinas Lingkungan Hidup	2021

Keterangan : Data Tahun 2021

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur

Tabel, 55
Kegiatan / Program Yang Diinisiasi Masyarakat
Tahun 2022

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
dst				

Keterangan : Tidak Ada Data

Sumber :

Tabel. 56
Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2022

No	URAIAN	Dua Tahun Sebelumnya	Satu Tahun Sebelumnya
1	2	3	4
1	PERTANIAN	-	-
	a. Pertanian Sempit	-	-
	- Tanaman Bahan Makanan	-	-
	- Tanaman Perkebunan	-	-
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya	-	-
	b. Kehutanan	-	-
	c. Perikanan	-	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-
3	Industri Pengolahan	-	-
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	-	-
5	Bangunan	-	-
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	-	-
7	Pengangkutan dan Komunikasi	-	-
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	-
9	Jasa-Jasa	-	-
PRODUK DOMESTIK BRUTO		-	-
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS		-	-

Keterangan : Tidak Ada Data

Sumber :

Tabel. 57
Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2022

No	URAIAN	Dua Tahun Sebelumnya	Satu Tahun Sebelumnya
1	2	3	4
1	PERTANIAN	-	-
	a. Pertanian Sempit	-	-
	- Tanaman Bahan Makanan	-	-
	- Tanaman Perkebunan	-	-
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya	-	-
	b. Kehutanan	-	-
	c. Perikanan	-	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-
3	Industri Pengolahan	-	-
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	-	-
5	Bangunan	-	-
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	-	-
7	Pengangkutan dan Komunikasi	-	-
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	-
9	Jasa-Jasa	-	-
PRODUK DOMESTIK BRUTO		-	-
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS		-	-

Keterangan : Tidak Ada Data

Sumber :

Tabel. 58

Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tahun 2022

No.	Jenis Produk Hukum Bidang LH	Jenis Produk Hukum Bidang Kehutanan	Nomor dan Tanggal	Tentang	Dokumen
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
dst					

Keterangan : Tidak Ada Data

Sumber :

Tabel. 59**Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup****Tahun 2022**

No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan (Rp)
1	2	3	4	5
1	APBK	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten (Dokumen IKPLHD)	3,616,000	12,598,000
2	APBK	Penyelenggaraan KLHS RTRW	20,454,500	-
3	APBK	Penyelenggaraan KLHS RPJM Transisi	13,429,315	-
4	APBK	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	-	14,921,000
5	APBK	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	-	28,438,280
6	APBK	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sangsi Upaya dan RPPLH	-	3,920,000
7	APBK	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	-	220,648,300
8	APBK	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	-	20,931,700

9	APBK	Koordinasi, Singkronisasi dan pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	-	17,123,000
10	APBK	Ruang Terbuka Hijau	125,782,000	262,917,315
11	APBK	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneka Ragaman Hayati	17,400,000	564,664,800
12	APBK	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat dalam PPLH (Sekolah Adiwiyata)	12,482,871	50,623,000
13	APBK	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten	5,751,500,500	7,684,730,920
14	APBK	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kabupaten	1,222,853,000	770,540,000

Keterangan : Tahun 2022

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur

Tabel. 60
Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2022

No.	Sumber	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Pajak	17,357,692,096,160
2	Retribusi	1,040,796,660,000
3	Laba BUMD	1,669,455,900,000
4	Pendapatan lainnya yang Sah	12,159,849,314,000
	Jumlah	32,227,793,970,160

Keterangan : Data Tahun 2022

Sumber : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur

Tabel. 61
Inovasi Pengelolaan LH daerah Kabupaten Aceh Timur
Tahun : 2021

No.	Kecamatan	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Keterangan : Tidak Ada Data

Sumber :

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur, 2016. Profil Keanekaragaman Hayati Kabupaten Aceh Timur.
- BPS Kabupaten Aceh Timur, 2016. Aceh Timur Dalam Angka 2016.
- PT. Perkasa Subur Sakti, 2016. Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Periode Januari s/d Juni 2016.
- Tualang Raya. PT, 2016. Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Periode Januari s/d Juni 2016.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- Peraturan Pemerintah RI No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah.
- Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.
- Sekretariat Jenderal Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2016. Penyampaian Pedoman Nirwasita Tantra, KLHK Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENYUSUN

➤ **DATA PRIBADI**

Nama : **HERMANSYAH, S.Sos.I**
NIP : 197908082007011003
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Pengawas Lingkungan Hidup Muda
Unit : Bidang Penataan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan PPLH
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur

➤ **RIWAYAT PENDIDIKAN**

1992 : Tamat SDN No.12 Langsa
1995 : Tamat SMPN No.9 Langsa
1998 : Tamat SMK Kejuruan Langsa
2010 : Tamat STAIN ZCK Langsa

➤ **PENGALAMAN KERJA**

2007 : Staf Operator Tenga Administrasi Umum pada Dinas Syariat Islam
2010 : Staf Keuangan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Timur
2016 : Pj. Kasi, Informasi Pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Aceh Timur
2017 : Kasi, Pelayanan Informasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Aceh Timur
2021 : Kasi, Deseiminasi Informasi dan Sumber daya Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Aceh Timur
2022 : Kabid. Penataan dan Pengawasan Izin Lingkungan & PPLH s/d Sekarang

➤ **PELATIHAN**

2019 : PIM Diklat Kepemimpinan Tingkat **IV**
2020 : Interrated Cyber Journalism Training

➤ **PENGALAMAN PENYUSUNAN**

Penyusunan Aplikasi Media Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019

Salah satu dari 2 (dua) penulis IKPLHD Kab. Aceh Timur Tahun 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENYUSUN

➤ **DATA PRIBADI**

Nama : **Zulfikri, S.T**
TempatTanggalLahir: Alue Bu Tuha / 24 Mei 1979
Agama : Islam
Alamat : Desa Alue Bu Tuha Kec. Peureulak Barat
No. HP : 085270104061
Alamat email : joelfija.32@gmail.com

➤ **RIWAYAT PENDIDIKAN**

1992 : Tamat SDN Alue Bu
1995 : Tamat SMPN 4 Peuruelak
1998 : Tamat SMUN 1 Peureulak
2004 : Tamat Universitas Sumatera Utara Prodi Teknik Kimia

➤ **PENGALAMAN KERJA**

2005 : Staf pada PT. Bank Danamon
2006 : Tenaga Pengajar pada SMAN 1 Peudawa
2009 : Asisten Fasilitator Kecamatan Program PNPM-MP
2011 : Staf Badan Lingkungan Hidup dan Pemadam Kebakaran
2013 : Koordinator Laboratorium Lingkungan Hidup
2015 : Plt. Kepala Sub bidang AMDAL
2016 : Pj. Kepala Sub bidang AMDAL
2017 : Pj. Kasi. Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
2018 : Kasi. Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

➤ **PELATIHAN**

2011 : Diklat Pengendalian Mutu Analisis Laboratorium Lingkungan
2014 : Diklat PPA (45JP)
2021 : Bimtek Pembuatan Peta DDDTLH

➤ **PENGALAMAN PENELITIAN**

- 2002 : Pembuatan Anggur Wine dari Daging Buah Pala Segar
- 2003 : KP di PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang
- 2004 : Pra Rancangan Pabrik Pembuatan Chlorine Dioxide dari Sodium Chlorite, Hidrogen Peroksida, AsamSulfat dengan Kapasitas 125 Ton / jam

➤ **PENGALAMAN PENYUSUNAN**

- Salah satu dari 3 (tiga) penulis SLHD Kab. Aceh Timur Tahun 2015
- Salah satu dari 3 (tiga) penulis SLHD Kab. Aceh Timur Tahun 2016
- Salah satu dari 3 (tiga) penulis IKPLHD Kab. Aceh Timur TA. 2017
- Salah satu dari 3 (tiga) penulis IKPLHD Kab. Aceh Timur TA. 2018
- Salah satu dari 3 (tiga) penulis IKPLHD Kab. Aceh Timur TA. 2019
- Salah satu dari 3 (tiga) penulis IKPLHD Kab. Aceh Timur TA. 2020
- Salah satu dari 3 (tiga) penulis IKPLHD Kab. Aceh Timur TA. 2021
- Salah satu dari 2 dua) penulis IKPLHD Kab. Aceh Timur TA. 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENYUSUN

➤ **DATA PRIBADI**

Nama : **SYAKIRON**
Tempat Tanggal Lahir: Seuneubok Jalan/ 28 April 1990
Agama : Islam
Alamat : Desa Tanoh Anou, Kec. Idi Rayeuk
No. HP : 0852 6144 2239
Alamat email : syakir_ron@yahoo.co.id

➤ **RIWAYAT PENDIDIKAN**

2002 : Tamat MIN Blang Siguci
2005 : Tamat SLTPA N 1 Idi Rayeuk
2008 : Tamat SMA N 1 Idi Rayeuk
2011 : Tamat D3 MIK Indonesia Banda Aceh
2011 : Tamat D3 Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi
Indonesia LP3I Banda Aceh
2015 : Tamat S1 Manajemen. Ekonomi Unsyiah Banda Aceh

➤ **PENGALAMAN KERJA**

2005 : Karyawan Swalayan Idi Rayeuk
2008 : Karyawan FBf Banda Aceh
2008 : Asisten Leb.Anatomi FK UniversitasSyiah Kuala Banda Aceh
2010 : Karyawan Biro Organisasi Gubernur Aceh Banda Aceh
2012 : Operator Koperasi Eritrosit FK Universitas Syiah Kuala
2017 : Staf DLH Kabupaten Aceh Timur S/d Sekarang

➤ **PELATIHAN**

2009 : Bakti Sosial Peduli Lingkungan Bebas Penyakit FK Unsyiah
2011 : Pelatihan SKPA Biro Organisasi Gubernur Aceh

➤ **PENGALAMAN PENELITIAN**

2002 : Pengaruh Kualitas Pelayanan Pendidikan Pada Fakultas Kedokteran Terhadap Kepuasan Mahasiswa di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

➤ **PENGALAMAN PENYUSUNAN**

Salah satu dari 3 (tiga) penulis IKPLHD Kab. Aceh TimurTahun 2017

Salah satu dari 3 (tiga) penulis IKPLHD Kab. Aceh TimurTahun 2018

Salah satu dari 3 (tiga) penulis IKPLHD Kab. Aceh TimurTahun 2019

Salah satu dari 3 (tiga) penulis IKPLHD Kab. Aceh TimurTahun 2020

Salah satu dari 3 (tiga) penulis IKPLHD Kab. Aceh TimurTahun 2021



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR

NOMOR 660/299/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2023

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan hidup, diperlukan ketersediaan data sebagai bahan informasi untuk mengembangkan potensi sumber daya alam Kabupaten Aceh Timur;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah pada kegiatan pengendalian pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2023, perlu membentuk Tim;
 - c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur Nomor 800/270/2023 Tanggal 7 Juni 2023 Perihal Usulan Pembuatan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 35);
10. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);
11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 5);

12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- melakukan evaluasi terhadap dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Aceh Timur;
 - melakukan evaluasi terhadap laporan ringkasan eksekutif Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Aceh Timur;
 - melakukan *supervise* terhadap penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Aceh Timur;
 - melakukan pengumpulan data sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam petunjuk teknis dokumentasi Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Aceh Timur;
 - memberikan masukan terhadap permasalahan lingkungan hidup, isu-isu prioritas lingkungan hidup, status dan upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup (*pressure, state and response analysis*);
 - menyusun dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Aceh Timur dan laporan ringkasan eksekutif; dan
 - melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasarkan petunjuk atau arahan dari atasan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Aceh Timur.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Aceh Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada saat kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 19 Juni 2023 M
30 Dzulqaidah 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR

NOMOR : 660 / 299 / 2023

TANGGAL : 19 Juni 2023 M

30 Dzulqaidah 1444 H

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati Aceh Timur	Pengarah Penanggung Jawab Ketua
2.	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur	
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur	
4.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur	Sekretaris
5.	Kabid. Penataan, Pengawasan Izin Lingkungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur	Anggota
6.	Kabid. Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur	Anggota
7.	Kabid. Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur	Anggota
8.	Zulfikri, ST (Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur)	Anggota
9.	Amri (Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur)	Anggota
10.	Syakiron, SE (Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur)	Anggota
11.	Indra Bayu Segara, ST (Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur)	Anggota

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,



MAHYUDDIN

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH**